

LAPORAN KINERJA

Perwakilan Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi D.I. Yogyakarta

2023

Berencana Itu Keren



Sambutan



Laporan Kinerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Substansi yang ada dalam LKIP ini memuat informasi yang berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu tahun anggaran 2023 dan menyajikan informasi capaian kinerja, proses pelaksanaan dan tantangan yang dihadapi. Seluruh informasi tersebut tersaji dalam deskripsi yang tertuang dalam analisis capaian kinerja. Kami berharap LKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif dalam menilai kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus sebagai masukan dalam upaya peningkatan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2024
Kepala,



Dra. Andi Ritamariani, M.Pd



LKIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta

Tahun Anggaran 2023

DAFTAR ISI

Sambutan.....	i
Executive Summary	v
BAB I	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS	3
D. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	4
E. PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG	4
F. ISU STRATEGIS.....	6
BAB II	8
A. Rencana Strategis	8
B. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahunan pada tahun 2023.....	17
C. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahun 2024.....	23
D. Perjanjian Kinerja	27
E. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Program	29
BAB III	32
A. CAPAIAN KINERJA BKKBN.....	32
B. REALISASI ANGGARAN	53
C. KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA	56
D. EVALUASI KINERJA	69
E. PERBAIKAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TA 2024.....	74
BAB IV	110
A. PENUTUP.....	110
LAMPIRAN.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Trend pencapaian indikator kinerja 2021-2023	vi
Tabel 2.1 Program Prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2022	17
Tabel 2.2 Rencana Kerja Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2022	19
Tabel 2.3 Program Prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2023	23
Tabel 2.4 Rencana Kerja Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2023	24
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	29
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja	32
Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022	32
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian dari Tahun 2020 sampai 2022	46
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian kinerja Perwakilan BKKBN DIY dengan capaian nasional	46
Tabel 3.5 Perbandingan Tahun 2022 dengan Jangka Menengah 2024	52
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN DIY TA. 2022	54
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN DIY TA. 2022 per program	55
Tabel 3.8 PK DIY 2022	61
Tabel 3.9 Hasil Penilaian Internal ZI menuju WBK Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2021	71
Tabel 3.10 Hasil Penilaian SAKIP Perwakilan BKKBN DIY	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN DIY	3
Gambar 3.1 Grafik Perkembangan TFR	41
Gambar 3.2 Grafik Perkembangan mCPR	42
Gambar 3.3 Grafik Perkembangan Unmet Need	44
Gambar 3.4 Grafik fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	47
Gambar 3.5 Grafik BKR dan PIK Remaja	48
Gambar 3.6 Grafik Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	51
Gambar 3.7 Tampilan Web Survey Kepuasan Masyarakat dan Hasilnya	65
Gambar 3.8 Tangkapan Layar Aplikasi Digital Office	67
Gambar 3.9 Tampilan Learning Management System	68

Executive Summary

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak sebagai unit pelaksana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di daerah yang melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat, sehingga visi dan misi mengacu pada penetapan BKKBN Pusat. Perjanjian Kinerja yang diamanahkan kepada Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta berisi sasaran strategis dan sasaran program dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024.

Renstra tersebut memuat Visi BKKBN yaitu **“terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”**, dengan misi:

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang;
- b. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
- c. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup;
- d. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global;
- e. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi;
- f. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, ditetapkan 6 sasaran strategis, yaitu:

- a. Menurunnya Angka Kelahiran Total (*TFR*)
- b. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (*CPR*) modern
- c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
- d. Menurunnya Angka Kelahiran remaja
- e. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

f. Meningkatkan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 ini terdapat 60 (enam puluh) indikator kinerja, di antaranya terdapat indikator Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) sebanyak 7 (tujuh) indikator. Dari 60 (enam puluh) indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tersebut, 16 (enam belas) di antaranya dapat dicapai dengan capaian lebih dari 100%. Terdapat 43 (empat puluh tiga) indikator lainnya yang dapat dicapai dengan persentase capaian di kisaran 94,77% s.d. 100% (sangat baik). Hanya satu indikator yang dicapai pada persentase 72,57% (cukup) yaitu Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII).

Trend pencapaian indikator kinerja jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Trend pencapaian indikator kinerja 2021-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023		
		TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/ TFR) per WUS (15-49 tahun)	1,9	1,91	99,47%	1,82	1,93	93,96%	1,89	1,81	104,23%
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i>)	62,4	55,6	89,10%	57,18	58,5	102,31%	56,01	58,2	103,91%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	5,62	19,8	-152,31%	14,5	19,8	63,45%	19,55	14,2	127,37%
4	Jumlah Keluarga dengan Baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	51.768	51.768	100,00%	56.722	56.722	100,00%	56.722	56.722	100,00%
5	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	422	422	100,00%	443	443	100,00%	465	465	100,00%
6	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokasi)	235	268	114,04%	377	377	100,00%	430	430	100,00%

Anggaran yang diterima oleh Perwakilan BKKBN DIY pada tahun 2023 telah terserap sebesar 99,87%. Realisasi anggaran tersebut sebesar Rp 61.063.962.010,-

dari total pagu anggaran Rp 61.146.469.000,-

Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja dan memenuhi target jangka menengah Renstra adalah sebagai berikut:

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan program kepada masyarakat dengan dukungan komitmen dan kebijakan dalam mempertimbangkan skema kegiatan yang berbasis Teknologi Informasi dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran;
2. Melakukan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program Bangga Kencana dan difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian *mCPR* rendah dan *Unmet Need* yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok termasuk di desa wilayah Kampung KB;
4. Mengintensifkan pelayanan KB Bergerak di wilayah DTPK melalui bhaksos pelayanan KB MKJP yang terintegrasi dengan pelayanan *papsmear*;
5. Mengintensifkan pembinaan program Bangga Kencana baik pada wilayah Kampung KB maupun wilayah di luar Kampung KB untuk mendorong capaian Program Bangga Kencana dengan mengintensifkan pemanfaatan berbagai media dalam menyebarkan program Bangga Kencana di wilayah DIY;
6. Pelibatan generasi millennial menjadi penting di setiap kegiatan yang ada di kelompok kegiatan, oleh karena mobilitasnya yang tinggi dan maju dalam hal Teknologi Informasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perwakilan BKKBN DIY berkewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai misi dan tujuan organisasi.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, BKKBN berkontribusi langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020 – 2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing” dan mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak sebagai unit pelaksana BKKBN di daerah yang melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat untuk mendukung agenda prioritas tersebut.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Perka BKKBN Nomor 82 Tahun 2011 (pasal 2), Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

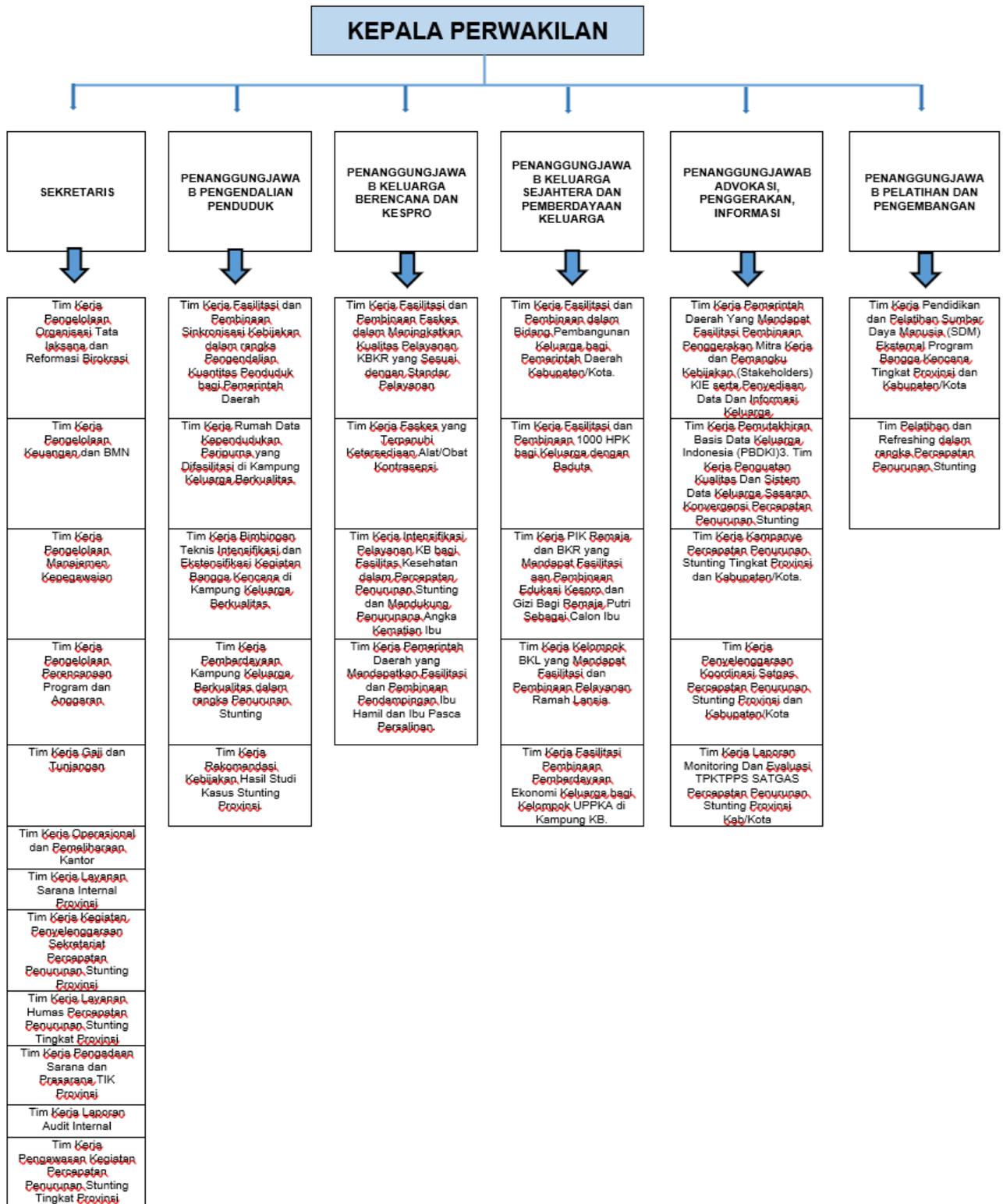
- a. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- e. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- f. Pelaksanaan tugas administrasi umum;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. Pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

STRUKTUR ORGANISASI

Berpedoman pada Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 297/KEP/B4/2022 Tentang Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BKKBN DIY Nomor: 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0436 /HK.02.02/J1/2023 tanggal 24 Januari 2023, Perwakilan BKKBN DIY dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan dan membawahi 1 (satu)

Sekretaris sekaligus Penanggung Jawab Sekretariat dan terdapat 6 (enam) orang Penanggung Jawab Bidang serta 34 Tim Kerja. Adapun struktur organisasi Perwakilan BKKBN DIY digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN DIY



C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan/Prioritas Nasional (PN). Dalam Prioritas Nasional “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing” BKKBN berperan dalam Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, serta Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

Sedangkan pada Prioritas Nasional “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” BKKBN memiliki peran pada Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unit pelaksana BKKBN di daerah diberi mandat untuk melaksanakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang terkait dengan Prioritas Nasional tersebut yang ada di Daerah istimewa Yogyakarta.

D. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi merupakan upaya dalam rangka memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan bersih dan baik sebagai prasyarat utama pembangunan nasional. Road Map RB-BKKBN terbagi dalam 3 (tiga) periode yaitu Periode 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Dalam Road Map RB BKKBN 2020 – 2024 terdapat 3 (tiga) Sasaran, yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang kapabel serta Pelayanan publik yang prima.

Penyusunan Road Map ini didasarkan pada Keputusan Kepala BKKBN; Nomor: 129/KEP/B4/2020 tertanggal 25 Juni 2020 tentang Tim Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi BKKBN 2020-2024. Selaras dengan Kemenpan RB; Road Map Reformasi Birokrasi BKKBN 2020-2024 memiliki delapan area perubahan yang meliputi: Manajemen Perubahan, Deregulasi kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur,

Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Asas yang akan dikedepankan pada Road Map RB BKKBN, Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

E. PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG

E.1 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Beberapa permasalahan dan tantangan yang berkaitan dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data Pemutakhiran PK-23, capaian angka kebutuhan ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum terpenuhi (*unmet need*) di DIY tahun 2023 sebesar 14,20%, angka tersebut masih diatas rata-rata nasional (11,5%).
- b. Berdasarkan data Pemutakhiran PK-23 capaian TFR DIY sebesar 1,81, merupakan capaian terendah secara nasional. DIY telah berhasil melampaui capaian TFR nasional sebesar 2,14; hal ini dapat menjadi ancaman bagi keadaan penduduk tumbuh seimbang. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana upaya untuk menjaga TFR pada kisaran ideal tanpa membiarkan angka TFR ini turun terlalu rendah. TFR yang terlalu rendah dapat mengakibatkan *point of no return*, dimana TFR akan sangat sulit untuk dinaikkan kembali sehingga proporsi penduduk di masa depan akan didominasi oleh lansia dan pralansia, serta kekurangan generasi muda dan usia produktif.
- c. Prevalensi balita *stunted* (tinggi badan menurut umur) di DIY sebesar 16,4 menduduki urutan kelima provinsi dengan angka *stunted* terendah setelah provinsi Bali, DKI Jakarta, Lampung dan Kepulauan Riau (SSGI 2022).
- d. Era digitalisasi menuntut inovasi terutama dalam pencatatan dan pelaporan agar proses RR (*Reporting Recording*) dapat dilakukan

secara cepat, sehingga informasi program bangga kencana mudah masih mengalami keterbatasan.

E.2 PELUANG

Peluang yang dimiliki Perwakilan BKKBN DIY dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di DIY antara lain:

- a. Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, BKKBN menyiapkan hasil pendataan keluarga untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk penurunan stunting.
- b. Adanya Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi landasan komitmen sinergi dalam mewujudkan ketahanan keluarga di DIY.
- c. Surat Edaran Gubernur Nomor: 11/SE/VII/2022 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KB PP) di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai regulasi dari Pemerintah Daerah DIY untuk mendukung tercapainya peningkatan pelayanan KB PP di seluruh Faskes di DIY dan m-CPR.
- d. Ketersediaan Penyuluh KB, kelompok kegiatan dan tenaga lini lapangan yang mampu bertugas kolaboratif dengan melakukan adaptasi sesuai protokol kesehatan. Rasio PKB dengan jumlah desa di DIY yaitu 1 : 2 desa, termasuk dalam kategori ideal.
- e. Adanya dukungan mitra kerja dan komitmen lintas sektor (pemerintah daerah, swasta, lembaga non pemerintah, masyarakat) dalam mensukseskan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
- f. Adanya alokasi jenis baru berupa Implan 1 Batang dan Minipil/ *Progestine Only Pil* yang dapat menjadi alternatif Pelayanan KB Pascapersalinan.
- g. Tersedianya Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Non-Fisik (Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana/BOKB) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
- h. Pelaksanaan PPK-23 dan verval KRS 100% menggunakan smartphone sehingga waktu pelaksanaan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- i. Adanya komitmen yang kuat dari OPD KB Kabupaten/kota untuk mendukung program bangga kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

F. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk yang harus mendapat perhatian khusus adalah:

a. *Total Fertility Rate* (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) di DIY telah berada pada nilai TFR ideal sejak tahun 1991 (2,04) dan kondisi ini bertahan sampai sekarang di tahun 2023 (1,81). Dari data tersebut tampak adanya trend penurunan angka TFR di DIY. Jika hal ini terus dibiarkan, maka di masa depan TFR di DIY akan semakin turun di bawah angka ideal (<1.80), padahal kondisi DIY telah melewati bonus demografi. Hal tersebut akan memengaruhi laju pertumbuhan penduduk yang sudah rendah, piramida penduduk dengan proporsi besar di usia tua yang akan membawa DIY mengalami *aged population*, dan angkatan kerja yang rendah sehingga produktivitas kerja di DIY rendah.

b. Jumlah Penduduk Usia Lanjut

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan persentase penduduk lansia paling tinggi di Indonesia pada 2023, yakni 16,02%. Penambahan penduduk lansia di DIY juga diikuti usia harapan hidup yang tinggi yaitu mencapai 75,18 tahun atau tertinggi secara nasional.

Dengan jumlah penduduk lansia ini maka harus ada program pemerintah yang mendukung para lansia menjadi lansia yang mandiri dan tangguh sehingga para lansia tidak menjadi beban pembangunan, tetapi bisa menjadi salah satu nilai tambah atau potensi bagi pembangunan di DIY.

Pemerintah DIY diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang ramah lansia sehingga para lansia tetap dapat melakukan aktivitas dengan baik. Sedangkan untuk program kegiatan yang memfokuskan kepada lansia dapat dilakukan dengan kolaborasi antar instansi sehingga tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

c. Stunting

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing. Prevalensi stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 0,9%, menjadi 16,4% dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 17,3%. Upaya strategis dan kolaboratif diperlukan untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024.

Pemerintah Indonesia menargetkan prevalensi Stunting sebesar 14% di tahun 2024 yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Saat ini, sebesar 24,4% atau sekitar 6 juta balita Indonesia mengalami Stunting (SSGI, 2022). Artinya dalam 2 tahun ke depan secara nasional prevalensi stunting harus diturunkan sebesar 10,4%, sedangkan di DIY di tahun 2024 prevalensi stunting yang harus diturunkan sebesar 2,4%.

d. i bangga

Indeks Pembangunan keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data PK2023, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada nilai 64,12, dengan rincian nilai untuk dimensi ketentraman 64,67, dimensi kemandirian 56,41 dan dimensi kebahagiaan 71,27. Pencapaian iBangga ini melebihi nilai iBangga Nasional yaitu 61,43. Meskipun Nilai iBangga DIY berada pada peringkat ke-5 tertinggi Nasional, namun capaian tersebut masih dibawah target yang diberikan yaitu sebesar 67,66. Untuk itu diperlukan upaya komperhensif dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta.

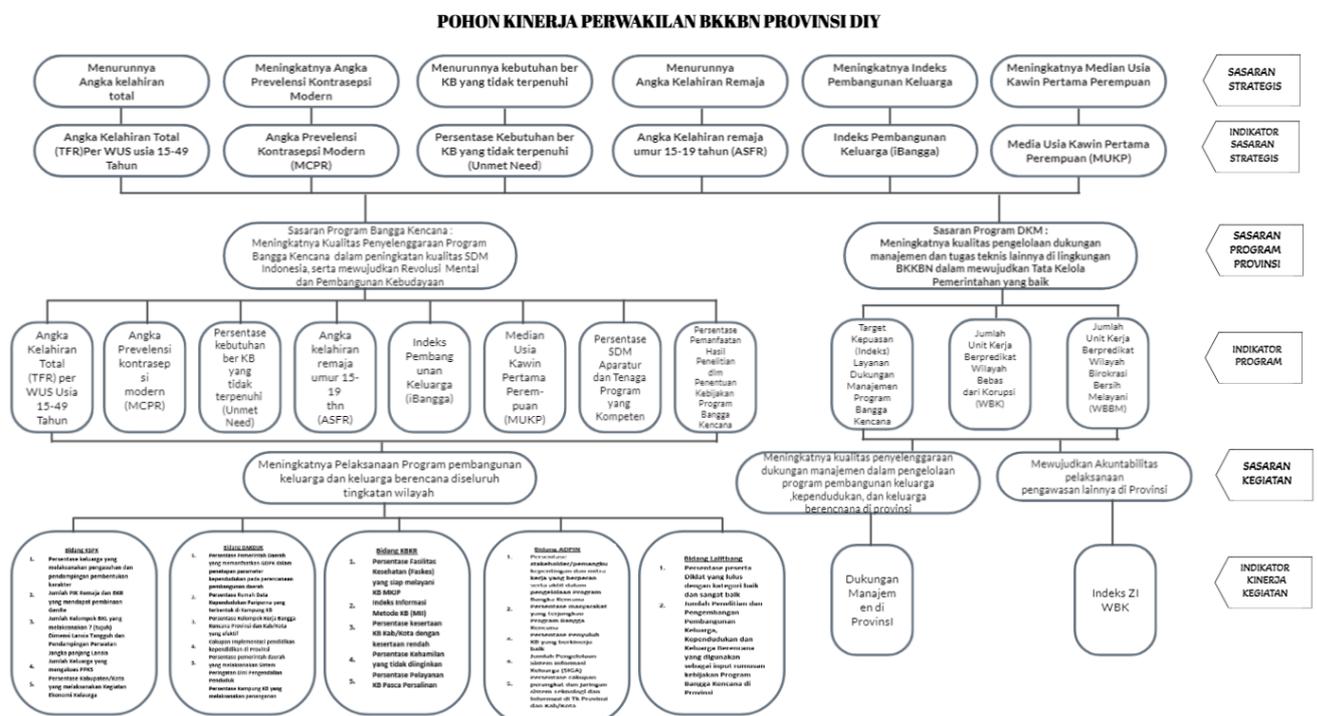
BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

A.1. Pohon Kinerja Unit Kerja

Pohon kinerja Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta sesuai Renstra 2020-2024 sebagai berikut (terdapat di lampiran juga) :

Gambar 2.1 Pohon Kinerja Perwakilan BKKBN DIY



A.2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator

Visi BKKBN adalah **“terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong.”** Visi BKKBN mengandung pengertian :

- Keluarga berkualitas, yaitu tentram, mandiri dan bahagia. Untuk mencapai keluarga berkualitas angka kelahiran total (TFR) diturunkan menjadi 2,26 pada tahun 2020 sampai dengan 2,1 pada tahun 2024.

- b. Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi. Pengendalian penduduk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
- c. Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB KR) yang komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang merupakan salah satu upaya pokok dalam menurunkan TFR. Bidang KB KR meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.
- d. Pembangunan keluarga yang holistic integratif sesuai siklus hidup sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

BKKBN mempunyai misi untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu :

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang
- b. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif
- c. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup
- d. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global
- e. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi
- f. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur

Tujuan BKKBN dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yaitu :

- a. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia
- b. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Sasaran strategis tahun 2020-2024 Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)
2. Meningkatnya angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*)
4. Menurunnya Angka Kelahiran remaja
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)

Sasaran Program Tahun 2020-2024 Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1. Terwujudnya sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengendalian penduduk
2. Meningkatnya kesertaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
3. Tercapainya sasaran program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana melalui peningkatan peran serta masyarakat, penggerakan, penguatan jejaring kemitraan dan pengelolaan sistem informasi yang berkualitas
4. Meningkatnya presentase PKB/PLKB yang lulus diklat dengan kategori sangat baik
5. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana

A.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada arah kebijakan BKKBN yang tertuang dalam Renstra BKKBN 2020-2024. Lima arah kebijakan dan strategi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
- Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
 - Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
 - Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
 - Peningkatan kemandirian ekonomi bagi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB mandiri di wilayah Kampung KB.
 - Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
 - Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia
 - Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
- b. Memperkuat pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
- Pengembangan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK).
 - Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
 - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
 - Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
- Penguatan kapasitas akses dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
 - Penguatan kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan KBKR.
 - Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.

- Peningkatan KB pria.
 - Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD), dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
 - Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
- d. Meningkatkan advokasi dan penggerakan Program Bangga Kencana sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
- Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 - Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub-PPKBD.
- e. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
- Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan wilayah.
 - Pengembangan *smart technology/smart program* untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Agar operasionalisasi Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, perlu mendapatkan dukungan dari :

- a. Aspek Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Program Bangga Kencana Bidang Pelatihan dan Pengembangan bertugas untuk meningkatkan kualitas SDM, memanfaatkan hasil penelitian, dan pengembangan inovasi, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
- Peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi.
 - Peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan inovasi Program Bangga Kencana sebagai input/masukan bagi rumusan kebijakan.
- b. Aspek Dukungan Manajemen

Sekretariat memberikan dukungan manajemen terhadap Program Bangga Kencana melalui strategi:

- Sosialisasi landasan hukum kependudukan dan KB, serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana.
- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN.
- Penguatan perencanaan program dan anggaran.
- Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur.
- Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan yang berkualitas.

c. Aspek Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui strategi:

- Pembinaan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, ekonomis, efektif, dan efisien.
- Pembinaan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) secara efektif dan efisien di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Monitoring terhadap kebijakan Kepala BKKBN dan Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta agar dilaksanakan secara konsisten.
- Pemantauan pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta secara efektif dan efisien.

B. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahunan pada tahun 2023

B.1. Dukungan Unit Kerja Terhadap Program Bangga Kencana BKKBN pada tahun 2023

Program prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Program Prioritas Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2023		
22	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi			
	Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	45.656	Keluarga
	2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	304 161	PIK Remaja BKR
	3	Jumlah kelompok BKL yang melaksanakan 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia	143	Kelompok BKL
	4	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	942	Keluarga
	5	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	90	Persen
	Bidang Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	1 Prov 5 Kab/Kota	Pemerintah daerah
	2	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	72	Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB
	3	Persentase Kelompok Kerja Bangsa Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 Prov 2 Kab/Kota	Pemda Provinsi Kab/Kota
	4	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3	Jalur (formal, nonformal dan informal)
	5	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1 Prov 2 Kab/Kota	Pemerintah Daerah
	6	Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	158,0	Kampung KB
	Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	78,47	Persen
	2	Indeks informasi metode KB (<i>Method Information Index/ MII</i>)	76,5	Indeks
	3	Persentase kesertaan KB di kabupaten/kota dengan kesertaan rendah	57,33	Persen peserta KB
	4	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	22,8	Persen

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET 2023	
	5	Persentase pelayanan KB pascapersalinan	27,4	Persen
	Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Persentase <i>stakeholders/</i> pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	41,8	<i>stakeholders/</i> mitra
	2	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	70	Persen
	3	Persentase penyuluh KB yang berkinerja baik	80,0	Persen
	4	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	5	Kab/Kota
	5	Persentase cakupan perangkat dan jaringan system Teknologi dan Informasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	100	Persen Wilayah Prov dan kab/kota
	Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Persentase peserta diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	75	Persen
	2	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan kebijakan Program Bangga Kencana di provinsi	1	Laporan
31	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi			
	Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Dukungan manajemen di provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan/002)	12	Bulan
	Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Indeks ZI WBK	82,0	Indeks

B.2. Rencana Kerja Tahunan Pada Tahun 2023

Rencana Kerja Tahunan Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2023 sesuai dengan Renstra Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Kerja Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET 2023	
22	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, kependudukan , dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi			
	Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan pengasuhan dalam rangka pembentukan karakter anak	4	Kab/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2023	
2	Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000 HPK	51.768	Keluarga
3	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	4	Kab/Kota
4	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang melaksanakan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu	304 161	PIK Remaja BKR
5	Kabupaten/kota yang mendapat pembinaan dalam pelaksanaan Bina Keluarga Lansia (BKL)	4	Kab/Kota
6	PPKS yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi ketahanan keluarga rentan	1	PPKS
7	Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga	4	Kab/Kota
Bidang Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	Cakupan pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	1 5	Prov Kab/kota
2	Cakupan koordinasi integrasi indikator program Bangga Kencana dalam kebijakan pembangunan daerah	1 5	Prov Kab/kota
3	Cakupan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk dan diregistrasi	91	Persen Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah diregistrasi
4	Cakupan fasilitasi pengembangan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	86	Persen Rumah Data Kependudukan di Kampung KB
5	Cakupan fasilitasi penggerakan kelompok kerja Bangga Kencana Provinsi dan kab/kota	1	Prov
6	Jumlah fasilitasi ke pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pengimplementasian kerjasama pendidikan kependudukan melalui 3 jalur pendidikan yaitu formal, nonformal dan informal	1 5	Prov Kab/kota
7	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	1 2	Prov Kab/kota
8	Presentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB bersama mitra kerja	1 4	Prov Kab/kota

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2023	
9	Presentase mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB bersama mitra kerja	13	Presentase Mitra Kerja
Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	Persentase Rumah sakit yang pelayanan KB nya meningkat	40	Persen
2	Jumlah Tenaga Pelayanan mendapatkan fasilitasi kompetensi (Kumulatif)	281	Tenaga kesehatan (kumulatif)
3	Peningkatan Jumlah Provider Vasektomi yang kompeten	6	Provider
4	Jumlah Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di wilayah dan sasaran khusus	5	Gerak
5	Persentase PUS dengan kehamilan resiko tinggi (4 terlalu)	45,60	Persen
6	Jumlah kab/kota dengan PKB/PLKB yang puskesmas di wilayahnya melayani KB pascapersalinan	4	Kab/kota
7	Persentase Faskes teregister yang mendapatkan ketersediaan Alokasi MKJP	85,41	Persen
Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	MoU/PKS yang ditindaklanjuti unit kerja di BKKBN	34	MoU/PKS (kumulatif)
2	Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kab/Kota yang berbentuk Dinas Utuh	43	Dinas utuh (non kumulatif)
3	Penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi, sasaran dan wilayah	3	Kab/Kota
4	Penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan <i>unmet need</i>	4	Kab/kota
5	Jumlah pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangga Kencana	4	Frekuensi
6	Presentase Tim Advokasi Terpadu Lintas Sektor Program Bangga Kencana yang melakukan advokasi	60% Tim Advokasi Provinsi dan Kab/Kota (3 Tim dari 6 Provinsi & kab/kota)	Persen
7	Frekuensi pembinaan Kinerja Penyuluh KB dalam pelaksanaan tupoksi dalam mengelola Program Bangga Kencana di Wilayah Binaan	12	Frekuensi kegiatan
8	Cakupan pembinaan IMP dan mekanisme operasional lini lapangan dalam penguatan pelayanan Program Bangga Kencana bagi masyarakat	5	Kab/kota

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET 2023
	9	Penyuluh KB/PLKB yang melakukan pembinaan kesertaan ber-KB dalam upaya menurunkan DO	75 Persen
	10	Cakupan pengelolaan data dan informasi Program Bangsa Kencana	5 Kab/Kota
	11	Cakupan kualitas Layanan Jaringan STIK dan penyebarluasan informasi	5 Kab/Kota
	Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi		
	1	Jumlah Tenaga Program yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan	253 Orang
	2	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Program Bangsa Kencana yang dilaksanakan	3 Dokumen
	3	Jumlah pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi	1 Orang
	4	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana pada jurnal nasional	1 Laporan
	5	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana pada jurnal internasional	1 Laporan
31	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi		
	Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi		
	1	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Ortala)	12 Bulan
	2	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100 Persen
	3	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	100 Persen
	Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi		
	1	Temuan eksternal dan internal yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan 'selesai'	100% TDP Temuan yang ditindaklanjuti dan dinyatakan "selesai" 85% TPS

C. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahun 2024

C.1 Dukungan Unit Kerja Terhadap Program Bangsa Kencana BKKBN pada tahun 2024

Program prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2024 sesuai dengan Renstra Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Program Prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		
22	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi			
	Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan Pendampingan pembentukan karakter	46.256	Keluarga
	2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	316 172	PIK Remaja BKR
	3	Jumlah kelompok BKI yang melaksanakan 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia	143	Kelompok BKL
	4	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	959	Keluarga
	5	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	100	Persen
	Bidang Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	1 Prov 5 Kab/Kota	Pemerintah Daerah
	2	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	77	Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB
	3	Persentase Kelompok Kerja Bangga Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 Prov 2 Kab/Kota	Pemda Provinsi Kab/Kota
	4	Cakupan implementasi Pendidikan kependudukan di provinsi	3	Jalur (formal, nonformal dan Informal
	5	Persentase pemerintah daerah yang Melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1 Prov 3 Kab/Kota	Pemerintah Daerah
	6	Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	159,0	Kampung KB
	Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	78,47	Persen
	2		76,5	Indeks

	Indeks informasi metode KB (<i>Method Information Index/ MII</i>)		
3	Persentase kesertaan KB di kabupaten/kota dengan kesertaan rendah	57,33	Persen peserta KB
4	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	22,8	Persen
5	Persentase pelayanan KB pascapersalinan	27,4	Persen
Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	Persentase <i>stakeholders/</i> pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	41,8	<i>stakeholders/</i> Mitra
2	Persentase Masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	70	Persen
3	Persentase penyuluh KB yang berkinerja baik	80,0	Persen
4	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi		Kab/Kota
5	Keluarga (SIGA) Persentase cakupan perangkat dan jaringan system Teknologi dan Informasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	100	Persen Wilayah Prov dan kab/kota
Bidang LATBANG Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	Persentase peserta diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	75	Persen
2	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan kebijakan Program Bangga Kencana di provinsi	1	Laporan
31	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi		
	Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi		
1	Dukungan manajemen di provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan/002)	12	Bulan
	Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi		
1	Indeks ZI WBK	82,0	Indeks

C.2 Rencana Kerja Tahunan 2024

Rencana Kerja Tahun 2024 Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta sesuai Renstra Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rencana Kerja Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		
22	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, kependudukan , dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi			
	Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan pengasuhan dalam rangka pembentukan karakter anak	4	Kab/Kota
	2	Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000 HPK	51.768	Keluarga
	3	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	4	Kab/Kota
	4	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang melaksanakan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu	304 161	PIK Remaja BKR
	5	Kabupaten/kota yang mendapat pembinaan dalam pelaksanaan Bina Keluarga Lansia (BKL)	4	Kab/Kota
	6	PPKS yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi ketahanan keluarga rentan	1	PPKS
	7	Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga	4	Kab/Kota
Bidang Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi				
1	Cakupan pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	1 5	Prov Kab/kota	
2	Cakupan koordinasi integrasi indikator program Bangga Kencana dalam kebijakan pembangunan daerah	1 5	Prov Kab/kota	
3	Cakupan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk dan diregistrasi	91	Persen Data Kependuduka Kampung KB yang	
4	Cakupan fasilitasi pengembangan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	86	Persen Data Kependuduka Kampung KB	
5	Cakupan fasilitasi pergerakan kelompok kerja Bangga Kencana Provinsi dan kab/kota	1	Prov	
6	Jumlah fasilitasi ke pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pengimplementasian kerjasama pendidikan kependudukan melalui 3 jalur pendidikan yaitu formal, nonformal dan informal	1 5	Prov Kab/kota	

7	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	1 2	Prov Kab/kota
8	Presentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB bersama mitra kerja	1 4	Prov Kab/kota
9	Presentase mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB bersama	13	Presentase Mitra Kerja
Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	Persentase Rumah sakit yang pelayanannya meningkat	40	Persen
2	Jumlah Tenaga Pelayanan mendapatkan fasilitasi kompetensi (Kumulatif)	281	Tenaga Kesehatan (kumulatif)
3	Peningkatan Jumlah Provider Vasektomi yang kompeten	6	Provider
4	Jumlah Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di wilayah dan sasaran khusus	5	Gerak
5	Persentase PUS dengan kehamilan resiko tinggi (4 terlalu)	45,60	Persen
6	Jumlah kab/kota dengan PKB/PLKB yang puskesmas di wilayahnya melayani KB pascapersalinan	4	Kab/kota
7	Persentase Faskes teregister yang mendapatkan ketersediaan Alokasi MKJP	85,41	Persen
Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	MoU/PKS yang ditindaklanjuti unit kerja di BKKBN	34	MoU/PKS (kumulatif)
2	Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kab/Kota yang berbentuk Dinas Utuh	43	Dinas (non)
3	Penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi, sasaran dan wilayah	3	Kab/Kota
4	Penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan <i>unmet need</i>	4	Kab/kota
5	Jumlah pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangga Kencana	4	Frekuensi
6	Presentase Tim Advokasi Terpadu Lintas Sektor Program Bangga Kencana yang melakukan advokasi	60% Tim Advokasi Provinsi dan Kab/Kota (3 Tim dari 6 Provinsi & kab/kota)	Persen
7	Frekuensi pembinaan Kinerja Penyuluh KB dalam pelaksanaan tupoksi dalam mengelola Program Bangga Kencana di Wilayah Binaan	12	Frekuensi kegiatan

8	Cakupan pembinaan IMP dan mekanisme operasional lini lapangan dalam penguatan pelayanan Program Bangga Kencana bagi Masyarakat	5	Kab/kota
9	Penyuluh KB/PLKB yang melakukan pembinaan kesertaan ber-KB dalam upaya menurunkan DO	75	Persen
10	Cakupan pengelolaan data dan informasi Program Bangga Kencana	5	Kab/Kota
11	Cakupan kualitas Layanan Jaringan STIK dan penyebarluasan informasi	5	Kab/Kota
Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	Jumlah Tenaga Program yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan	253	Orang
2	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana yang dilaksanakan	3	Dokumen
3	Jumlah pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi	1	Orang
4	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana pada jurnal nasional	1	Laporan
5	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana pada jurnal internasional	1	Laporan
31	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi		
Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Ortala)	12	Bulan
2	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100	Persen
3	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	100	Persen
Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	Temuan eksternal dan internal yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan 'selesai'	100% TDP 85% TPS	Temuan yang ditindaklanjuti dan dinyatakan "selesai"

D. Perjanjian Kinerja

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan

dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja akan digunakan pimpinan BKKBN untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, sebagai dasar melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah, dan menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Kepala BKKBN No 315/KEP/B1/2023 tentang Perjanjian Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2024.

Perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 memuat sasaran kinerja, indikator kinerja dan target indikator kinerja dengan rincian yang dapat dilihat pada link : <https://ppid.bkkbndiy.id/indikator-dan-sasaran-kinerja/> Perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) lampiran :

- lampiran 1 yang memuat sasaran kinerja indikator kinerja dan target indikator kinerja sesuai dengan IKU dan IKK Perwakilan BKKBN DIY
- lampiran 2 yang memuat sasaran kinerja indikator kinerja dan target indikator kinerja sesuai dengan Program Proyek Prioritas Nasional dan Struktur Program dan Anggaran Perwakilan BKKBN DIY
- lampiran 3 yang memuat sasaran kinerja, indikator kinerja dan target indikator kinerja sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Tahun 2023 ada penyesuaian anggaran karena kebijakan nasional sehingga Perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 mengalami revisi pada besaran anggaran yang digunakan untuk pencapaian sasaran kinerja, indikator kinerja dan target indikator kinerja.

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

REVISI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,89 Rata-rata anak per Wanita
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	56,01%
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	19,55%
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	13 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67,66 (Skala 0-100)
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	23 Tahun
7	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah	1	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	45.656 Keluarga
		2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	304 PIK Remaja & 161 BKR
		3	Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	143 Kelompok BKL
		4	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	942 Keluarga
		5	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	90%
		6	Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	1 Prov & 5 Kab/Kota
		7	Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	72 Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB
		8	Jumlah Kelompok Kerja Bangga, Kencana, Berencana, dan	1 Prov & 5 Kab/Kota

E. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Program

E.1. Rapat Koordinasi Lingkup Unit Kerja

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Bangga Kencana di Daerah Istimewa Yogyakarta, Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin.

Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja melalui :

a. RADALGRAM (Rapat Pengendalian Program)

Kegiatan Rapat Pengendalian Program dilaksanakan setiap bulan sekali dengan penyesuaian bentuk kegiatan setelah pandemi covid-19. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program dilaksanakan dengan tatap

muka dan virtual meeting yang dilakukan secara bergiliran di kabupaten kota dengan dukungan anggaran OPD KB kabupaten kota, serta dilaksanakan di kantor Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta. Peserta kegiatan Rapat Pengendalian Program adalah seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta, perwakilan dari OPD KB kabupaten kota dan juga perwakilan dari PKB/PLKB.

Pada kegiatan rapat pengendalian program disampaikan hasil pelaksanaan kinerja, baik tentang capaian program maupun pelaksanaan DAK Sub Bidang KB. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan yaitu Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan (Dallap), Pelayanan KB (Yan KB) serta aplikasi Morena untuk DAK Sub Bidang KB.

Melalui kegiatan rapat pengendalian program ini diketahui perkembangan capaian kinerja masing-masing kabupaten/kota sehingga diketahui hambatan yang dialami di setiap wilayah untuk kemudian dapat menyusun upaya atau langkah strategis yang harus dilakukan agar dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Sebelum dilaksanakan rapat pengendalian program dan anggaran yang melibatkan OPD KB, rapat pengendalian program dan anggaran secara internal yang melibatkan seluruh tim kerja yang membahas program dan realisasi anggaran, permasalahan dan strategi pencapaian target program bangga kencana bulan berikutnya. Untuk laporan keuangan menggunakan data dari OMSPAN dan F/V/KB untuk persediaan alat kontrasepsi.

b. RAKORDA (Rapat Koordinasi Daerah)

Rapat Koordinasi Daerah diadakan dalam rangka mengevaluasi pencapaian kinerja dan pelaksanaan program secara tahunan serta penguatan komitmen mitra kerja. Rapat ini melibatkan seluruh mitra kerja/stakeholder baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya forum ini dapat mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

terutama dalam penyusunan sasaran dan strategi untuk mencapai target program.

Selain itu juga dapat menjalin sinergitas komitmen, dukungan dan kerjasama antara BKKBN, pemerintah daerah dan mitra kerja di semua tingkatan wilayah sehingga manfaat program dapat dirasakan oleh mitra kerja dan masyarakat di seluruh tingkatan wilayah.

c. Review / Telaah Program Bangga Kencana

Review / Telaah merupakan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan setiap semester. Forum ini melibatkan seluruh mitra kerja Perwakilan BKKBN DIY baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam pertemuan ini diketahui perkembangan capaian kinerja sampai dengan semester I dan juga faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat kinerja tersebut. Dalam forum ini selain evaluasi capaian Program juga untuk menggalang komitmen dari pelaksana Program KKBPK dan mitra kerja berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja/ capaian Program sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

E.2. Evaluasi RAPK

Pada kegiatan Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta yang mendukung pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis program Bangga Kencana terdapat target kinerja bulanan yang disusun untuk mengontrol pencapaian target kinerja dalam satu tahun. Dengan penetapan target bulanan maka Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta dapat membuat strategi pelaksanaan program supaya apa yang menjadi target kinerja dapat tercapai. Monitoring bulanan perlu dilakukan supaya apabila terdapat permasalahan atau kendala di tengah jalan maka segera bisa dicarikan pemecahan masalahnya. Monitoring dan evaluasi tersebut dapat dilihat di <https://ppid.bkkbndiy.id/indikator-dan-sasaran-kinerja/>

E.3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program Bangga Kencana Melalui e-Monev Bappenas dan SMART Kementerian Keuangan

e-monev adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Bappenas. Aplikasi ini mempermudah pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil capaian dari kegiatan Program Bangga Kencana yang telah dilakukan. Output/capaian diinput ke aplikasi ini sebulan sekali. Melalui aplikasi ini, Bappenas juga dapat ikut memantau pencapaian Program Bangga Kencana terutama kegiatan proyek Pro PN. Hal ini diperlukan agar Bappenas dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan proyek Pro PN dan juga mengambil langkah-langkah apabila terjadi keterlambatan/kendala. SMART adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. SMART dibangun sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Melalui aplikasi ini, Kementerian Keuangan dapat ikut memantau apakah anggaran yang telah dialokasikan dan dibelanjakan oleh Perwakilan BKKBN DIY mampu menghasilkan output dan income yang telah ditargetkan. Hal ini diperlukan agar Kementerian Keuangan dapat mengukur, menilai, dan menganalisa kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA BKKBN

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi / pencapaian dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pada bab ini akan dibahas hambatan atau kendala dan upaya yang dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja 2022.

Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian. Penghitungan indeks capaian perlu memperhitungkan skala pengukuran kinerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan melalui Surat Sekretaris Utama omor 458/RC.06/B1/2019 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja

No	Nilai Capaian (Persen)	Skala Pengukuran	Status Capaian
1	≥ 90	Sangat Baik	Hijau 
2	80 – 89	Baik	Biru 
3	70 – 79	Cukup	Kuning 
4	< 70	Kurang	Merah 

A.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PERSENT ASE CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,89	1,81	104,23%	PK23 ADJ SUSENAS 2023

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PERSentase CAPAIAN	SUMBER DATA
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	56,01	58,20	103,91%	Pemutakhiran PK-23
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need)	19,55	14,20	127,37%	Pemutakhiran PK-23
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	13	6,70	148,46%	PK23 ADJ SUSENAS 2023
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67,66	64,12	94,77%	Pemutakhiran PK-23
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun	23	23,50	102,17%	Pemutakhiran PK-23
7	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di seluruh tingkatan wilayah	1	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	45.656	45.656	100,00%	KKA
		2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	304 & 161	304 & 161	100,00%	SIGA
		3	Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan	143	143	100,00%	SMART / SAKTI

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PERSENT ASE CAPAIAN	SUMBER DATA
			Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia				
		4	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	942	3.985	423,04%	SIGA
		5	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	90,00	90,00	100,00%	SIGA
		6	Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	1 Prov & 5 Kab/ Kota	1 Prov & 5 Kab/Kota	100,00%	SIGA
		7	Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	72	72	100,00%	Website Kampung KB Online
		8	Jumlah Kelompok Kerja Bangsa Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 Prov & 2 Kab/ Kota	1 Prov & 5 Kab/Kota	200,00%	SIGA
		9	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3	3	100,00%	SIGA
		10	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1 Prov & 2 Kab/ Kota	1 Prov & 5 Kab/Kota	200,00%	SIGA

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
		11	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	158	340	215,19%	Website Kampung KB Online
		12	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	78,47	80,68	102,82%	SIGA
		13	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	76,52	55,53	72,57%	SIGA
		14	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	57,33	63,33	110,47%	SIGA
		15	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	22,80	11,09	151,36%	SIGA
		16	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	27,40	48,08	175,47%	SIGA
		17	Jumlah stakeholders/pe mangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	23	23,00	100,00%	SIGA
		18	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	70,00	70,00	100,00%	SIGA
		19	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	80,00	80,00	100,00%	SIGA

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
		20	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	5	5	100,00%	SIGA
		21	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota	100,00	100,00	100,00%	e-Monev
		22	Jumlah Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga	5	5	100,00%	e-Monev
		23	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	2	2	100,00%	e-Monev
		24	Jumlah Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	430	430	100,00%	e-Monev
		25	Jumlah Pemda yang mendapat fasilitasi pembinaan pergerakan mitra kerja dan pemangku	1	1	100,00%	e-Monev

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PERSENT ASE CAPAIAN	SUMBER DATA
			kebijakan (stakeholders) KIE dalam perubahan sikap dan perilaku masyarakat serta penyediaan data dan informasi dalam sistem informasi keluarga				
		26	Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK	56.722	56.722	100,00%	e-Monev
		27	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	465	465	100,00%	e-Monev
		28	Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	143	143	100,00%	e-Monev
		29	Jumlah Kelompok UPPKA di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	5	5	100,00%	e-Monev
		30	Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat	66	66	100,00%	e-Monev

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PERSENT ASE CAPAIAN	SUMBER DATA
			fasilitasi pembinaan				
		31	Kampung KB yang mendapat fasilitasi Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana	5	5	100,00%	e-Monev
		32	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon	430	430	100,00%	e-Monev
		33	Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting	5	5	100,00%	e-Monev
		34	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi	2	2	100,00%	e-Monev
		35	Jumlah faskes yang mendapat fasilitasi intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting	430	430	100,00%	e-Monev
		36	Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan	5	5	100,00%	e-Monev
		37	Jumlah Sistem Data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting yang berkualitas	1	1	100,00%	e-Monev

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PERSENT ASE CAPAIAN	SUMBER DATA
		38	Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan	3	3	100,00%	e-Monev
		39	Jumlah Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	6	6	100,00%	e-Monev
		40	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi TPKTPTS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota	1	1	100,00%	e-Monev
		41	Jumlah Layanan Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)	1	1	100,00%	e-Monev
8	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	1	Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	75	75	100,00%	e-Monev
		2	Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk Provinsi dan Kab/Kota	53	102	192,45%	e-Monev
		3	Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan	5.576	5.581	100,09%	e-Monev

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PERSENT ASE CAPAIAN	SUMBER DATA
			penurunan stunting				
9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi	1	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	12	12.00	100.00%	e-Monev
		2	Jumlah kegiatan penyelenggaraan sekretariat percepatan penurunan stunting provinsi	1	1.00	100.00%	e-Monev
		3	Jumlah layanan humas percepatan penurunan stunting tingkat provinsi	1	1.00	100.00%	e-Monev
		4	Jumlah Sarana dan Prasarana TIK yang diadakan	2	2	100,00%	e-Monev
		5	Jumlah sarana Internal yang diadakan	1	1	100,00%	e-Monev
		6	Jumlah kegiatan penyelenggaraan sekretariat percepatan penurunan stunting provinsi	1	1	100,00%	e-Monev
		7	Jumlah layanan humas percepatan penurunan	1	1	100,00%	e-Monev

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
			stunting tingkat provinsi				
10	Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	1	Indeks ZI WBK	82	79,43	96,87%	Laporan hasil Monev Pembangunan ZI WBK/WB BM oleh Tim Penilai Internal (TPI)
		2	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	1	1	100,00%	e-Monev
		3	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting provinsi	1	1	100,00%	e-Monev

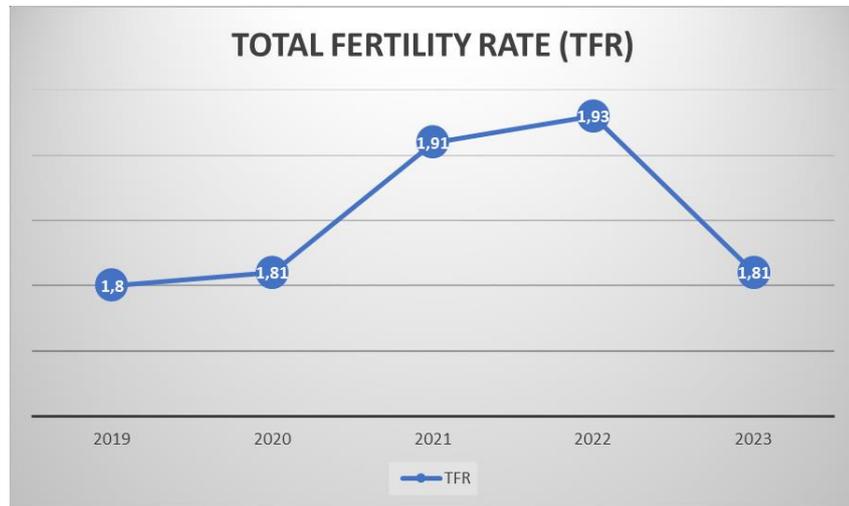
A.1.1 Angka Kelahiran Total (*total fertility rate/TFR*) per WUS (15-49 tahun)

Pada indikator Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun) di DIY tercapai sebesar 104,23% dari target TFR yang ditetapkan dalam KKP Tahun 2023 sebesar 1,89. Sesuai Data dari PK-23 ADJ Susenas Tahun 2023, angka TFR Tahun 2023 tercapai sebesar 1,81. Dengan kata lain, DIY dapat mencapai target KKP yang ditetapkan.

Menurut Buku Penentuan Nilai Ideal dan Ambang Batas Parameter Keluarga Berencana Tahun 2017, nilai ambang batas TFR yang ditoleransi adalah antara 1,8 sampai 2,2. Berdasarkan nilai ambang batas ini, DIY telah berada pada nilai TFR ideal sejak tahun 1991 (nilai TFR adalah 2,04) dan itu berjalan sampai sekarang di 2023 (nilai TFR adalah 1,81). Ini menunjukkan bahwa selama hampir 30 tahun kondisi TFR di DIY telah ideal. Hal ini menunjukkan program

BangkaKencana mampu diimplementasikan dengan baik di DIY sehingga TFR dapat dipertahankan dalam angka ideal, tetapi tetap perlu diwaspadai adanya trend kenaikan angka capaian TFR.

Gambar 3.1. Grafik Perkembangan TFR di DIY



Capaian TFR DIY ini adalah terendah secara nasional. Di satu sisi DIY telah berhasil melampaui capaian TFR nasional 2,14 di Tahun 2023 akan tetapi hal ini juga bisa menjadi ancaman bagi keadaan penduduk tumbuh seimbang. Tantangan yang ada adalah bagaimana kita dapat menjaga TFR ini pada kisaran ideal tanpa membiarkan angka TFR ini turun terlalu rendah. TFR yang terlalu rendah jika dibiarkan maka akan mencapai point of no return, dimana TFR akan sangat sulit untuk dinaikkan kembali sehingga proporsi penduduk di masa depan akan didominasi oleh lansia dan pra lansia, serta kekurangan generasi muda dan usia produktif.

Angka TFR saat ini masih dalam kondisi ideal, tetapi tetap harus diwaspadai terjadinya kenaikan kembali berdasarkan trend sebelumnya. Melihat kondisi tersebut perlu adanya upaya yang lebih untuk menjaga TFR tetap pada kondisi ideal. Diantaranya perlu mempertajam sasaran program terutama kepada PUS usia muda yang masih memiliki masa reproduksi panjang. Ke depan Perwakilan BKKBN DIY akan berkolaborasi dengan Universitas-Universitas di DIY dan Pakar-pakar kependudukan untuk mengkaji

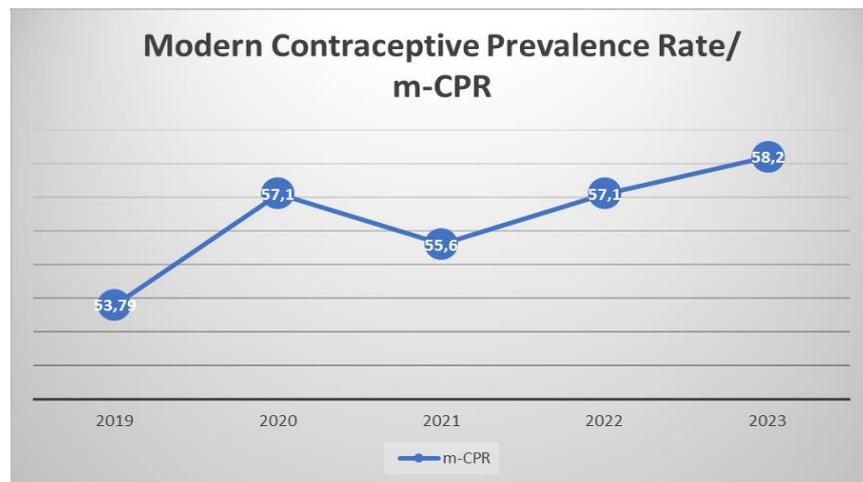
kondisi ideal parameter-parameter kependudukan di DIY khususnya TFR.

A.1.2 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (*mCPR*)

Berdasarkan data Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) 2023 Perwakilan BKKBN DIY telah mampu mencapai persentase *mCPR* sebesar 58,20% dari total PUS yang ada. Pencapaian *m-CPR* ini telah memenuhi target KKP yang ditetapkan sebesar 56,01%.

Meskipun telah mencapai KKP yang ditetapkan, angka *m-CPR* DIY tahun 2023 masih di bawah capaian nasional. Data Pemutakhiran PK-23 menyebutkan bahwa capaian *m-CPR* nasional adalah 60,4%. Hal ini menjadi tantangan bagi Perwakilan BKKBN DIY untuk menetapkan strategi yang sesuai dengan kondisi DIY.

Gambar 3.2. Grafik Perkembangan *m-CPR*



Persentase *m-CPR* di DIY sempat mengalami penurunan dari 57,1% pada tahun 2020 menjadi 55,6% pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 naik menjadi 57,1% dan 58,2%. Walaupun capaian tahun 2023 sudah mencapai KKP yang ditetapkan, namun angka tersebut masih berada di bawah capaian nasional. Peningkatan *mCPR* di DIY juga merupakan hasil dan akumulasi pencapaian KB Baru khususnya KBPP yang mampu memberikan tambahan kesertaan KB Aktif di DIY (*Additional PA*). Menyikapi hal tersebut diperlukan upaya-

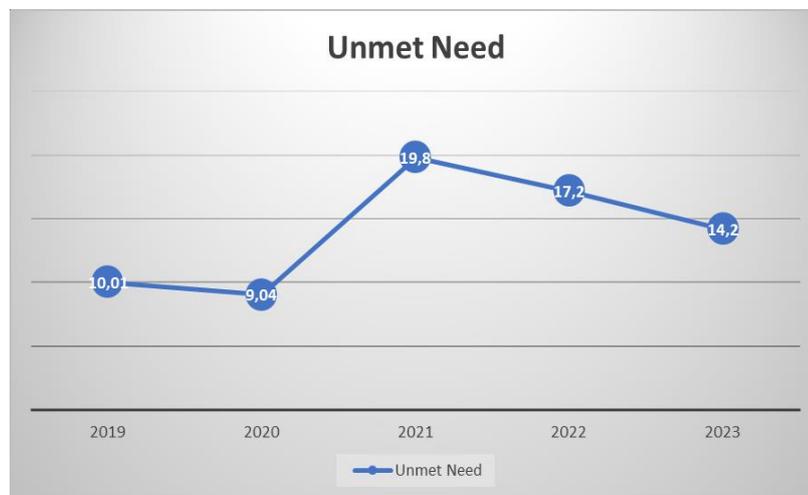
upaya yang *out of the box* untuk dapat meningkatkan persentase m-CPR ini.

Fokus kegiatan lebih diarahkan pada WUS usia muda dengan pendidikan tinggi dan perlu juga pengembangan metode KIE yang berbeda dan terfokus pada sasaran serta meningkatkan kerja sama dengan stakeholder terkait dengan implementasi kebijakan daerah tentang pelayanan KB Pascapersalinan.

A.1.3 Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*)

Pada tahun 2023 berdasarkan data Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2023, persentase *unmet need* di DIY sebesar 14,20% atau tercapai sebesar 127,37% dari KKP tahun 2023 yang ditetapkan yaitu sebesar 19,55%. Capaian *unmet need* DIY masih lebih tinggi daripada capaian *unmet need* nasional (11,5%).

Gambar 3.3. Grafik Perkembangan *Unmet Need*



Indikator persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) tampak terjadi penurunan pada tahun 2020 namun pada tahun 2021 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 10,76%. Setelah mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2021, *unmet need* di DIY menunjukkan tren penurunan dari tahun 2021 sampai 2023 yaitu sebesar 5,6%.

Fenomena unmet need KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti umur ibu, pendidikan, preferensi gender anak, pendapatan, pekerjaan, agama, pengetahuan mengenai kontrasepsi, komunikasi dengan pasangan, akses terhadap media dan tempat tinggal. Selain itu karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan juga merupakan faktor yang erat kaitannya dengan capaian unmet need KB. Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping serta komunikasi dengan pasangan. Oleh sebab itu, upaya penurunan unmet need KB harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Informasi tentang pelayanan KB yang tidak terpenuhi digunakan untuk menilai sejauh mana program KB telah dapat memenuhi kebutuhan KB di kalangan PUS yang menginginkan untuk ber KB. Apabila program dapat memenuhi kebutuhan KB, diharapkan angka prevalensi KB dapat meningkat dan kelompok unmet need KB akan semakin berkurang. Pemetaan *Unmet Need* akan dipertajam dan dijadikan sasaran prioritas penggerakan dan KIE oleh tenaga lini lapangan di wilayah.

A.1.4 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19 tahun)

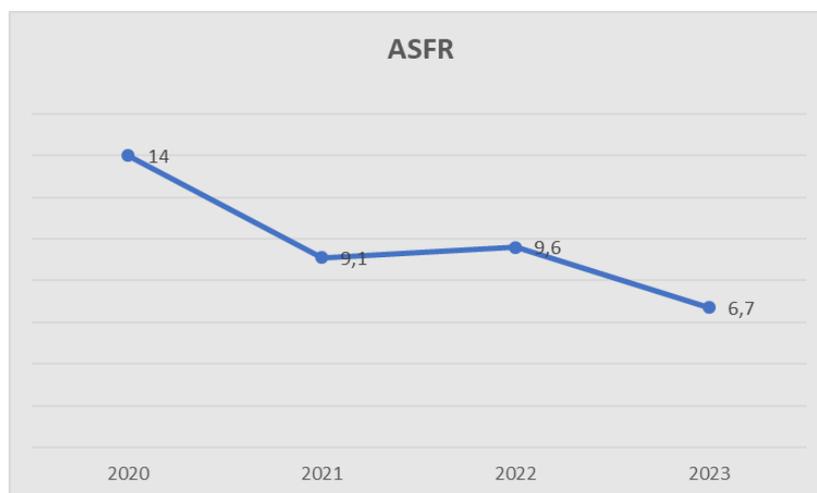
ASFR 15-19 tahun di DIY pada tahun 2023 adalah 6,7. Angka ini 6,3 poin lebih kecil dari target yang ditetapkan sebesar 13 atau tercapai sebesar 148,46%. Capaian ini merupakan capaian kedua terbaik nasional setelah DKI Jakarta (5,4). Hanya DKI Jakarta dan DIY yang berhasil mencapai *single digit* ASFR di seluruh Indonesia.

Hal tersebut menggambarkan bahwa Program Genre sudah berjalan baik di DIY sehingga dapat menekan angka kelahiran pada usia remaja. Salah satunya dengan pembinaan kelompok PIK secara berkala, baik pada jalur masyarakat maupun jalur pendidikan. ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) 15-19, atau Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun di DIY tercapai pada 6,7 kelahiran per 1000 WUS 15- 19 tahun tergolong sangat baik untuk ukuran nasional. Capaian nasional ASFR 15-19 tahun di angka 19,7, jauh di bawah capaian DIY. Program lain yang telah dilaksanakan diantaranya promosi kesehatan reproduksi

dengan sasaran remaja yaitu kegiatan Ajang Kreativitas Remaja KAWula MUda (AkuKaMu) dengan isu-isu kesehatan reproduksi yang relevan bagi remaja. Selain itu ke depannya akan dilaksanakan program promosi Kesehatan Reproduksi bagi remaja dengan resiko tinggi semisal anak / remaja yang dibina di LAPAS Anak, remaja dengan disabilitas dan remaja di rumah singgah.

Capaian ASFR DIY dari tahun 2020 sampai tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari angka 14 pada tahun 2020 menjadi 6,7 di tahun 2023.

Gambar 3.4. Grafik Capaian ASFR Tahun 2020-2023



A.1.5 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Berdasarkan data Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) 2023 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) DIY tahun 2023 adalah sebesar 64,12. Angka tersebut menunjukkan bahwa Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai 94,77% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 67,66.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan dimensi ketentraman, kebahagiaan dan kemandirian mempunyai 17 indikator, membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai lintas sektor dalam pencapaian target .

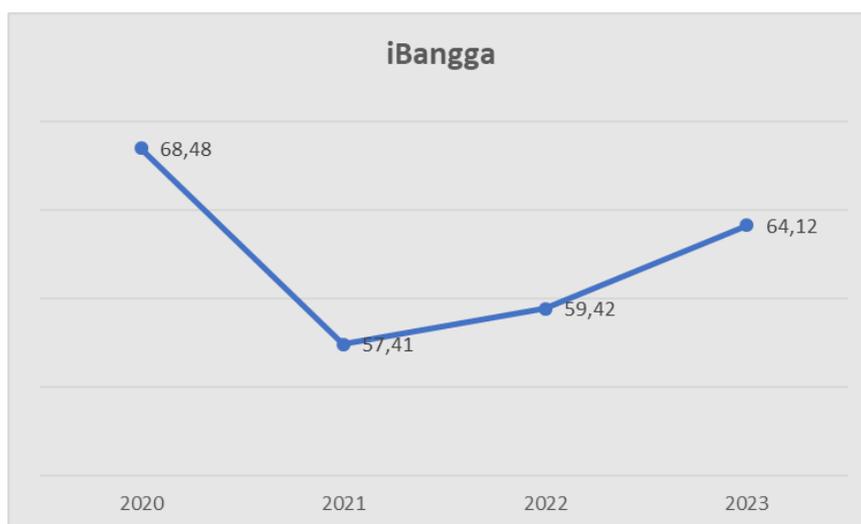
Perwakilan BKKBN DIY telah melaksanakan berbagai program dalam mendukung peningkatan iBangga antara lain, membina

kerjasama dengan mitra/ *stakeholder* terkait, sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya 8 fungsi keluarga kepada masyarakat.

Peningkatan advokasi dan KIE Program Bangga Kencana kepada lintas sektor dan masyarakat akan terus ditingkatkan demi tercapainya target dimasa yang akan datang

Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022, capaian iBangga tahun 2023 mengalami peningkatan, yaitu dari 59,42 menjadi 64,12. Apabila diperhatikan capaian iBangga mengalami penurunan ketika terjadi pandemi Covid-19, dimana interaksi tatap muka dengan orang lain sangat terbatas dan memang ada beberapa pembatasan kegiatan di masyarakat sehingga berdampak dengan capaian iBangga. Untuk capaian iBangga pada tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2020, yaitu sebesar 68,48.

Gambar 3.5. Grafik Capaian iBangga Tahun 2020-2023



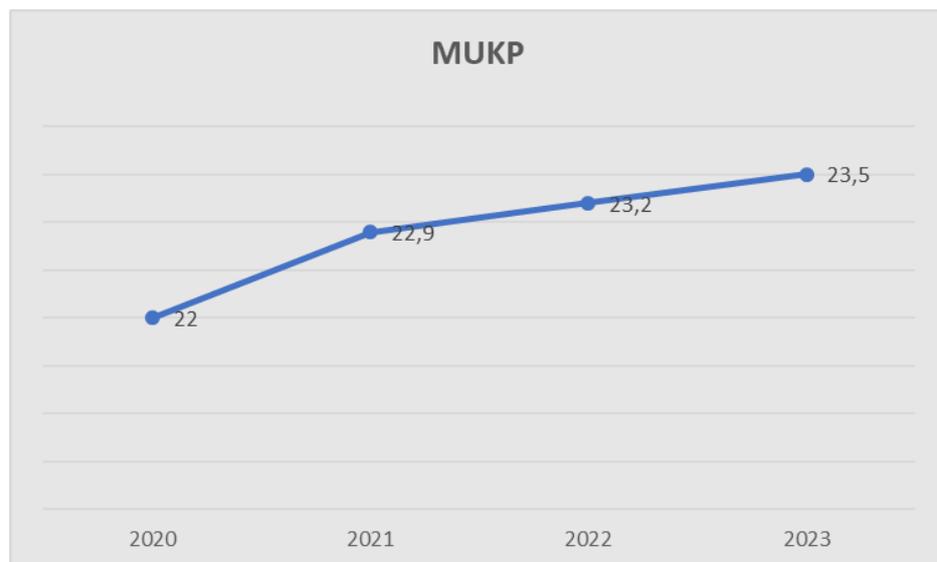
A.1.6 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)

Median usia kawin pertama DIY Tahun 2023 sebesar 23,50 yang berarti sudah dapat mencapai 102,17% dari target yang ditetapkan sebesar 23. Hal tersebut didukung oleh keberhasilan program Genre di DIY melalui kampanye Kesehatan Reproduksi Remaja bagi remaja. Meskipun demikian masih butuh penekanan

pada sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan bagi remaja di DIY.

Capaian MUKP di DIY dari tahun 2020 mempunyai trend meningkat, yang artinya median usia kawin pertama di DIY menjadi lebih tinggi dari tahun ke tahun. Untuk capaian tahun 2020 di angka 22 tahun sedangkan untuk capaian tahun 2023 menjadi 23,5 tahun.

Gambar 3.6. Grafik Capaian MUKP Tahun 2020-2023



Keberhasilan program Genre di DIY dapat dilihat dari meningkatkan capaian angka MUKP. Salah satu program GenRe dengan pembinaan kelompok PIK secara berkala, baik pada jalur masyarakat maupun jalur pendidikan. Tahun 2023 juga dilaksanakan kegiatan Ajang Kreatifitas Remaja KAwula MUda (AkuKaMu) untuk melakukan promosi kesehatan reproduksi dengan sasaran remaja. Strategi pencapaian target untuk tahun depan akan dilaksanakan program promosi Kesehatan Reproduksi bagi remaja dengan resiko tinggi semisal anak/remaja yang dibina di LAPAS Anak, remaja dengan disabilitas dan remaja di rumah singgah.

A.2 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan

A.2.1 Jumlah Keluarga yang Melaksanakan Pengasuhan dan Pendampingan

Pembentukan Karakter

Perwakilan BKKBN DIY pada tahun 2023 mendapat target 45.656 keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter. Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 45.656 keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter. Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari keluarga. Kegiatan ini didukung dengan praktek penggunaan Kartu Kembang Anak (KKA) serta sosialisasi langsung oleh PKB dan Kader Kelompok BKB di wilayah. Selain itu, Perwakilan BKKBN DIY juga bekerjasama dengan CLSD Fakultas Psikologi UGM dalam mendukung capaian program.

A.2.2 Jumlah PIK Remaja dan BKR yang Mendapat Pembinaan GenRe

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 mendapat target capaian sebanyak 465 Kelompok Pro PN, yang terdiri dari 304 PIK Remaja dan 161 BKR. Realisasi jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre pada tahun 2023 adalah 465 Kelompok yang terdiri dari 304 PIK Remaja dan 161 BKR yang berarti telah tercapai 100%.

Mengingat pentingnya menyiapkan remaja agar memiliki kesiapan dan perencanaan dalam membangun keluarga, sejak tahun 2019 kegiatan Pembinaan Ketahanan Remaja diarahkan untuk mendukung prioritas nasional yaitu Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing dan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan melalui Penguatan peran Penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapatkan pembinaan genre. Kegiatan ini terus berlangsung sampai dengan tahun 2023. Adapun pada tahun 2023 lokus pelaksanaan kegiatan diarahkan pada 32.656 Kelompok untuk 34 Provinsi yang terdiri 12.296 PIK Remaja dan 20.360 BKR.

Fasilitasi yang diberikan berupa pemberian modul “1001 Cara Bicara” untuk kelompok BKR dan modul “Tentang Kita” untuk kelompok PIK Remaja. Modul “1001 cara Bicara” berisi tentang cara-cara komunikasi efektif orangtua kepada remaja tentang kesehatan

reproduksi dan gizi bagi remaja putri. Sedangkan modul “Tentang Kita” berisi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sesuai dengan segmen usia (10-14 tahun; 15-19 tahun; 20-24 tahun). Selain itu juga dilakukan sosialisasi kepada kelompok kegiatan tentang modul tersebut. Strategi yang dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut adalah dengan memberikan workshop dan pendampingan secara intensif baik dalam bentuk luring maupun daring.

A.2.3 Jumlah Kelompok BKL yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia

Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 143 kelompok. Target 143 kelompok terbagi ke Kabupaten / Kota dengan pembagian:

- Kabupaten Kulon Progo : 27 kelompok
- Kabupaten Bantul : 27 kelompok
- Kabupaten Gunungkidul : 29 kelompok
- Kabupaten Sleman : 35 kelompok
- Kota Yogyakarta : 25 kelompok

Kelancaran kegiatan pembinaan Kelompok BKL tidak lepas dari adanya kerjasama dengan beberapa lintas sektor, termasuk Perguruan Tinggi (PT), yaitu Universitas Respati Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Kerjasama yang diwujudkan dengan PT adalah dalam bentuk kegiatan orientasi atau peningkatan kapasitas kader/ anggota kelompok BKL, antara lain Sosialisasi 7 (tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Orientasi Perawatan Jangka Panjang (PJP). Selain itu Perwakilan BKKBN DIY mengembangkan BKL melalui Sekolah Lansia agar menjadi lansia SMART (sehat, aktif, mandiri, produktif dan bermartabat).

Tahun 2023 Perwakilan BKKBN DIY telah memfasilitasi 8 (delapan) Sekolah Lansia, antara lain :

- BKL Melati, Kal. Dayakan Pengasih Kulon Progo (S3)

- BKL Manunggal Asih, Kal. Planjan, Saptosari Gunungkidul (S3)
- BKL Khusnul Khotimah, Kal. Srimartani Piyungan Bantul (S3)
- BKL Mekar Indah Kal. Ngramang, Pengasih Kulon Progo (S2)
- BKL Delima 123, Kel. Purbayan, Kotagede Yogyakarta (S2)
- BKL Mugi Waras, Kal. Sumpersari, Moyudan Sleman (S2)
- BKL Mawar, Kal. Sinduharjo, Ngaglik Sleman (S1)
- BKL Istiqomah, Kal Caturharjo Pandak Bantul (S1)

Pencapaian tersebut telah melampaui target yang telah ditentukan yaitu mencapai 200% (Target 1 Sekolah Baru, Perwakilan BKKBN DIY membuka 2 Sekolah Baru)

Perwakilan BKKBN DIY juga membuat inovasi program dengan memberikan penghargaan bagi lansia anggota BKL melalui pemilihan Duta Lansia Istimewa. Pengembangan BKL tidak hanya sebatas kegiatan rutin, akan tetapi masing-masing BKL diberikan keluasaan untuk mengembangkan inovasi sesuai dengan kearifan lokal.

Program program yang telah tercapai dan inovasi yang sudah dikembangkan akan semakin ditingkatkan dan diperluas kemanfaatannya melalui peningkatan kerjasama lintas sektor dimasa yang akan datang.

A.2.4 Jumlah Keluarga yang Mengakses PPKS

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) DIY mendapat target sebanyak 942 keluarga yang mengakses PPKS. DIY berhasil mencapai angka 3.985 keluarga yang mengakses PPKS. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target yaitu orientasi pengelola dan pelaksana PPKS di Provinsi maupun Balai Penyuluhan.

Meskipun pencapaian target sudah melebihi dari yang ditentukan, PPKS Provinsi maupun Balai Penyuluhan akan terus mengembangkan 8 (delapan) layanan keluarga kepada masyarakat termasuk merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Strategi yang dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut adalah dengan meningkatkan Advokasi dan KIE tentang PPKS kepada masyarakat serta berkolaborasi dengan stakeholder/ mitra terkait untuk mendukung 8 (delapan) fungsi dan ketahanan keluarga.

A.2.5 Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kegiatan Usaha

Ekonomi Keluarga

Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga dengan target 90%, Perwakilan BKKBN DIY berhasil mencapai angka 97,83% untuk Kabupaten/ Kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga.

Rincian capaian di 5 (lima) Kabupaten/ Kota antara lain: Kabupaten Kulon Progo 98,81 %, Kabupaten Bantul 97,28%, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 99,62 %, Kabupaten Sleman sebanyak 99,27% dan Kota Yogyakarta sebesar 91,58%.

Target diatas dicapai melalui kegiatan antara lain;

- Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga,
- Pengembangan Materi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga,
- Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi berupa Pemberian ATTG,
- Pengembangan Model Kemitraan, Permodalan, Pemasaran (Pilot Project) PEK peduli stunting.

Dalam pengembangan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Perwakilan BKKBN DIY juga menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi UKM DIY dan “Komunitas Tangan di Atas” untuk memfasilitasi pelatihan dan pegembangkan usaha serta memberikan mentoring bisnis kepada satu kelompok UPPKA Percontohan.

Strategi yang akan dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut adalah dengan meningkatkan kolaborasi berbagai lintas sektor dan memperluas sasaran bukan hanya kepada keluarga akseptor, tetapi juga kepada keluarga resiko stunting dan kelompok rentan agar ketahanan ekonomi keluarga dapat tercapai.

A.2.6 Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam

penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah

Grand Design Pembangunan Kependudukan telah disusun oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 dan telah mencakup 5 (lima) pilar. Dengan adanya perkembangan Kependudukan dan pasca covid 19 dipandang perlu untuk melaksanakan review GDPK tersebut sehingga pada tahun 2022 dilaksanakan penyusunan dokumen review GDPK. Hasil Review GDPK DIY Tahun 2023-2045 telah diluncurkan pada tahun 2023 dan dimanfaatkan sebagai acuan penyusunan RPJMD. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-DIY juga telah seluruhnya menyusun GDPK 5 (lima) pilar yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta telah melakukan review terhadap dokumen GDPK.

Strategi yang dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut adalah dengan meningkatkan advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah / Perda baik Provinsi maupun Kab/Kota untuk legalitas dari GDPK yang sudah disusun, seperti halnya yang telah dilakukan oleh Pemda Kab. Kulon Progo dan Sleman.

A.2.7 Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB

Rumah Data Kependudukan dengan klasifikasi paripurna di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 137 Rumah Dataku yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota. Untuk mencapai klasifikasi paripurna tersebut, Rumah Dataku telah memenuhi kriteria antara lain pengurusnya telah mengikuti orientasi, memiliki sarana prasarana yang memadai, menyajikan data dalam beberapa kategori yaitu kuantitas, kualitas, mobilitas, pembangunan keluarga, administrasi kependudukan dan potensi wilayah. Rumah Dataku klasifikasi paripurna juga telah dimanfaatkan datanya baik oleh pemerintah, swasta atau akademisi dalam melaksanakan kegiatan atau intervensi. Rumah Dataku paripurna yang difasilitasi di Tahun 2023 sebanyak 72 Rumah Dataku.

Strategi yang dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut adalah memberikan fasilitasi berupa orientasi untuk pengelola Rumah Data Kependudukan Paripurna sehingga Rumah DataKu tersebut dapat menjadi sumber data kependudukan dan program bangga kencana di wilayahnya serta dapat melakukan pengolahan, analisis serta penyajian data-data tersebut.

A.2.8 Persentase Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif

Kelompok kerja yang efektif merupakan indikator keterlibatan lintas sektor dalam program Bangga Kencana. Kelompok kerja bangga kencana yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Pokja Stunting, Pokja GDPK dan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas. Keefektifitasan Pokja Bangga Kencana diukur dari adanya perencanaan program kerja dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Monitoring terhadap keefektifan pokja Bangga Kencana dilaksanakan secara semesteran. Hasil monitoring terhadap pokja Bangga Kencana di DIY menunjukkan bahwa di tingkat provinsi dan 5 (lima) Kabupaten/kota telah memiliki pokja Bangga Kencana yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut adalah dengan melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektivitas Pokja yang telah terbentuk dengan mengaktifkan perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan di Pokja tersebut.

A.2.9 Cakupan Implementasi Pendidikan Kependudukan di Provinsi

Dalam implementasi Pendidikan Kependudukan, di DIY sudah mencakup tiga jalur. Untuk Jalur formal sampai dengan tahun 2023 telah terbentuk 5 Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tingkat SMA yang semuanya telah paripurna dan 64 SSK tingkat SMP. Bahkan untuk tahun 2023 terdapat 27 SSK tingkat SMP yang telah ditetapkan sebagai SSK paripurna sehingga jumlah SSK paripurna yang telah ditetapkan sebanyak 58 SSK.

Di tahun 2023 DIY juga mempunyai 15 SSK baru di tingkat SMA yang merupakan bentukan baru di tahun 2023. Untuk jalur formal lainnya, DIY mempunyai 7 Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) dan tahun 2023 terdapat satu Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan yaitu Universitas Jendral Ahmad Yani Yogyakarta yang berhasil mendapat hibah dana kedaireka tahun 2023 dalam program pencegahan stunting di Kabupaten Gunungkidul.

Sementara di jalur nonformal, terdapat 10 Saka Kencana di tingkat SMP yang telah mengimplementasikan Pendidikan kependudukan dalam kegiatan kepramukaannya. Dalam jalur informal, terdapat 105 Pojok Kependudukan Edukasi Masyarakat (PESAT) yang telah terbentuk baik di Rumah DataKu maupun di Kampung Keluarga Berkualitas.

Strategi yang dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dengan sekolah yang belum menjadi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) agar dapat memasukkan materi tentang kependudukan kedalam kurikulum yang ada sehingga bisa menjadi SSK.

A.2.10 Persentase Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk

Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu) di Daerah Istimewa Yogyakarta tercapai sebesar 200,00% dari target yang ditetapkan.

Capaian hasil pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk ini bersumber dari website Siperindu (siperindu.online). Pada tahun 2023 ini, seluruh OPD Dalduk Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY telah melaksanakan fasilitasi Siperindu tahun 2023 dan membuat rencana aksi (renaksi) Siperindu tahun 2024.

Fasilitasi Siperindu tahun 2023 memiliki 3 materi, diantaranya adalah kebijakan peringatan dini pengendalian penduduk, sosialisasi Siperindu, dan laporan renaksi. Lingkup peserta yang telah mendapatkan materi di atas adalah OPD Dalduk Provinsi, OPD Dalduk Kabupaten/Kota dan Mitra Kerja Pemerintah.

Pada renaksi Siperindu tahun 2024 akan ditambahkan materi model tindak lanjut peringatan dini pengendalian penduduk dengan tambahan lingkup peserta dari mitra kerja swasta dan mitra kerja LSM.

A.2.11 Persentase Kampung KB yang Melaksanakan Penanganan Terpadu Isu Kependudukan

Berdasarkan data website Kampung KB (kampungkb.bkkbn.go.id) tahun 2023, Kampung KB yang ada di DIY yang telah melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan mencapai 215,19% yakni sebanyak 340 Kampung KB dari target 158 Kampung KB.

Indikator jumlah Kampung KB yang telah melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan ini adalah berdasarkan jumlah Kampung KB yang telah melaksanakan kegiatan Kampung KB menurut 8 fungsi keluarga dan lintas sektor yang terlibat. Secara rinci capaian Kampung KB di DIY adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan 1-3 kegiatan = 134 Kampung KB
- b. Melaksanakan 4-6 kegiatan = 82 Kampung KB
- c. Melaksanakan 7-8 kegiatan =124 Kampung KB.

Sehingga total yang telah melaksanakan dan melaporkan kegiatan menurut penguatan 8 fungsi keluarga dan lintas sektor yang terlibat adalah 340 Kampung KB.

Sebaran Kabupaten dan Kota dari 340 Kampung KB yang disebut di atas diantaranya adalah 66 Kampung KB dari Kabupaten Kulon Progo, 62 Kampung KB dari Kabupaten Bantul, 100 Kampung KB dari Kabupaten Gunungkidul, 67 Kampung KB dari Kabupaten Sleman dan 45 Kampung KB dari Kota Yogyakarta.

A.2.12 Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang Siap Melayani KB

MKJP

DIY berhasil mencapai 102,82% dari target persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Siap Melayani KB MKJP di DIY

tahun 2023. Dari KKP yang ditetapkan yaitu sebesar 78,47%, DIY berhasil mencapai angka 80,68%. Hal ini menunjukkan DIY berhasil memenuhi 3 aspek yang dinilai dalam melihat kesiapan fasyankes untuk melayani KB MKJP yaitu adanya dokter/bidan yang siap melayani KB MKJP, kompeten, dan adanya ketersediaan alokon khususnya IUD dan Implan. Program yang telah dilakukan diantaranya pemenuhan ketersediaan Alokon di Fasyanks, pendampingan OPD KB Kabupaten/Kota dalam memenuhi sarana prasarana pelayanan KB di Fasyankes, serta koordinasi dengan organisasi profesi khususnya IBI untuk peningkatan kompetensi provider. Ke depan akan terus dilakukan pemenuhan baik alkon dan sarana prasarana dan mendorong setiap Fasyankes agar mampu melayani KB MKJP.

A.2.13 Indeks Informasi Metode KB (*Method Information Index/MII*)

DIY berhasil mencapai 72,57% dari target Indeks Informasi Metode KB (*Method Information Index/MII*) di DIY tahun 2023. Dari KKP yang ditetapkan yaitu sebesar 76,52%, DIY berhasil mencapai angka 55,53%. Walaupun DIY belum berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun DIY merupakan provinsi dengan capaian MII terbaik se-Indonesia (rata-rata capaian nasional 46,20%). MII dinilai dari PUS yang pernah/sedang menggunakan kontrasepsi mendapatkan informasi tentang alat/obat/cara KB, efek samping, dan tindakan yang perlu dilakukan jika terjadi efek samping. Untuk meningkatkan capaian MII, maka perlu penetrasi KIE yang lebih luas dan mendalam. Ke depan tenaga lini lapangan dan kader agar lebih intensif memberikan KIE kepada calon akseptor terkhusus mengenai variabel-variabel MII di atas.

Target MII dalam renstra tahun 2019-2024 yang ditetapkan untuk Nasional dan masing-masing propinsi dinilai ternyata terlalu tinggi jika dibandingkan dengan *base line*. Target tersebut sedianya akan direvisi oleh Direktorat Kualitas Pelayanan KB BKKBN. akan tetapi sudah terlanjur teruang dalam dokumen Renstra tahun 2019 - 2024 dan tidak bisa diubah kembali.

A.2.14 Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota Dengan Kesertaan

Rendah

Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan Kesertaan Rendah merupakan persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota yang capaiannya lebih rendah dari persentase kesertaan KB di Provinsi. Berdasarkan data SIGA capaian kesertaan KB di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 65,63%, sehingga Kabupaten/kota yang memiliki kesertaan KB lebih rendah dari provinsi yaitu Kabupaten Bantul dengan capaian sebesar 64,02%, Kota Yogyakarta dengan capaian sebesar 62,58% dan Kabupaten Sleman dengan capaian sebesar 61,68%. Dengan demikian, persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah yaitu sebesar 63,27%. Capaian kesertaan KB di Kabupaten/Kota Dengan Kesertaan Rendah tersebut telah melampaui target KKP yang ditetapkan sebesar 57,33%. Disamping itu, berdasarkan Pedoman Penggarapan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Wilayah Khusus, di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terdapat Kabupaten/Kota yang termasuk dalam daftar 100 kabupaten/kota se-Indonesia yang memiliki persentase kesertaan KB rendah. Hal ini disebabkan karena capaian kesertaan KB di DIY secara keseluruhan sudah melampaui target. Ke depan akan dilaksanakan kegiatan Intensifikasi Pelayanan KB di Wilayah Khusus terutama di wilayah dengan kesertaan KB rendah.

A.2.15 Persentase Kehamilan yang Tidak Diinginkan

DIY berhasil mencapai 151,36% dari target Persentase Kehamilan yang Tidak Diinginkan di DIY tahun 2023. Dari KKP yang ditetapkan yaitu sebesar 22,80%, DIY berhasil mencapai 11,9%. Diharapkan semua kehamilan merupakan kehamilan yang terencana dan dikehendaki. Untuk itu keberhasilan Program Genre dan KB menjadi kunci menekan angka KTD di DIY. Program KB yang

mendukung penurunan KTD diantaranya rendahnya ASFR 15 - 19 tahun dan meningkatnya kesertaan KB Pascapersalinan di DIY.

A.2.16 Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan

DIY berhasil mencapai 175,47% dari target persentase Pelayanan KB Pascapersalinan di DIY tahun 2023. Dari KKP yang ditetapkan yaitu sebesar 27,40%, DIY berhasil mencapai 48,08% (SIGA, 2023). Tingginya capaian KB Pascapersalinan ini mendukung upaya Program Percepatan Penurunan Stunting, Penurunan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD), dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Baiknya capaian KB Pascapersalinan di DIY tahun 2023 didukung oleh komitmen provider dan fasyankes terhadap Program KB PP, SE Gubernur DIY Nomor 11 Tahun 2022, pendampingan ibu hamil dan pascapersalinan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta adanya alokon jenis baru diantaranya Implan 1 Batang dan Minipil/ POP. Pendampingan dan penguatan komitmen dari provider dan mitra kerja akan terus dilaksanakan agar capaian KBPP ke depan semakin meningkat.

A.2.17 Persentase Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra kerja yang Berperan Serta Aktif Dalam Pengelolaan Program Bangga Kencana

Keberhasilan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting tidak terlepas dari peran serta aktif dan dukungan dari Stakeholders / Pemangku Kepentingan. Sedikitnya ada 23 stakeholders / pemangku kepentingan yang terlibat di DIY, yaitu : OPD KB Kabupaten Kota, Bappeda DIY, DP3AP2 DIY, Kementerian Agama, Sebermas, PKBI, TNI, Polri, TP PKK, BAAS, Fapsedu, IPeKB, TPK, IBI, IMP, Para Teladan Lini Lapangan, Paguyuban Juang Kencana, UGM, UNY, UAD, Stiekes Alma Ata, Duta Genre.

Capaian stakeholders/ mitra kerja sebanyak 23 ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada awal tahun 2023, yaitu sebanyak 23 stakeholders/ mitra kerja, ini artinya targetnya sudah tercapai 100%.

Strategi yang akan dilakukan untuk pencapaian target :

- melakukan advokasi kepada stakeholders dalam meningkatkan komitmen terhadap program bangga kencana dan PPS
- melibatkan mitra kerja strategis (IMP, Fapsedu, Juang Kencana) untuk mendukung program bangga kencana dan PPS

A.2.18 Persentase Masyarakat yang Terjangkau Program Bangga Kencana

Berdasarkan capaian hasil pemutakhiran PK 2023 dapat kita peroleh data bahwa persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana sebesar 79.49 persen dari yang ditargetkan sebesar 72 persen, melampaui target yakni tercapai sebesar 110,4 persen. Adapun rincian capaian per kabupaten/kota adalah sebagai berikut: Kabupaten Kulon Progo sebesar 77,98%, Kabupaten Bantul sebesar 76,86%, Kabupaten Gunungkidul sebesar 81,44%, Kabupaten Sleman sebesar 81,13%, dan Kota Yogyakarta sebesar 79,13%. Hal ini dapat dicapai karena jalinan kerjasama yang baik dengan OPD KB dan mitra kerja lainnya untuk membantu menyebarkan informasi Program Bangga Kencana kepada sasaran di wilayah kabupaten kota sesuai dengan target sasaran dan media yang sesuai, lini atas, lini tengah dan lini bawah.

Penayangan informasi Program Bangga Kencana kepada masyarakat dilaksanakan melalui berbagai media cetak dan elektronik, dan juga media luar ruang seperti baliho, spanduk, poster, flyer, leaflet. Penayangan informasi Program Bangga Kencana melalui media elektronik selama 12 bulan berupa televisi dan radio antara lain: *talkshow*, liputan khusus program Bangga Kencana, penayangan iklan layanan masyarakat (ILM), dan berupa radio lokal dan radio komunitas

antara lain : dialog interaktif, spot penayangan iklan layanan Masyarakat/ ILM, penyiaran siaran langsung, penyiaran jingle Mars KB, dan liputan program Bangga Kencana yang disiarkan secara langsung dari lokasi kegiatan.

KIE dan Promosi Program Bangga Kencana melalui media luar ruang berupa media KIE berupa spanduk, umbul-umbul, baliho/billboard yang membawa pesan-pesan aksi dan pesan pendukung guna promosi Program KKBPk ke masyarakat. Dan juga dilaksanakan KIE dan Promosi Program KKBPk melalui momentum Hari Keluarga Tingkat Nasional dan Provinsi. Pengembangan dan Produksi Media Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana berupa produksi *roll up banner*, Leaflet tentang KB MKJP dan pencegahan stunting sebanyak 1000 eksemplar, media promosi KIE berupa souvenir dan *merchandise* KIE Program Bangga Kencana. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui infografis dan videografis sebanyak 2 ILM dengan judul: **“Cegah Stunting Itu Penting”** dan Kolaborasi bersama mitra kerja utk turunkan angka stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian target kedepan adalah :

- mengoptimalkan peran Media Production Center (MPC) untuk menghasilkan produk-produk KIE
- mengoptimalkan peran media massa baik cetak maupun online

A.2.19 Persentase Penyuluh KB yang Berkinerja Baik

Nilai Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) diperoleh dari nilai SKP tahun berjalan, terdiri dari cukup, baik dan sangat baik. Sedikitnya ada 180 orang PKB dari 222 orang PKB se-DIY atau lebih dari 80% pada tahun 2023 mendapatkan predikat nilai SKP “baik”. Hal ini berarti kinerja PKB DIY tercapai sesuai dengan target kinerja 100 persen tahun 2023 yaitu 80% PKB berkinerja baik.

Strategi untuk dapat mencapai target 80 persen PKB berkinerja baik antara lain dengan dilakukannya monitoring evaluasi dan bimbingan teknis kepada semua PKB baik secara daring maupun luring. Meski tercapai target 100 persen PKB berkinerja baik, masih ada

kesempatan untuk lebih meningkatkan capaian target di waktu mendatang dengan lebih mengintensifkan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi pelaksanaan program di lini lapangan.

A.2.20 Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)

Data hasil pengelolaan data rutin pelayanan KB dan Pengendalian lapangan sebagai sumber data dan informasi pelaksanaannya diharapkan benar-benar dapat menghasilkan data dan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan. Hasil pengelolaan data rutin pelayanan KB dan Pengendalian Lapangan diharapkan dapat menjawab kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan oleh program Bangga Kencana, yaitu dapat ditelusuri by name by address, sehingga dapat memberikan kepastian terhadap kondisi saat ini dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan program Bangga Kencana di semua tingkatan wilayah.

Seluruh Kabupaten dan Kota sudah menerapkan pengelolaan informasi keluarga melalui aplikasi SIGA dan laporan setiap bulan sudah dilaksanakan secara rutin. Adapun beberapa kendala yang dihadapi terkait aplikasi SIGA yaitu kadang masih mengalami error, dan ada beberapa SDM RR di lapangan masih membutuhkan *refreshing* terkait aplikasi SIGA.

Strategi yang dilakukan dalam upaya menghadapi kendala yang ada adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian laporan baik, membuat WA grup dan helpdesk sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan/kendala yang terjadi di lapangan.

A.2.21 Persentase Cakupan Perangkat dan Jaringan Sistem Teknologi dan

Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota

Capaian terkait cakupan perangkat dan jaringan Sistem teknologi dan informasi tk.provinsi dan kabupaten kota sudah mencapai 100%. Bentuk dukungan ini merupakan suatu upaya dalam melaksanakan

Sistem Informasi Keluarga berupa seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga. Dukungan ini berupa pembiayaan paket data komunikasi atau pembiayaan sewa internet menggunakan broadband di Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan di kabupaten dan kota. Dalam pelaksanaan ini ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain terkait provider yang menangani jaringan 5 kapanewon di 2 kabupaten.

Strategi yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak rekanan untuk penyediaan jaringan dan juga berkoordinasi dengan pihak Kapanewon untuk bisa difasilitasi terkait kendala jaringan tersebut dengan menyambungkan jaringan internet di Kapanewon tersebut.

A.2.22 Persentase Peserta Diklat yang Lulus Dengan Kategori Baik dan Sangat Baik

Tahun 2023 Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta harus memenuhi target Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus dengan kriteria baik dan sangat baik sebesar 75%. Berdasarkan target tersebut tercapai hasil sebesar 97,55% peserta pelatihan yang dinyatakan lulus dengan kriteria baik dan sangat baik. Berdasarkan target dan hasil yang diperoleh maka besaran capaian target peserta pelatihan yang lulus dengan kriteria baik dan sangat baik adalah sebesar 130,07%.

Pelatihan merupakan fungsi yang perlu mendapatkan perhatian karena menyangkut dengan pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan fungsi pelatihan pada tahun 2023 didukung oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Tersedianya tenaga fasilitator (widyaiswara dan non widyaiswara) yang kompeten sesuai dengan bidangnya, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
2. Pengembangan Materi dan Media Pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal, serta

dengan mengakomodir berbagai gaya belajar, sehingga peserta pelatihan dapat mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan

3. Pengembangan Platform Pembelajaran Berupa *Learning Management System* yang memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran bagi peserta pelatihan;

Agar pelatihan dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sehingga memberikan dampak yang optimal bagi peserta pelatihan, maka untuk mempertahankan capaian yang telah diraih dilakukan dengan tetap konsisten melaksanakan siklus pelatihan sebagai berikut :

1. Melakukan analisis kebutuhan diklat baik di level makro maupun mikro, sehingga kebutuhan organisasi maupun kebutuhan individu untuk pengembangan kompetensi dapat terakomodir.
2. Desain Pengembangan Kurikulum Pelatihan mengakomodir kebutuhan dari organisasi maupun peserta pelatihan, sehingga materi pelatihan yang disampaikan dapat memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan ekspektasi dari peserta pelatihan serta dengan memperhatikan gaya belajar orang dewasa;
3. Pengembangan Materi dan Media pembelajaran dilakukan dengan mengakomodir berbagai gaya belajar peserta pelatihan, yaitu : visual, auditori dan kinestetik. Sehingga peserta pelatihan dapat belajar dengan lebih optimal
4. Penyelenggaraan pelatihan dengan mematuhi Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan melibatkan Komite Penjamin Mutu untuk melakukan monitoring pelaksanaan pelatihan;
5. Evaluasi pelatihan, khususnya terkait dengan aspek pengetahuan disesuaikan dengan tujuan pelatihan yang ingin dicapai dengan tetap memperhatikan target keluaran kompetensi yang ingin dicapai.
6. Melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, baik evaluasi selama pelatihan maupun evaluasi pasca pelatihan.

A.2.23 Dukungan Manajemen di Provinsi (Termasuk Gaji/001 dan Pemeliharaan Rutin/002)

Program Dukungan Manajemen (DKM) Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta memiliki sasaran yaitu “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi”. Dalam melaksanakan dukungan manajemen di provinsi terdapat sinergi antara 4 Kelompok Kerja yaitu Kepegawaian dan Hukum, Umum dan Humas, Perencanaan, serta Keuangan dan BMN. Layanan manajemen di Provinsi tahun 2023 telah tercapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan, pembayaran gaji dan kegiatan layanan perkantoran dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian kinerja Dukungan Manajemen melibatkan semua pihak yang bersinergi sesuai dengan komitmen layanan terbaik yang menjadi nilai utama dalam setiap layanan sesuai dengan arahan Kepala Perwakilan serta komitmen bersama setiap Pegawai.

A.2.24 Indeks ZI WBK

Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBN) di Instansi Pemerintah, Tim Pendamping Internal melakukan evaluasi terhadap pembangunan tersebut oleh Perwakilan BKKBN DI. Yogyakarta dengan hasil nilai Evaluasi 79,43% belum mencapai target 82%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2023 adalah :

1. Rutin dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
Sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik,

Perwakilan BKKBN DIY secara rutin melaksanakan survei kepada pengguna Layanan dan hasil survei diolah setiap bulan untuk mengetahui nilai Index Persepsi Kepuasan Publik (IPKP) & Index Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sehingga tahu hal-hal yang masih dapat dioptimalkan dalam memberikan pelayanan.

2. Proaktif melaksanakan rekomendasi sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, sehingga pada Temuan pada Laporan Pemutakhiran Data Atas Hasil Pengawasan s.d Triwulan IV Tahun 2023 Perwakilan BKKBN DIY dengan status NIHIL atas Saldo temuan hasil audit Internal dan Saldo temuan hasil joint audit DAK sub bidang KB.
3. Melaksanakan monitoring penggunaan DAK pada Triwulan I dengan lokus pada 1 Kabupaten sebagai early warning system.
4. Refreshing dan penguatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK oleh Auditor Pusat.
5. Penyampaian nilai-nilai Pembangunan Zona Integritas pada Apel Pagi setiap hari dan media Informasi lainnya (Spanduk, banner dan Flyer).
6. Surveillance ISO SMAP 37001:2016.

Dengan hasil evaluasi masih belum mencapai target namun tetap masih ada yang dapat ditingkatkan yaitu:

- Meningkatkan budaya kinerja sehingga pencapaian target bisa sampai dengan 100%
- Meningkatkan identifikasi pengaduan yang disampaikan diluar kanal pengaduan resmi
- Penanganan benturan kepentingan untuk lebih mengarah kepada penciptaan sistem yang dapat meminimalisir potensi benturan kepentingan secara berkelanjutan
- Mengembangkan inovasi yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholder

A.3 Capaian Kinerja Output Proyek Prioritas Nasional dan Stunting

Tabel. Capaian Kinerja Tahun 2023 untuk Output ProPN dan Stunting

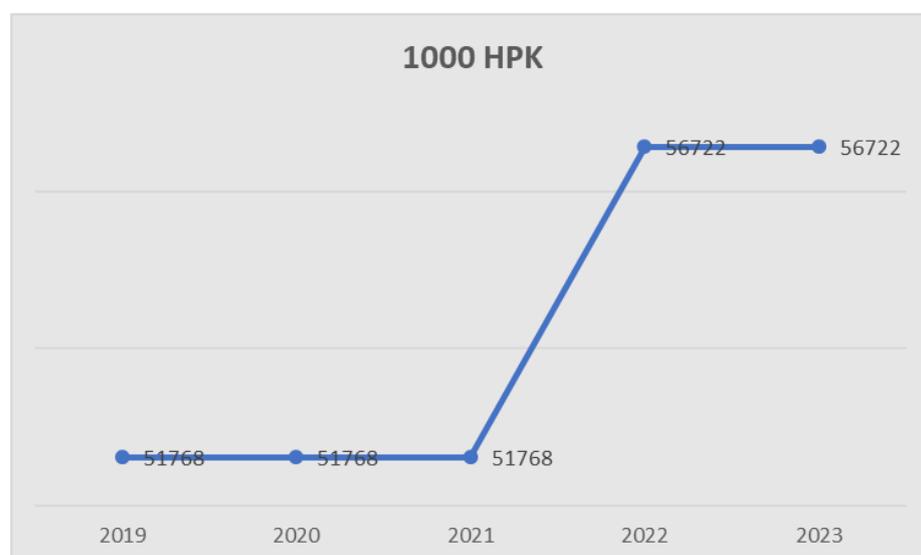
NO	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	TARGET	REALISASI
----	-------------------	------------	--------	-----------

1	Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK	Tagging RPJMN/ProPN	56.722 Keluarga	56.722
2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Tagging RPJMN/ProPN	465 PIK Remaja dan BKR	465
3	Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	Tagging RPJMN/ProPN	143 Kelompok BKL	143
4	Jumlah Kelompok UPPKA di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Tagging RPJMN/ProPN	5 Kelompok UPPKA	5
5	Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan	Tagging RPJMN/ProPN	66 Kampung KB	66
6	Kampung KB yang mendapat fasilitasi Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana	Tagging RPJMN/ProPN	5 Kab/Kota	5
7	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon	Tagging RPJMN/ProPN	430 Faskes	430
8	Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting	Tagging Stunting	5 Kab/Kota	5
9	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi	Tagging Stunting	2 Rekomendasi kebijakan	2
10	Jumlah faskes yang mendapat fasilitasi intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting	Tagging Stunting	430 Faskes	430
11	Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan	Tagging Stunting	5 Kab/Kota	5
12	Jumlah Sistem Data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting yang berkualitas	Tagging Stunting	1 Layanan	1
13	Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan	Tagging Stunting	3 Layanan	3

14	Jumlah Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	Tagging Stunting	6 Kegiatan	6
15	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi TPKTPPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota	Tagging Stunting	1 Layanan	1
16	Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	Tagging Stunting	5.576 Orang	5581
17	Jumlah kegiatan penyelenggaraan sekretariat percepatan penurunan stunting provinsi	Tagging Stunting	1 Kegiatan	1
18	Jumlah layanan humas percepatan penurunan stunting tingkat provinsi	Tagging Stunting	1 Layanan	1
19	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting provinsi	Tagging Stunting	1 Layanan	1

A.3.1 Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas pembinaan 1000 HPK

Gambar 3.7. Grafik Capaian Fasilitas Pembinaan 1000 HPK Tahun 2020-2023



A.3.2 Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu

Penguatan peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu, sebagai target Pro PN tercapai 100 %. Dengan pembagian sasaran PIK Remaja sebanyak 304 kelompok dan BKR sebanyak 161 kelompok sehingga total sasaran sebanyak 465 kelompok. Kelompok PIK Remaja dan BKR mempunyai peran penting dalam

penurunan angka stunting dikarenakan salah satu sasaran kelompok kegiatan tersebut adalah remaja putri sebagai calon ibu.

Dari tahun 2019 Perwakilan BKKBN DIY telah memberikan fasilitasi dan pembinaan tentang edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri kepada 443 kelompok kegiatan dan jumlah kelompok kegiatan tersebut mengalami kenaikan menjadi 465 kelompok di tahun 2023. Dengan semakin banyaknya kelompok kegiatan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan tersebut diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting di DIY.

Fasilitasi yang diberikan berupa pemberian modul “1001 Cara Bicara” untuk kelompok BKR dan modul “Tentang Kita” untuk kelompok PIK Remaja. Modul “1001 cara Bicara” berisi tentang cara-cara komunikasi efektif orangtua kepada remaja tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri. Sedangkan modul “Tentang Kita” berisi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sesuai dengan segmen usia (10-14 tahun; 15-19 tahun; 20-24 tahun). Selain itu juga dilakukan sosialisasi kepada kelompok kegiatan tentang modul tersebut.

Selama 5 (lima) tahun capaian jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu, sudah berhasil 100% dengan peningkatan target kelompok dari tahun ke tahun.

Gambar 3.8. Grafik Capaian PIK Remaja dan BKR Tahun 2020-2023



A.3.3 Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia

Indikator ini merupakan salah satu kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) dan Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 143 kelompok. Kelancaran kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia tidak lepas dari adanya kerjasama dengan beberapa lintas sektor, termasuk Perguruan Tinggi (PT), yaitu Universitas Respati Yogyakarta. Kerjasama yang diwujudkan dengan PT adalah dalam bentuk kegiatan orientasi atau peningkatan kapasitas kader/ anggota kelompok BKL. Bersama Komda Lansia DIY, BKKBN juga ingin mewujudkan DIY yang ramah lansia.

A.3.4 Jumlah Kelompok UPPKA di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Merupakan salah satu indikator kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) dengan target sebanyak 5 (lima) Kampung KB Percontohan. Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai 100% target tersebut. Kegiatan yang dilakukan berupa Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi keluarga Akseptor KB Lestari MKJP dan Keluarga Akseptor KB Mandiri MKJP di Kampung KB Percontohan secara komprehensif dan terintegrasi lintas sektor guna meningkatkan perekonomian keluarga.

Sasaran pelaksanaan kegiatan adalah keluarga akseptor KB dan Keluarga yang beresiko stunting di Kampung KB Percontohan melalui kelompok UPPKA, yang terdiri dari Kampung KB Baros, Bantul (Kelompok UPPKA Mawar), Kampung KB Wadas, Kulon Progo (Kelompok UPPKA Wadas Mandiri), Kampung KB Margoagung, Sleman (Kelompok UPPKA Barokah), Kampung KB Kayugerit, Gunungkidul (Kelompok UPPKA Kayugerit) dan Kampung KB Gedongkiwo, Kota Yogyakarta (Kelompok UPPKA Cempaka).

Fasilitasi yang diberikan kepada kelompok UPPKA tersebut antara lain Pemberian Buku Materi (1 paket buku pengelolaan keuangan keluarga), Flipchart Pengelolaan Keuangan Keluarga), Pembelajaran, pembinaan dan pelatihan yang berkaitan dengan pemasaran produk usaha dan Pemberian bantuan sarana/alat pendukung produksi (Kompas gas Produksi, Mesin pengiris tempe, sealer cup, dispenser stainless steel, panci serbaguna, wajan anti lengket, hand sealer press, prasmanan set).

Keberhasilan dari pencapaian tersebut, tidak terlepas dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan, seperti Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengembangan Model Kemitraan, Permodalan, Pemasaran (Pilot Project) PEK Peduli Stunting. Kedepannya untuk mempertahankan capaian tersebut dengan meningkatkan kolaborasi berbagai lintas sektor.

A.3.5 Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan

Fasilitasi Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu kegiatan program prioritas nasional (Pro PN). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan Rumah Data Kependudukan sehingga memberikan pelayanan paripurna. Pada Tahun 2023, sasaran Pro PN Rumah Data Kependudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 66 Rumah Dataku. Dari target tersebut tercapai 100%

Upaya untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pengelola Rumah Dataku melalui orientasi bagi

pengelola Rumah Dataku dan fasilitasi kegiatan pada Rumah Dataku untuk melaksanakan kegiatan pertemuan pengumpulan, pengolahan dan analisis data di Rumah Dataku pada 66 Rumah Dataku yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota. Dari kegiatan fasilitasi tersebut, Rumah Dataku yang awalnya memiliki klasifikasi Sederhana seluruhnya meningkat klasifikasinya menjadi

A.3.6 Kampung KB yang mendapat fasilitasi Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangsa Kencana

Kampung KB yang mendapatkan fasilitasi Intensifikasi ada 5 Kampung KB yang mengikuti lomba Kampung KB tingkat Provinsi dan Ekstensifikasi ada 10 Kampung KB yang mengikuti orientasi bagi Kampung KB yang menjadi juara dimasing-masing kabupaten Kota, untuk mengoptimalkan Kampung KB pada laporan Website kampung KB kami mengundang 90 kader dan PKB Kampung KB se DIY agar bisa melaporkan semua kegiatan dimasing-masing Kampung KB.

A.3.7 Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon

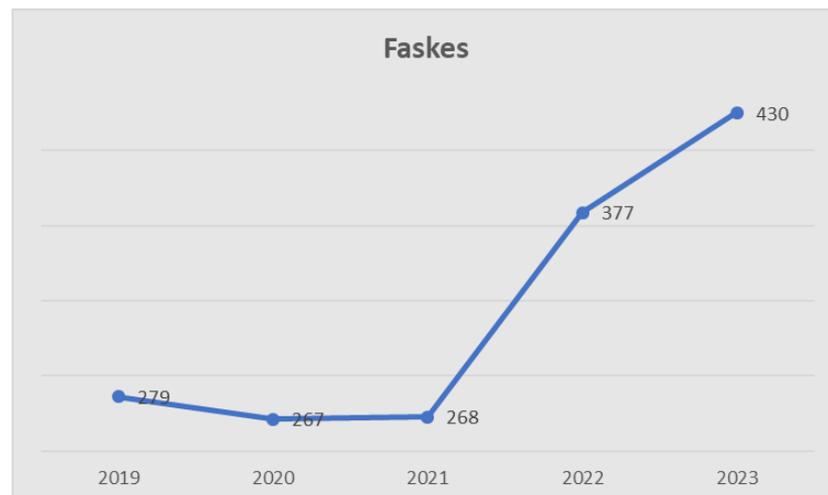
Salah satu target kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Sasaran Kinerja tersebut adalah Terpenuhinya Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) di Fasyankes dengan Indikator Kinerja jumlah fasyankes yang mendapatkan pemenuhan ketersediaan alokon. Pada tahun 2021, Perwakilan BKKBN DIY telah menyalurkan alokon ke 268 fasyankes. Fasyankes yang mendapatkan alokon tersebut adalah fasyankes yang telah terdaftar dalam databasis (K/O/KB) dan juga telah berjejaring dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2022 dan 2023 jumlah fasyankes mengalami peningkatan menjadi 377 dan 430 fasyankes, di mana fasyankes yang dapat memperoleh alokon dari BKKBN adalah fasyankes yang telah terdaftar dalam K/O/KB BKKBN tanpa harus berMoU dengan BPJS Kesehatan.

Keberhasilan Perwakilan BKKBN DIY dalam mencapai target tersebut tidak lepas dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan, diantaranya Monitoring Evaluasi (monev) Alokon di fasyankes yang belum pernah

mendapatkan distribusi alokon dari BKKBN serta pemetaan fasyankes yang memperoleh distribusi alokon BKKBN. Hasil monev dan pemetaan tersebut, akan ditindaklanjuti bersama dengan OPD KB Kabupaten/Kota serta PKB/PLKB di masing-masing wilayah. Jejaring dan jaringan fasyankes ke depannya akan didorong agar dapat teregister di SIGA melalui OPD KB masing-masing Kabupaten/Kota agar setara dengan Fasyankes sehingga mempermudah rantai distribusi Alokon.

Capaian pemenuhan ketersediaan alokon selama 4 (empat) tahun sudah berhasil 100%, dengan target yang meningkat dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Untuk target di tahun 2020 mengalami penurunan dari target di tahun 2019, yaitu 267 faskes dan 279 faskes.

Gambar 3.9. Grafik Capaian Pemenuhan Ketersediaan Alokon Tahun 2020-2023



A.3.8 Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting

Dalam kegiatan fasilitasi Pemberdayaan dalam rangka penurunan Stunting sebanyak 156 KKB yang menampilkan menu dari 78 Kapanewon dan kemantren se Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bahan baku lokal dan menu sederhana dari masing-masing wilayah, diharapkan dengan kenaneka ragaman menu akan menambah wawasan dalam menyajikan masakan pada keluarga sasaran stunting yg ada di DIY dan berdampak pada penurunan angka stunting dimasing-masing kalurahan.

A.3.9 Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi

Ada 2 rekomendasi dari hasil studi kasus stunting yaitu bekerjasama dengan FKKMK UGM dan Unisa, ditambah ada 2 rekomendasi dari 2 perguruan Tinggi UKDW dan UAD yang merekomendasikan masalah pengendalian penduduk.

A.3.10 Jumlah faskes yang mendapat fasilitasi intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting

Tahun 2023, Perwakilan BKKBN DIY ditargetkan mampu memenuhi 430 fasyankes yang mendapat fasilitasi intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting. Dari target tersebut, Perwakilan BKKBN DIY mampu memenuhi 100% dari target yang ditetapkan. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan selama tahun 2023 diantaranya adalah Bimbingan Teknis Penguatan Pelayanan KB, Apresiasi Lomba Pelayanan KB di Klinik Swasta, Pertemuan Orientasi Penguatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, Pertemuan Koordinasi PKBRS dan Klinik KB Tingkat Provinsi, Monitoring dan Evaluasi Intensifikasi Pelayanan KB di Faskes, serta Pemilihan Role Model TPMB dalam Pelayanan KB. Target dari kegiatan-kegiatan tersebut difokuskan pada fasyankes dengan capaian pelayanan KB rendah dan tidak rutin melakukan pencatatan serta pelaporan dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

Tahun 2023, Perwakilan dari BKKBN DIY pada Pemilihan Role Model TPMB dalam Pelayanan KB berhasil meraih Juara 2 Nasional untuk Regional 1. TPMB Sri Mulyani dari Semanu, Kabupaten Gunungkidul merupakan perwakilan dari DIY. Harapannya, TPMB Sri Mulyani tidak hanya dapat menjadi role model dalam pelayanan KB namun juga dapat menjadi contoh baik pada pencatatan pelaporan melalui SIGA. Hal ini dikarenakan, jika pelayanan KB yang telah dilakukan tidak dilaporkan dengan maksimal maka tidak akan tercatat sebagai capaian. Data Pemutakhiran PK-22 menunjukkan bahwa TPMB merupakan tempat pelayanan KB terbanyak yang diakses oleh Pasangan Usia Subur (PUS), yaitu sebesar 34.7%. Pemetaan Fasyankes yang telah melayani KB akan

dilaksanakan berdasarkan data di SIGA dan Fasyankes dengan capaian yang belum optimal akan di-feedback ke OPD KB Kabupaten /Kota dan akan dilaksanakan pembinaan dan pendampingan secara bersama oleh Perwakilan BKKBN DIY dan OPD KB Kabupaten/Kota.

A.3.11 Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan

Ibu Hamil dan Pascapersalinan, Penguatan Koordinasi Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pascapersalinan dalam rangka Penurunan Stunting, Orientasi Peningkatan Kapasitas Pendamping Ibu Hamil dan Ibu Pascapersalinan tentang Stunting. Pada tahun 2023, dilaksanakan Lomba ASIK KBPP dimana Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2023, Perwakilan BKKBN DIY ditargetkan sebanyak 5 kabupaten/kota mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan. Dari target tersebut, tercapai 100% melalui berbagai kegiatan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target tersebut adalah Monitoring Evaluasi dan Intensifikasi Pendampingan Ibu Hamil dan Pascapersalinan, Pertemuan Intensifikasi Pendampingan berhasil meraih juara 3 nasional dalam kegiatan tersebut. Mulai tahun 2022, DIY juga memiliki SE Gubernur Nomer 11/VII/SE/2022 tentang Pelayanan KB Pascapersalinan. Dalam SE tersebut, ditargetkan KB PP di DIY sebesar 40%, dengan KB MKJP sebanyak 50% dari target dan 100% ibu pascapersalinan mendapatkan konseling KB Pascapersalinan. Data Sistem Informasi Keluarga BKKBN Tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian KBPP di DIY sebesar 48.08%. Artinya, target dalam SE tersebut telah dicapai.

Sebagai upaya peningkatan capaian pelayanan KB PP, Perwakilan BKKBN DIY menyediakan alokon jenis baru berupa Minipil/ Progestine Only Pil dan Implan 1 Batang sebagai salah satu alternatif kontrasepsi. Akan dilaksanakan penguatan komitmen Pemerintah Daerah termasuk melalui OPD KB, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Organisasi profesi, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Fasyankes untuk

pelaksanaan SE Gubernur Nomer 11/VII/SE/2022 tentang Pelayanan KB Pascapersalinan.

A.3.12 Jumlah Sistem Data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting yang berkualitas

Indikator ini merupakan salah satu indikator kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) dengan target sebanyak 1 (satu) layanan. Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai 100% target tersebut. Kegiatan yang dilakukan berupa Verifikasi dan Validasi Keluarga Beresiko Stunting atau biasa disebut Verval KRS.

Sasaran pelaksanaan kegiatan Verval KRS adalah Keluarga yang merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) baru, Ibu Hamil, Keluarga yang memiliki anak berusia 0 - 23 bulan (BADUTA) dan Keluarga yang memiliki anak berusia 24 – 59 bulan (BALITA). Sasaran PUS yang bukan keluarga baru/tidak hamil/tidak memiliki anak usia 0 – 23 bulan/tidak memiliki anak usia 24 – 59 bulan tidak dilakukan Verifikasi, namun tetap menjadi sasaran pendampingan jika masuk ke kategori Keluarga Beresiko Stunting.

Mekanisme dalam kegiatan Verval KRS tersebut terdiri dari 3 tahapan, yaitu Identifikasi Sasaran, Update Data Sasaran dan Pengolahan Data. Identifikasi sasaran adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh sasaran Verval menggunakan Form R/I/KRS dan daftar keluarga pada aplikasi. Kemudian, Update Data Sasaran terdiri dari 2 macam, yaitu Perbaikan/Update Data sesuai dengan kondisi terkini dan Tambah Data Baru untuk keluarga sasaran yang belum ada pada form R/I/KRS atau pada aplikasi. Tahap terakhir yaitu Pengolahan Data yang bisa dilakukan dengan 2 metode, yaitu Metode Formulir dan Metode Smartphone. Pada Verval KRS Tahun 2023, di Provinsi DIY sudah 100% menggunakan Metode Smartphone.

A.3.13 Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan

Capaian tahun 2023 untuk target Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan sebanyak 3 kanal per bulan selama 12 bulan dengan total sebanyak 36

kali/kanal dalam satu tahun. Artinya target tercapai 100 persen. Dalam penayangan kampanye percepatan penurunan stunting ini dibagi dalam tiga kanal media, yaitu:

1. Media lini atas, yang termasuk media lini atas adalah media televisi dan radio / media elektronik.
2. Media lini tengah yaitu media sosial (youtube, Instagram twiter/X) dan media online.
3. Media lini bawah diantaranya adalah flyer, poster, leaflet, baliho dan spanduk.

Target kampanye percepatan penurunan stunting pada masing-masing lini dapat tercapai. Target tersebut dapat tercapai diantaranya karena dukungan anggaran yang memadai untuk menayangkan pada tiga lini media tersebut. Selain dukungan anggaran, Kerjasama dengan mitra kerja khususnya media dapat membantu untuk pencapaian target ini.

strategi yang dilakukan :

- mengoptimalkan peran media lini atas, lini tengah dan lini bawah
- melibatkan mitra kerja strategis dalam emlakukan kampanye pps

A.3.14 Jumlah Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan

Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota

DIY terdiri dari 1 provinsi dan 5 kabupaten kota dengan ketersediaan tenaga satgas PPS lengkap baik di tingkat provinsi ada Koordinator Program Manajer, Manajer Program Kegiatan dan Manajer Program Data serta Office Assisstant, maka diselenggarakan rapat koordinasi satgas PPS yang dikelola oleh satgas PPS tingkat DIY dengan peserta stakeholder dan mitra kerja di tingkat DIY dan Kabupaten Kota. Selain itu masing-masing Technical Assisstant juga menyelenggarakan rapat koordinasi PPS dengan peserta tingkat kabupaten kota ke bawah. Dengan demikian target jumlah penyelenggaraan koordinasi satgas PPS Provinsi dan kabupaten kota untuk DIY tercapai sesuai target yaitu 6 kegiatan (100 %)

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target adalah dengan menyusun alokasi jadwal kegiatan penyelenggaraan koordinasi satgas PPS

dan mengingatkan kembali saat menjelang waktu yang telah dijadwalkan hampir tiba.

Untuk mempertahankan capaian di masa datang dengan mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan tim satgas PPS untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana.

A.3.15 Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi TPKTPPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota

Kegiatan monitoring evaluasi TPK, TPPS dan Satgas PPS Provinsi Kabupaten Kota di DIY telah dilakukan pada tahun 2023 yang selanjutnya disusun laporan pelaksanaan monev tersebut. Jumlah laporan monev TPK TPPS Satgas PPS DIY dan Kabupaten Kota ada 1 (satu) atau 100 % dari target yang ditetapkan, yaitu 1 (satu).

Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai target berupa koordinasi intensif kepada satgas PPS agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi baik kepada TPK TPPS maupun satgas dalam menjalankan kegiatannya. Data update capaian kinerja TPK, TPPS dan satgas digunakan untuk penyusunan laporan monitoring evaluasi yang dikirim ke BKKBN.

Untuk mempertahankan capaian target perlu dilakukan optimalisasi updating data capaian kinerja TPK TPPS dan satgas setiap bulan dan triwulan agar memudahkan penyusunan laporan monitoring evaluasi tersebut.

A.3.16 Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting

Target kinerja jumlah SDM eksternal yang mendapatkan pelatihan dan refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting sebanyak 5.576 orang. Orientasi untuk Kader Tim Pendamping Keluarga sejumlah 5.556 kader dan tercapai 100% kader lulus dengan kategori sangat baik, persentase capaiannya adalah 133% dari target 75%. Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Dokter dan Bidan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan target 20 orang, yang berhasil melatih 25 orang Bidan atau 125%

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dari 25 orang tersebut 75% harus lulus dengan kriteria baik dan baik sekali, dan untuk Tahun 2023 sebanyak 7 orang dengan predikat baik dan 18 orang sangat baik sehingga prosentase capaian predikat kelulusan baik dan sangat baik adalah 131% dari target 75% yang ditetapkan atau 19 peserta.

A.3.17 Jumlah kegiatan penyelenggaraan sekretariat percepatan penurunan stunting provinsi

Indikator ini merupakan salah satu indikator kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) dengan target sebanyak 1 (satu) kegiatan. Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai 100% target jumlah kegiatan penyelenggaraan sekretariat percepatan penurunan stunting provinsi. Kegiatan yang dilakukan berupa pertemuan koordinasi percepatan penurunan stunting dengan lintas sektor, antara lain: Bappeda DIY, Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2 DIY, Dinas Sosial, DPU-ESDM DIY dan instansi terkait percepatan penurunan stunting lainnya. Pada kegiatan ini dilaksanakan forum koordinasi percepatan penurunan stunting dan rebug stunting tingkat provinsi.

A.3.18 Jumlah layanan humas percepatan penurunan stunting tingkat provinsi

Humas percepatan penurunan stunting adalah salah satu target kinerja yang ditetapkan dalam rangka percepatan penurunan stunting, kegiatan ini dilakukan melalui kerjasama dengan media sebagai salah satu bentuk promosi penyebaran informasi mengenai berbagai macam kegiatan program yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN DIY sepanjang tahun 2023. Kerjasama yang dilakukan meliputi media cetak dan elektronik dimana produk yang dihasilkan adalah berita liputan percepatan penurunan stunting baik cetak maupun online dengan Media Tribun. Selain itu, penyebaran informasi terkait program juga dengan mengoptimalkan Forum Koordinasi Jurnalis sebagai wadah komunikasi antara Perwakilan BKKBN DIY dengan Media.

Untuk pencapaian target selanjutnya dalam rangka percepatan penurunan stunting, akan tetap mengembangkan kerjasama dengan media

baik itu cetak maupun online. Selain itu juga akan mengoptimalkan Forum Koordinasi Jurnalis yang sudah terbentuk dalam menyebarkan informasi ke masyarakat melalui media .

A.3.19 Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kegiatan Percepatan

Penurunan Stunting provinsi

Dalam rangka pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting berjalan sesuai arah dan target yang telah ditetapkan, dilakukan pengawasan oleh BPKP baik di tingkat Pusat maupun Provinsi. BPKP memasukkan pengawasan Percepatan Penurunan Stunting sebagai salah satu Agenda Prioritas Pengawasan yang dilaksanakan serentak di 34 provinsi di Indonesia.

Pelaksanaan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting dilakukan di 3 (tiga) lokus yaitu pada Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo. Paparan Laporan Hasil Evaluasi dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah DI. Yogyakarta dan beserta seluruh stakeholder pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting dengan hasil akhir Laporan hasil Evaluasi yaitu 'Laporan Hasil Evaluasi atas Percepatan Penurunan Stunting tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 pada DI. Yogyakarta, Nomor: PE.09.03/LHP-230/PW12/2/2023 Tanggal 3 Juli 2023', 'Laporan Hasil Evaluasi atas Percepatan Penurunan Stunting tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 pada Kabupaten Gunungkidul, Nomor: PE.09.02/LHE-289/PW12/2023 Tanggal 12 Juli 2023', dan 'Laporan Hasil Evaluasi atas Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 pada Kabupaten Kulon Progo, Nomor: PE.09.03/LHP-288/PW.12/2/2023 Tanggal 12 Juli 2023.

B. Realisasi Anggaran

B.1 Realisasi Anggaran Unit Kerja

Pagu awal anggaran Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam DIPA Nomor: SP DIPA-068.01.2.017972/2023 tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp.65.709.988.000,-. Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember

2023, Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta telah mengalami perubahan pagu anggaran sebanyak 5 kali.

Perubahan pagu anggaran yang pertama dilakukan berdasarkan Surat Sekretaris Utama BKKBN Nomor: B-2056/RC.04.02/B1/2023 Tanggal 10 Juli 2023 Perihal Usulan Revisi Realokasi Anggaran Blokir Automatic Adjustment ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) BKKBN Tahun Anggaran 2023. Pagu anggaran Perwakilan BKKBN DIY yang semula Rp 65.709.988.000,00 menjadi Rp 60.452.726.000,00.

Perubahan pagu anggaran yang kedua berdasarkan Surat Sekretaris Utama BKKBN Nomor: B-650/KU.01/B3/2023 Tanggal 3 Agustus 2023 Perihal Usulan Revisi Relaksasi Blokir Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023. Pagu anggaran Perwakilan BKKBN DIY yang semula Rp 60.452.726.000,00 menjadi Rp 59.693.744.000,00.

Perubahan pagu anggaran ketiga berdasarkan Surat Sekretaris Utama BKKBN Nomor: B-948/KU.01/B3/2023 Tanggal 24 Oktober 2023 perihal Usulan Revisi Tambahan Anggaran Belanja Pegawai BA BUN BKKBN Tahun Anggaran 2023 Bagi PPPK Tahun 2022 untuk pagu belanja pegawai yang semula Rp 40.794.246.000,00 menjadi Rp 41.920.859.000,00.

Perubahan pagu anggaran keempat berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-503/AG/AG.4/2023 Tanggal 7 November 2023 perihal Penambahan/Pergeseran Anggaran dari Sub BA BUN Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L, Revisi Penambahan Pagu Anggaran Yang Bersumber dari PNBPN dan Revisi Buka Blokir BKKBN TA 2023. Pagu anggaran Perwakilan BKKBN DIY yang semula Rp 60.452.726.000,00 menjadi Rp 59.693.744.000,00.

Perubahan pagu anggaran kelima berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama BKKBN Nomor: B-106/KU.01/B3/2023 Tanggal 15 November 2023 perihal Usulan Revisi Realokasi Anggaran Belanja Pegawai (bukan bersumber dari anggaran BA BUN) dan kemitraan BKKBN Tahun Anggaran 2023. Pagu anggaran Perwakilan BKKBN DIY dari semula Rp 60.820.357.000,00 menjadi Rp 61.146.469.000,00

Realisasi penyerapan DIPA Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta TA 2023 adalah sebesar Rp 61.063.962.010 atau 99,87 persen dari pagu anggaran Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta TA. 2023 sebesar Rp

61.146.469.000,00,- Adapun realisasi anggaran Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta TA 2022 per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN DIY TA. 2023 per program

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	14.993.628.000	14.986.461.676	99,95
2.	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	46.152.841.000	46.077.500.334	99,84
Jumlah		61.146.469.000	61.063.962.010	99,87

Sumber: OMSPAN

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2023 alokasi anggaran terserap cukup baik meskipun belum 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran cukup digunakan secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis sesuai yang telah ditargetkan dalam Renstra tahun 2020-2024 dan ditetapkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

B.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan program Banggakencana selain menggunakan dana APBN yang tertuang dalam DIPA Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta, juga menggunakan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang KB melalui Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta. Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik Sub Bidang KB dan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Sub Bidang KB (BOKB). Dengan adanya dukungan dari DAK Sub Bidang KB tersebut sangat membantu dalam pencapaian target kinerja di D.I. Yogyakarta.

Selain dukungan anggaran, pencapaian Program Bangga Kencana juga didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang ada di DIY baik ASN

yang ada di Perwakilan BKKBN DIY maupun Penyuluh Keluarga Berencana. Pada tahun 2022 ini Perwakilan BKKBN DIY mempunyai pegawai sebanyak 317 orang. Dengan bergabungnya tenaga Penyuluh KB di Perwakilan BKKBN DIY sejak tahun 2017 memberi dampak positif terhadap pencapaian target kinerja di DIY. Adanya formasi untuk PPPK PKB mulai tahun 2021 juga menambah sumber daya manusia untuk pengelolaan program bangga kencana. Hal ini terbukti dengan adanya trend meningkatnya persentase mCPR dan menurunnya tingkat unmet need di DIY. Meskipun capaian tersebut masih belum signifikan dan masih diperlukan inovasi lebih dari para Penyuluh KB guna mencapai target kinerja yang ada sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang di DIY.

Potensi sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Perwakilan BKKBN DIY yaitu :

1. Jumlah pegawai di lingkungan Kantor Perwakilan BKKBN DIY ada 97 orang,
2. Total Penyuluh KB (PKB) ada 220 orang terdiri dari PKB dengan status PNS ada 147 orang, PPPK PKB formasi tahun 2021 dan 2022 ada 73 orang
3. Dari 220 orang PKB, untuk yang Jenjang Keahlian ada 158 orang dan Jenjang Ketrampilan ada 62 orang.

C. Kinerja dan Capaian Lainnya

C.1 Inovasi dan atau Penghargaan yang Dicapai pada Tahun 2023

C.1.1 Inovasi

1. SurveillanceSertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

Berdasarkan data KPK dari tahun 2004-202 diketahui bahwa persentase terbanyak perkara yang ditangani oleh KPK adalah terkait penyipuan, meskipun pada kenyataannya Pemerintah telah banyak menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penyipuan dan

tindak pidana korupsi. Masih dibutuhkan penerapan sebuah sistem manajemen yang mampu mencegah, mendeteksi, dan menangani tentang penyuapan. ISO 37001:2016 merupakan pedoman untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan. Standar ini telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia melalui Bandar Standarisasi Nasional (BSN) menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

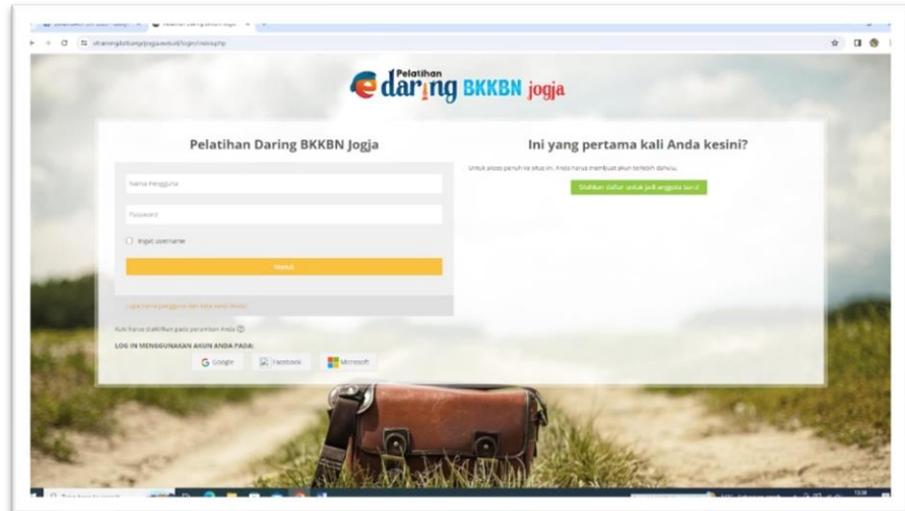


2. Model Flexible Learning Orientasi Tim Pendamping Keluarga

Pengembangan **Model Flexible Learning** bagi TPK dapat memilih orientasi secara mandiri agar TPK dapat mengikuti orientasi sesuai dengan kebutuhan waktu dan lokasi (kapan dan dimana saja). Dengan metode belajar ini, TPK dapat memilih bagaimana mereka akan mempelajari materi (tersedia pilihan media pembelajaran, yaitu video dan teks/modul) serta adanya pilihan bagi TPK untuk berinteraksi secara *asynchronous* dengan fasilitator.

3. Pelatihan Daring BKKBN Jogja

Pelatihan Daring BKKBN Jogja adalah sebuah upaya menjadikan pelatihan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga terbuka untuk siapa saja, dapat diakses kapan saja dan dimana saja.



C.1.2 Penghargaan

1. Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor





Perwakilan BKKBN DIY meraih beberapa kejuaraan dalam momentum Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor yang diadakan oleh Kedeputusan KBKR. Adapun juara-juara yang diperoleh, yaitu:

1. Juara 1 kategori Provinsi Terbaik Tingkat Nasional Kelompok Target < 15.000 Akseptor
2. Juara 3 kategori Provinsi Terbaik Tingkat Nasional Cakupan Pelaporan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)
3. Juara 3 kategori Provinsi Terbaik Tingkat Nasional Total KB MKJP Kelompok Target < 2.000 Akseptor

2. Apresiasi KBPP “Asik KBPP” 2023



Perwakilan BKKBN DIY meraih Juara 3 Penguatan Pencapaian Pelayanan KB pasca persalinan “Apresiasi KB PP ASIK KB PP tahun 2023”.

3. Pemilihan Role Model TPMB Tingkat Nasional Tahun 2023



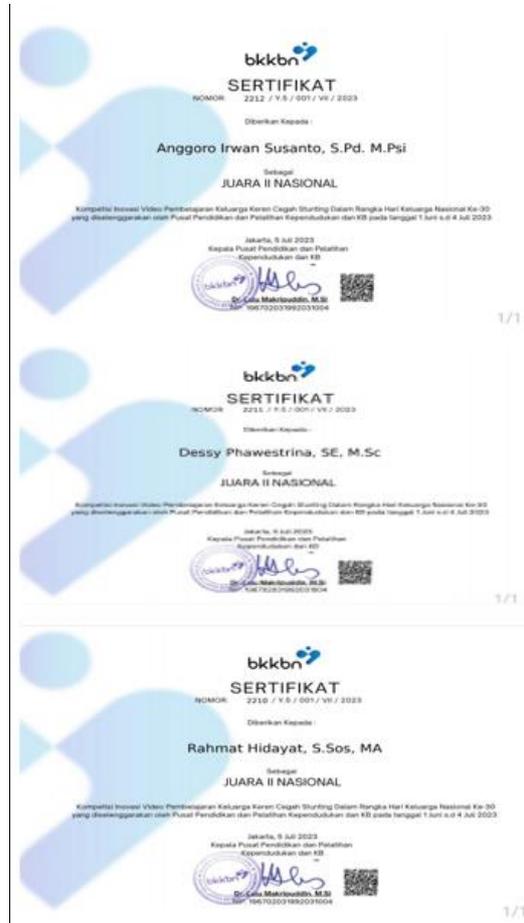
Perwakilan BKKBN DIY meraih Juara 2 Pemilihan Role Model TPMB Tingkat Nasional Regional 1 (Jawa-Bali) Tahun 2023 atas nama TPMB Sri Mulyani dari Kabupaten Gunungkidul.

4. Kelompok KB Pria Tahun 2023 Tingkat Nasional



Perwakilan BKKBN DIY meraih predikat Terbaik 1 Lomba Kelompok KB Pria Tahun 2023 Tingkat Nasional.

5. Kompetisi Inovasi Video Pembelajaran Keluarga Keren Cegah Stunting



Perwakilan BKKBN DIY meraih Juara 2 Nasional Kompetisi Inovasi Video Pembelajaran Keluarga Keren Cegah Stunting tahun 2023 yang diikuti oleh Tim yang terdiri dari Anggoro Irwan Susanto, Dessy Phawestrina dan Rahmat Hidayat.

6. Apresiasi PIAWAI DAK



Perwakilan BKKBN DIY meraih predikat Terbaik 2 Apresiasi Piawai DAK Kategori Provinsi Yang Membina Kabupaten/Kota dengan total anggaran DAK kurang dari 50 milyar tahun 2023.

**9. Grand Design Pembangunan Kependudukan Award Tahun 2023
Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**



Perwakilan BKKBN DIY meraih predikat Terbaik 1 Grand Design Pembangunan Kependudukan Award tahun 2023 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diraih oleh Kabupaten Sleman.

10. Capaian Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Tahun 2023



Perwakilan BKKBN DIY meraih Juara 3 Capaian pelaksanaan pendidikan kependudukan 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN.

11. ADPIN Award



Perwakilan BKKBN DIY meraih Juara 3 Kategori Pendamping BOKB KIE Terbaik tahun 2023 pada momentum ADPIN Award.

12. Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Terbaik Tahun 2023



Perwakilan BKKBN DIY meraih Juara Harapan 1 Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Penyuluh Terbaik Tahun 2023 Kategori Penyuluh KB atas nama Nurrul Ria Nisafa S.Sos, M.Sc.

13. Apresiasi Penyebarluasan Informasi dan Edukasi Dalam Morning Report



Perwakilan BKKBN DIY memperoleh Apresiasi Penyebarluasan Informasi & Edukasi Dalam Morning Report Kategori Produktif Tahun 2023 atas nama Fx. Danarto S.Y.

14. Apresiasi Pelayanan KIE Terbaik



Perwakilan BKKBN DIY memperoleh Apresiasi Pelayanan KIE Terbaik Peringkat 2 Dalam Harganas Ke 30 Palembang Tahun 2023

15. Bina Keluarga Balita (BKB) Terbaik



Perwakilan BKKBN DIY meraih Juara 1 Bina Keluarga Balita (BKB) Terbaik atas nama Kelompok BKB Mekarsari Bandegan.

16. Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas GenRe Tahun 2023



Perwakilan BKKBN DIY meraih Juara 1 Duta GenRe Putri Indonesia 2023 atas nama Yosevita Ramadhani Santikaputri.

17. GenRe Award Tahun 2023



Perwakilan BKKBN DIY meraih Juara 3 BKR Terbaik 2023 atas nama BKR Mekar Sejahtera.

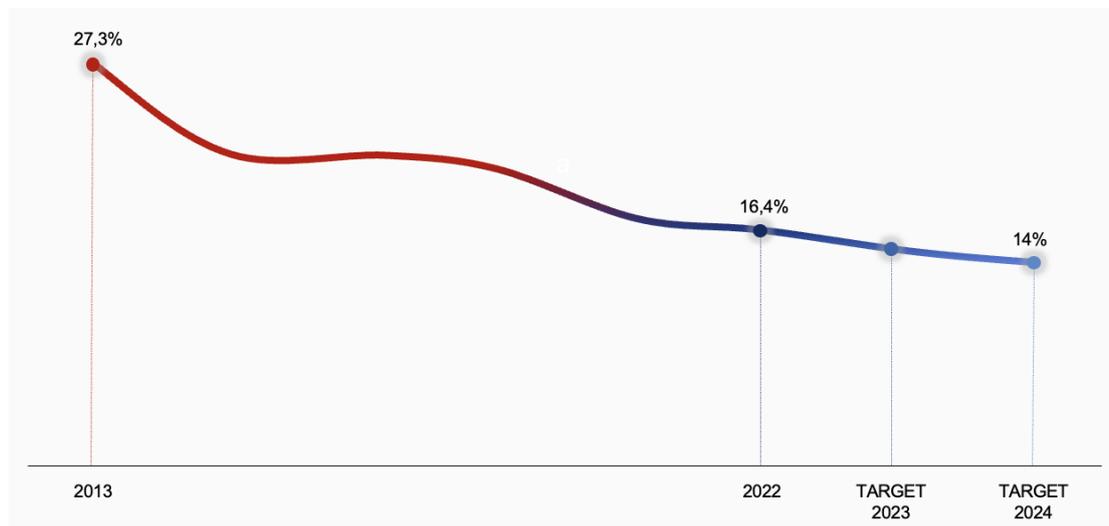
C.2 Pencapaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing. Prevalensi stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 0,9%, menjadi 16,4% dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 17,3%. Perlu waktu dan upaya untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024.

Pemerintah Indonesia menargetkan prevalensi Stunting sebesar 14% di tahun 2024 yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Saat ini, sebesar 24,4% atau sekitar 6 juta balita Indonesia mengalami Stunting (SSGI, 2022). Artinya dalam 2 tahun ke depan prevalensi harus diturunkan sebesar 10,4%

di Indonesia sedangkan di DIY Sebesar 2,4% prevalensi stunting yang harus diturunkan hingga tahun 2024.

Gambar 1. Tren Prevalensi Stunted (TB/U < -2 SD) di DIY Tahun 2013 – 2024



Target penurunan Stunting juga sejalan dengan salah satu target yang harus dicapai dalam SDG's yaitu target untuk menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara global untuk anak Stunting dan wasting pada balita, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan balita serta beberapa kegiatan lainnya. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting terdiri dari 91 indikator meliputi 20 indikator antara pada lampiran A dan 71 keluaran (output) pada lampiran B. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022, Prevalensi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 16,4 %, dengan rincian masing masing Kabupaten/Kota: 1) Kabupaten Kulon Progo 15,8%, 2) Kabupaten Bantul 14,9%, 3) Kabupaten Gunungkidul 23,5%, 4) Kabupaten Sleman 15%, 5) Kota Yogyakarta 13,8%. Sedangkan berdasarkan data rutin Pemantauan Status Gizi (E-PPGBM) Tahun 2023, rata-rata persentase

stunted di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 10,3%, dengan rincian di Kabupaten dan Kota: 1) Kabupaten Kulon Progo 9,8%, 2) Kabupaten Bantul 6,7%, 3) Kabupaten Gunungkidul 19,7%, 4) Kabupaten Sleman 11,1%, 5) Kota Yogyakarta 12,2%.

Gambar 2. Prevalensi Stunted DIY berdasarkan SSGI 2022 dan E-PPGBM 2023



(Sumber: Kemenkes RI. Capaian Data Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2023)

Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi dari Dinas Kesehatan, prevalensi stunting 10,1%, dengan data cakupan pemantauan tumbuh kembang di posyandu sebesar 82,1% cakupan ini belum mencapai angka 100% cakupan balita yang ditimbang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Target penurunan stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta yang disampaikan di dalam dokumen (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 menyebutkan sebesar 15,1% adalah target untuk tahun 2023 prevalensi angka stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini tentunya akan ada upaya dan strategi yang akan dilakukan oleh

Pemerintah Daerah DIY dalam menjamin target sebesar 1,3% yang akan diturunkan dari tahun 2022 untuk tahun 2023 ini.

Hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) antara Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan, dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyepakati target prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita tahun 2023 sebesar 16%. Beberapa sub kegiatan yang mendukung pencapaian prevalensi stunting yaitu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.

Perpres Nomor 72 Tahun 2021 diterbitkan dalam rangka memperkuat kerangka intervensi yang perlu dilakukan dan aspek kelembagaan dalam pelaksanaan upaya Percepatan Penurunan Stunting. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tiap jenjang, baik dari pusat, provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan. Susunan Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Provinsi yang terdiri dari pengarah yang diketuai oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan pelaksana yang diketuai oleh Wakil Gubernur DIY dan terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim Percepatan Penurunan Stunting di DIY baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan seluruhnya sudah terbentuk dan memiliki SK TPPS serta telah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka Program Percepatan Penurunan Stunting.

Mengacu pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN dengan dukungan lintas kementerian/lembaga telah mensosialisasikan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-2024 dengan pendekatan dari hulu hingga hilir mulai dari remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan. Kolaborasi multipihak telah dilakukan mulai dari individu (dalam program Bapak Asuh Anak Stunting), pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, pesantren, Perguruan Tinggi,

TNI/POLRI, lembaga multilateral dan filantropi untuk bersama sama bergerak memastikan seluruh intervensi baik spesifik maupun sensitif dapat menjangkau seluruh keluarga yang mempunyai risiko melahirkan anak stunting.

Untuk Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN memiliki Indikator Kinerja tambahan untuk Layanan Intervensi Sensitif sebanyak 11 Indikator yang terdapat di Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Dari Sasaran Kinerja Intervensi Sensitif, ada 8 Indikator yang sudah mencapai target, yaitu:

1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan. (Target KBPP 2023 untuk provinsi angka absolut peserta KBPP), dari rencana target 41,97%, terealisasi 48.08%.
2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan. (Target KTD 2023 untuk Provinsi : Jumlah Kab/Kota yang dilakukan promosi dan konseling kespro dalam rangka penurunan KTD), dari rencana target 22,8%, terealisasi 11,90% (semakin turun angka dari target, semakin baik untuk persentase kehamilan yang tidak diinginkan)
3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah, dari rencana target 80% , terealisasi 100% (sumber data : Pelaporan TPPS Semester 2)
4. Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan, dari rencana target 60% , terealisasi 60%.
5. Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi, dari rencana target 75%, terealisasi 100%.
6. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dari target 80%, terealisasi 98,40%.
7. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah, dari target 70%, terealisasi 73,52%.
8. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan stunting, target 3 kanal/metode per bulan, terealisasi 36 kanal/metode per tahun .

Sedangkan untuk Indikator Kinerja yang belum mencapai target ada 3, yaitu:

1. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja, target 100 %, realisasi 97,57 %
2. Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000, target 1,6 %, terealisasi 6,7% (Sumber Data : Pelaporan TPPS DIY Semester 2)
3. Cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting, target 60 %, terealisasi 23 %

Strategi untuk meningkatkan Capaian Intervensi Sensitif yang belum mencapai target antara lain:

1. Untuk Indikator Kinerja berkaitan PIK Remaja dan BKR, perlunya sinergitas dengan mitra Kerja BKKBN. Di samping itu, dalam rangka merespon permasalahan remaja saat ini, BKKBN mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe). Program GenRe adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Program GenRe adalah program yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda.

Program GenRe merupakan wadah untuk mengembangkan karakter bangsa karena mengajarkan remaja untuk menjauhi Pernikahan Dini, Seks Pra Nikah dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa. Salah satu Tugas dari GENRE adalah mengajarkan remaja untuk menjauhi Pernikahan Dini. GENRE bisa menjadi Duta Stunting di wilayah sekaligus mengedukasi Remaja untuk penyiapan bagi remaja dalam mempersiapkan kehidupan keluarga yang lebih baik . Dengan

penyiapan keluarga yang lebih matang , diharapkan ke depannya bisa menghasilkan generasi yang lebih baik dan meminimalisir kelahiran bayi stunting. Dalam hubungannya dengan Mitra Kerja, pentingnya kolaborasi program seperti Program AKSI BERGIZI , Dimana dalam Program aksi bergizi ini antara lain adalah Pemberian Vitamin A kepada para remaja, Dengan Kolaborasi Kegiatan ini, GeNRe bisa ikut berperan aktif dalam kegiatan Aksi Bergizi ini sebagai Duta Remaja dalam pencegahan stunting dari Hulu sampai Hilir.

2. Untuk Indikator Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting agar lebih optimal adalah mengoptimalkan Peran Tim Pendamping Keluarga. Tugas utama dalam kegiatan Pendampingan Keluarga adalah penyuluhan, Fasilitasi pelayanan rujukan, Fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga berisiko stunting serta surveilans terhadap kelompok sasaran **di** tingkat desa/kelurahan. Dalam optimalisasi pendampingan Keluarga Beresiko Stunting ini, pentingnya TPK mempunyai data Keluarga Beresiko Stunting untuk memastikan pendampingan kepada sasaran Keluarga Beresiko Stunting.

Untuk Terwujudnya Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia, BKKBN memiliki Indikator Kinerja tambahan sebanyak 19 Indikator yang terdapat dalam RAN PASTI PERBAN 12/2021. Dari Indikator RAN PASTI, ada 11 indikator yang mencapai sudah mencapai target, yaitu:

1. Persentase desa/kelurahan yang minimal memiliki 1 TPK, target 100%, terealisasi 100%.
2. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar., target 40%, terealisasi 71%.
3. Persentase baduta 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard, target 70%, terealisasi 86,18%.
4. Persentase balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard, target 70%, terealisasi 85,36%.
5. Persentase kab/kota yang memiliki tim audit Stunting, target 100%, terealisasi 100%.

6. Persentase pelaksanaan audit kasus *Stunting* dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun., target 100%, terealisasi 100%,
7. Persentase diseminasi hasil audit kasus *Stunting* dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun., target 100%, terealisasi 100%
8. Persentase tindak lanjut hasil audit kasus *Stunting* dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.
9. Cakupan keluarga prasejahtera beresiko *Stunting* penerima bantuan sosial, target 85%, terealisasi 95,43% (Sumber data : Pelaporan TPPS Semester 2)
10. Cakupan PUS miskin yang memperoleh Penerima Bantuan Iuran (PBI), target 85%, terealisasi 99,19% (Sumber Data : Pelaporan TPPS Semester 2)
11. Cakupan Catin/CaPUS yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah, target 60%, realisasi 100%

Dari Indikator RAN PASTI, ada 7 Indikator yang belum mencapai target, indikator tersebut adalah

1. Persentase TPK yang mendapatkan orientasi, target 100 %, terealisasi 99,64%.(Sumber Data : Hasil Orientasi TPK oleh LATBANG BKKBN DIY)
2. Persentase desa/kelurahan yang TPK nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan, target 85%, terealisasi 59,82%.
3. Persentase Ibu hamil yang menerima pendampingan, target 85%, terealisasi 79,93% (Sumber Data : Pelaporan TPPS DIY Semester 2)
4. Persentase desa prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal, target 60%, realisasi 44,44%.
5. Persentase catin/caPUS anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD), target 100%, terealisasi 96,57%
6. Cakupan PUS miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat, target 85%, terealisasi 51,71% (Sumber Data: Pelaporan TPPS DIY Semester 2)

7. Cakupan PUS yang memperoleh bantuan pangan nontunai, target 85%, terealisasi 75,40% (Sumber Data : Pelaporan TPPS DIY Semester 2)

Dari Indikator RAN PASTI, ada 1 (satu) indikator yang tidak ada data nya, indikator tersebut adalah cakupan keluarga prasejahtera penerima manfaat variasi bantuan pangan selain beras dan telur, target 85%, tidak ada data. Strategi untuk meningkatkan Terwujudnya Percepatan Penurunan Stunting, antara lain

1. Strategi melalui Penguatan Konvergensi : dilakukan peningkatan peningkatan dan kolaborasi antar lintas sektor untuk meningkatkan capaian indikator dalam RAN PASTI dan PERPRES 72/2021, Strategi Konvergensi ini sangat penting karena Percepatan Penurunan Stunting merupakan Program yang kegiatannya banyak di Lintas Sektor, sehingga butuh kerja keras dari semua pihak untuk akselerasi percepatan penurunan stunting.
2. Strategi melalui Penguatan Data. Adapun sumber data yang bisa dipakai dalam Percepatan Penurunan Stunting antara lain: E-PPGBM merupakan data rujukan untuk memantau hasil pengukuran status gizi (PJ: Dinas Kesehatan) , SIMKIA/ WEB KESGA merupakan rujukan data untuk memantau sasaran riil, khususnya ibu hamil dan ibu pascasalin (PJ: Dinas Kesehatan), SIMKAH merupakan rujukan data untuk memantau calon pengantin muslim (PJ: Kementerian Agama), ELSIMIL merupakan rujukan data untuk memantau jumlah sasaran yang didampingi oleh TPK (PJ: OPD KB/ BKKBN), Pendataan Keluarga/ SIGA merupakan basis data keluarga berisiko stunting (PJ: OPD KB/ BKKBN) , E-HDW merupakan basis data populasi tingkat desa/kelurahan (PJ: Dinas PMK/PMD) . Dari Capaian RAN PASTI banyak data yang merupakan kolaborasi dengan lintas sektor , contoh : Capaian PUS yang mengkonsumsi Tablet tambah Darah (Dinas Kesehatan), Cakupan PUS miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (Dinas Sosial) . Diharapkan dengan Penguatan Data antar lintas sektor bisa menjadikan intervensi lebih tepat kepada sasaran.
3. Strategi dalam hal Penguatan Kampanye Perubahan Perilaku , Contohnya: Edukasi terkait Kesehatan lingkungan, Edukasi Pentingnya

mengonsumsi Tablet tambah darah bagi remaja putri, Edukasi Pentingnya Memahami Siklus Hidup 1000 Hari Pertama Kehidupan , Edukasi Pentingnya ASI dan Pola Makan.

4. Strategi dalam Optimalisasi Pendampingan yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga. Optimalisasi ini harus selalu ditingkatkan melalui Orientasi TPK dan pada saat dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi . Optimalisasi peran TPK dalam pendampingan adalah melalui : Penyuluhan/ KIE kepada sasaran keluarga beresiko stunting, Fasilitas Pelayanan Rujukan Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Bantuan Sosial, melaksanakan kegiatan surveilans secara berkelanjutan. Dengan optimalisasi kegiatan ini diharapkan Tim Pendamping Keluarga bisa lebih mengetahui deteksi dini faktor Resiko stunting dan bisa meningkatkan akses pelayanan kepada sasaran.
5. Strategi Melalui Penguatan Kemitraan dan BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting). Dengan penguatan Kemitraan , diharapkan Program BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting) akan lebih berjalan lebih optimal. Program BAAS ini merupakan salah satu Program yang diluncurkan oleh BKKBN dalam percepatan penurunan stunting. BAAS merupakan Gerakan gotong royong oleh seluruh elemen bangsa dan mempercepat penurunan stunting terhadap sasaran keluarga beresiko stunting. Dengan BAAS ini, diharapkan akan muncul donator baru yang mempunyai komitmen dan berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting . Melalui Program BAAS diharapkan bisa tersinergi dengan keberadaan Kampung KB, dimana dalam Kampung KB ada Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting. Dengan munculnya donatur di Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting diharapkan penanganan keluarga beresiko stunting akan lebih optimal.

D. Evaluasi Kinerja

D.1 Review Rencana Strategis

Di dalam Renstra Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, sasaran, strategi, program dan kegiatan yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan dalam Program Bangsa Kencana. Penetapan

sasaran, indikator kinerja kegiatan dan target yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun sudah berdasarkan sasaran kinerja BKKBN Pusat Tahun 2020-2024 yang ada pada Renstra BKKBN Pusat karena Perwakilan BKKBN DIY sebagai unit pelaksana program Bangga Kencana di daerah. Penetapan target tahun 2020-2024 tersebut sudah menyesuaikan kondisi DIY dengan berdasarkan data dan capaian program Bangga Kencana di tahun 2019.

Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 perlu dilakukan review Renstra Perwakilan BKKBN DIY secara berkala. Akan tetapi review Renstra belum dilakukan karena menunggu review Renstra BKKBN yang sampai saat ini belum dilaksanakan juga. Dengan adanya kebijakan untuk fungsional peneliti yang dipindah tugaskan ke instansi lain (BRIN) pada awal tahun 2022 maka beberapa target yang ada pada Renstra Tahun 2020 - 2024 sudah tidak relevan lagi, seperti Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan Kebijakan Program Bangga Kencana di Provinsi dan output Layanan Penelitian dan Pengembangan.

D.2 Review Pengelolaan Kinerja

Pada tahun 2023 kinerja Perwakilan BKKBN DIY berdasarkan pada Perjanjian Kinerja 2023 dan juga Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 yang tercantum dalam Renstra Perwakilan BKKBN DIY. Review pengelolaan kinerja dilakukan pada 5 aspek, yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

Dari indikator kinerja yang ada pada Renstra kemudian disusun Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Dimana Rencana Kerja Tahunan tersebut digunakan sebagai Struktur Program dan Anggaran (SPA) untuk menyusun program dan anggaran serta kegiatan tahun 2023 yang tertuang dalam DIPA Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2023. Perwakilan BKKBN juga telah menyusun Matrik Keselarasan Kegiatan

dan Anggaran (MKKA) tahun 2023 serta Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja (RAPK) tahun 2023 berdasarkan pada DIPA yang telah disusun.

b. Perjanjian Kinerja

Perwakilan BKKBN DIY mendapat indikator dan target kinerja dari BKKBN Pusat yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut mengalami penyesuaian dikarenakan adanya *refocusing* anggaran.

c. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan hasil capaian kinerja tahun 2023 dengan target tahun 2023 baik yang terdapat pada Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan Renstra. Selain itu juga membandingkan capaian tahun 2023 dengan target jangka menengah (target tahun 2024) dan juga pengukuran trend capaian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Data capaian yang digunakan untuk pengukuran bersumber dari Susenas, Data PK-23, SIGA, E Monev, SMART, website Kampung KB, SAKTI serta laporan tim penilai internal. Dari pengukuran kinerja tahun 2023 dilakukan analisis hasil capaian kinerja, hanya 1 (satu) indikator yang masih dalam capaian cukup (kuning).

d. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Perwakilan BKKBN DIY dilakukan melalui aplikasi e-Monev Bappenas dan SMART Kemenkeu. E-Monev merupakan pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO, serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia. Dari 30 RO yang dilaporkan pada e- Monev Perwakilan BKKBN DIY Tahun Anggaran 2023 capaian realisasinya mencapai 100%. SMART Kemenkeu adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Pelaporan pada SMART Kemenkeu tahun 2023 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pelaporan di SMART Kemenkeu masih diinput secara manual. Untuk tahun 2023, aplikasi SMART Kemenkeu telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI Kemenkeu,

sehingga untuk pelaporan di SMART Kemenkeu tidak bisa diinput secara manual lagi. SMART Kemenkeu berfokus pada hasil atas anggaran yang telah dialokasikan dan dibelanjakan. Apakah anggaran mampu menghasilkan output dan outcome yang telah ditargetkan. Pada tingkat Satuan Kerja, terdapat empat aspek yang dinilai yaitu Penyerapan Anggaran, Konsistensi, Pencapaian keluaran, dan Efisiensi. Nilai SMART dihasilkan berdasarkan keempat aspek tersebut. Nilai SMART Perwakilan BKKBN DIY tahun 2023 adalah 84,98 dengan kategori Baik.

D.3 Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perbedaan pada jumlah komponen, bobot komponen dan pertanyaan masing-masing komponen yang dinilai, sehingga untuk membandingkan capaian hasil penilaian SAKIP dengan tahun sebelumnya tidak bisa dilakukan. Perubahan tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Perbedaan Jumlah Komponen dan Bobot Komponen

No	Komponen	Bobot (Permenpan No.12/2015)	Bobot (Permenpan No.88/2021)
1.	Perencanaan Kinerja	30	30
2.	Pengukuran Kinerja	25	30
3.	Pelaporan Kinerja	15	15
4.	Evaluasi Kinerja	10	25
5.	Capaian Kinerja	20	
TOTAL		100	100

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat beberapa kriteria baru yang spesifik fokus pada:

- Efektifitas dan efisiensi kinerja
- Perjenjangan kinerja yang memiliki kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi
- Aktivitas berdampak pada pencapaian kinerja
- Hasil evaluasi internal

Tujuan dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh nilai 69,45 atau memperoleh predikat penilaian “B”, dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.111 Hasil Penilaian SAKIP Perwakilan BKKBN DIY

NO	KOMPONEN	BOBOT	2022
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	22,8
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	18
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,9
4.	Evaluasi Kinerja	25,00	18,75
TOTAL		100	69,75
PREDIKAT			B

Nilai di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Perwakilan

BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

1. Beberapa pencapaian Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam implementasi SAKIP antara
 - a. Telah memiliki dokumen perencanaan kinerja yang lengkap dipertahankan setidaknya dalam 3 tahun terakhir dan dipublikasikan tepat waktu.
 - b. Melakukan perjanjian kerjasama dengan OPD KB kabupaten/kota se provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bentuk penerapan hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*).
 - c. Pimpinan unit kerja selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur kinerja melalui Rapat Pengendali Program (Radalgram).
2. Dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan, masih terdapat capaian Konrad yang belum *on the right track* yaitu unmeetneed
3. Dalam upaya mewujudkan capaian kinerja, unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi RAPK, e-Monev BAPPENAS, dan SMART Kemenkeu tetapi belum memiliki mekanisme yang jelas atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut
4. Dokumen Monev RAPK yang dilampirkan belum menjelaskan secara rinci hambatan, rencana kedepannya atas kegagalan suatu kegiatan.
5. Dalam dokumen laporan kinerja 2021, unit kerja belum membandingkan persentase realisasi anggaran dengan persentase rata-rata capaian kinerja pada perjanjian kinerja
6. Unit kerja belum menggunakan nilai SKP sebagai dasar pelaksanaan Open Bidding/Mutasi
7. Dalam laporan kinerja tahun 2021, terdapat beberapa indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 belum disajikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, upaya perbaikan kedepannya, target jangka menengah dan target nasional (*benchmark* kinerja).

8. Dalam upaya membangun budaya kinerja, belum terlihat adanya perubahan budaya kinerja organisasi melalui implementasi *core values* ASN Berakhlak secara spesifik pada seluruh pegawai.

Dalam rangka lebih mengefektifkan manajemen kinerja dan budaya kinerja, terdapat beberapa rekomendasi sebagai

1. Menerapkan manajemen risiko level strategis untuk memberikan kepastian bahwa tujuan organisasi (sasaran strategis) dapat dicapai secara optimal.
2. Meningkatkan kualitas monitoring atas rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2023 dengan mengidentifikasi adanya permasalahan terkait organisasi, kebijakan, strategi, aktivitas/kegiatan dan anggaran dan menindaklanjutinya sebagai upaya mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
3. Menggunakan SKP sebagai dasar pelaksanaan open bidding/mutase.
4. Menetapkan mekanisme pelaporan kinerja baik berupa SOP ataupun kebijakan lainnya sebagai dasar pelaksanaan Monev RAPK, e-Monev BAPPENAS, dan SMART Kemenkeu.
5. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Tahun 2022 dengan menyajikan perbandingan realisasi yang lebih memadai pada seluruh indikator kinerja.
6. Mengimplementasikan *core values* ASN Berakhlak secara spesifik pada seluruh pegawai sehingga dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

E. Perbaikan Perencanaan Program dan Anggaran TA 2024

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja dan memenuhi target jangka menengah Renstra adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan dengan berbasis usulan atau kebutuhan sesuai dengan prioritas, tanggung jawab dan kewenangan;
2. Sistem Pelaporan menggunakan IT yang terintegrasi agar mendapatkan data basis yang valid dan *update* sebagai bahan perencanaan dan perbaikan program dan anggaran;
3. Melakukan sosialisasi yang bersifat koordinasi, dengan melibatkan mitra kerja terkait, menyampaikan agenda rencana kegiatan yang harus dilaksanakan serta jadwal kegiatan agar kegiatan berjalan sesuai tujuan dan sasaran sehingga dapat mencapai output dan outcome yang diharapkan;
4. Mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi untuk mendapatkan masukan terkait pelaksanaan program;
5. Koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja, mulai dari pimpinan s.d. pelaksana teknis kegiatan untuk membangun komitmen bersama dengan semua stakeholder sehingga pada akhirnya akan mewujudkan pemahaman unit kerja akan pentingnya perencanaan program dan anggaran.

BAB IV PENUTUP

A. Penutup

Pelaksanaan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023, menyajikan informasi realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, disertai analisis capaian serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya sehingga dapat mencapai keberhasilan pencapaian program yang lebih tinggi dalam rangka evaluasi guna perbaikan di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran program Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis Renstra BKKBN periode tahun 2023.

A.1 Kesimpulan

1. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 yang masuk dalam kategori **Sangat Baik {Hijau}** dengan rentang pencapaian antara 94,77% s.d. 423,04% adalah:
 1. Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) per WUS (15-49 tahun)
 2. Angka prevalensi kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR*)
 3. Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need)
 4. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19*)
 5. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
 6. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun
 7. Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter

8. Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia
9. Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS
10. Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga
11. Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah
12. Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB
13. Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif
14. Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif
15. Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi
16. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk
17. Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan
18. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP
19. Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah
20. Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan
21. Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan
22. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana
23. Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana
24. Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik
25. Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)
26. Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota

27. Jumlah Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga
28. Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi penetapan data parameter pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga berencana untuk perencanaan dan evaluasi daerah pembangunan.
29. Jumlah Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan
30. Jumlah Pemda yang mendapat fasilitasi pembinaan penggerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders) KIE dalam perubahan sikap dan perilaku masyarakat serta penyediaan data dan informasi dalam sistem informasi keluarga
31. Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK
32. Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu
33. Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia
34. Jumlah Kelompok UPPKA percontohan di Kampung KB yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
35. Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan
36. Kampung KB yang mendapat fasilitasi Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana
37. Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon
38. Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting
39. Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi
40. Jumlah faskes yang mendapat fasilitasi intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting
41. Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan

42. Jumlah Sistem Data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting yang berkualitas
43. Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan
44. Jumlah Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota
45. Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi TPKTPPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota
46. Jumlah Layanan Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)
47. Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik
48. Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk Provinsi dan Kab/Kota
49. Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting
50. Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)
51. Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal yang dilaksanakan
52. Jumlah Layanan Perkantoran yang dilaksanakan
53. Jumlah Sarana dan Prasarana TIK yang diadakan
54. Jumlah sarana Internal yang diadakan
55. Jumlah kegiatan penyelenggaraan sekretariat percepatan penurunan stunting provinsi
56. Jumlah layanan humas percepatan penurunan stunting tingkat provinsi
57. Indeks ZI WBK
58. Jumlah Laporan Pengawasan Internal
59. Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting provinsi

2. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023 yang masuk dalam kategori **Cukup {Kuning}** dengan pencapaian sebesar 72,57% adalah Indeks Informasi Metode KB (*Method Information Index/MII*).

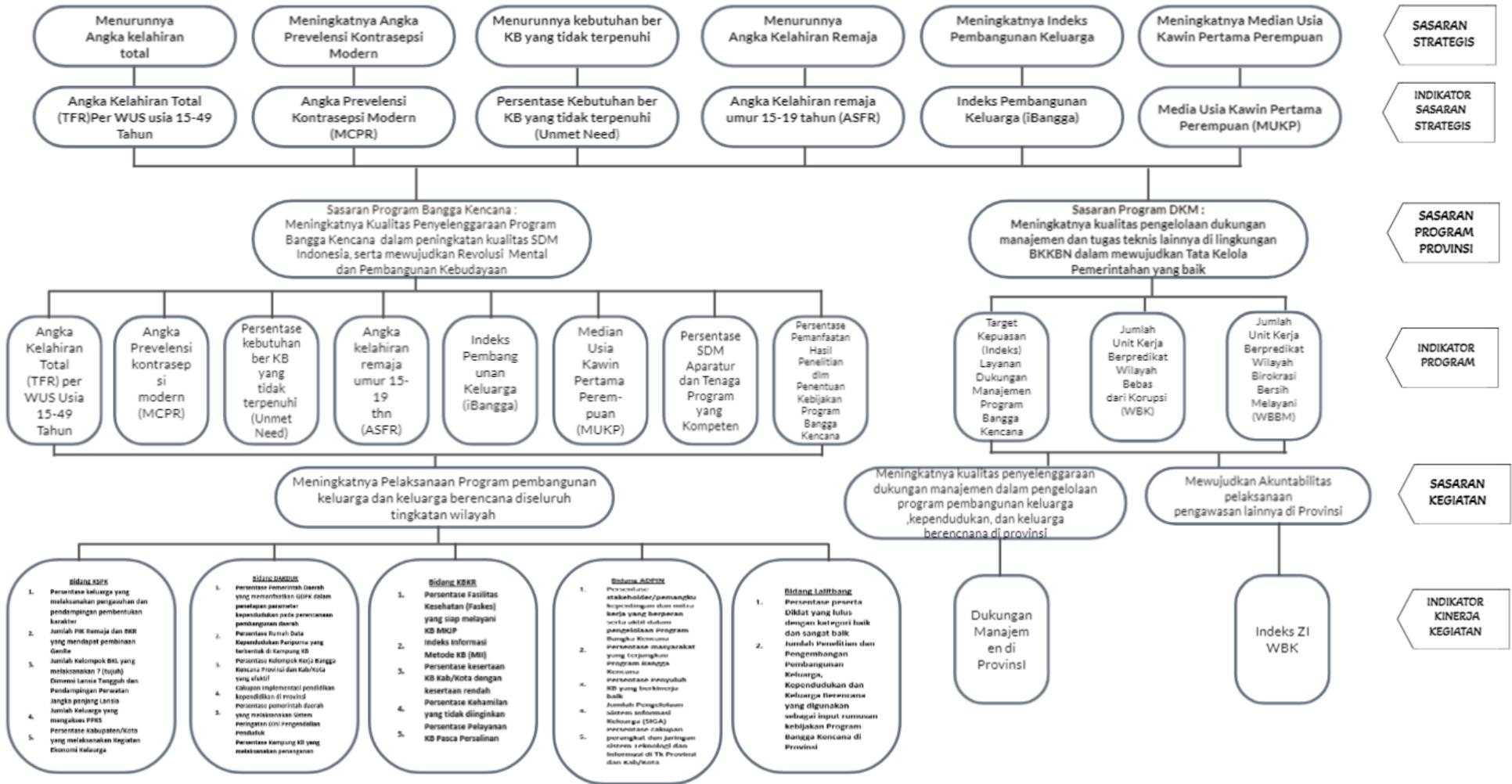
A.2 Langkah-Langkah ke Depan

Berdasarkan capaian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023, langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan Program kepada masyarakat dengan dukungan komitmen dan kebijakan dalam mempertimbangkan skema kegiatan yang berbasis Teknologi Informasi dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran;
2. Melakukan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program Bangga Kencana dan difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian *mCPR* rendah dan *Unmet Need* yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok termasuk di desa wilayah Kampung KB;
4. Mengintensifkan pelayanan KB Bergerak di wilayah DTPK melalui bhaksos pelayanan KB MKJP yang terintergrasi dengan pelayanan *papsmear*.
5. Mengintensifkan pembinaan program Bangga Kencana baik pada wilayah Kampung KB maupun wilayah di luar Kampung KB untuk mendorong capaian Program Bangga Kencana dengan mengintensifkan pemanfaatan berbagai media dalam menyebarluaskan program Bangga Kencana di wilayah DIY.
6. Pelibatan generasi millenial menjadi penting di setiap kegiatan yang ada di kelompok kegiatan karena mobilitasnya yang tinggi dan paham dalam hal Teknologi Informasi.

LAMPIRAN

POHON KINERJA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI DIY



STRUKTUR PROGRAM DAN ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI TA 2023

Perwakilan BKKBN Provinsi : Di Yogyakarta

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
	PAGU PERWAKILAN BKKBN PROVINSI			65.709.988,000	
068.DJ	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana			15.559,362,000	
3331	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi			15.559,362,000	
	Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi			1.833,999,000	
3331.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
3331.FBA.001	Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga		5 Daerah (Prov/Kab/Kota)	286,120,000	
	1.1 Jumlah Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga				
	233 Fasilitasi Pembinaan Tumbuh Kembang Balita dan Anak dalam rangka pembentukan Karakter		5 Kabupaten/Kota	98,500,000	
	a Koordinasi lintas sektor percepatan penurunan stunting di Provinsi melalui sistem pemantauan tumbuh kembang anak				
	b Fasilitasi pembinaan kelompok BKB HI				
	c Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
	234 Pengelolaan PPKS tingkat provinsi sebagai layanan publik dan fasilitasi PPKS di tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan)		1 PPKS	187,620,000	
	a Pengelolaan PPKS Provinsi sebagai pusat Rujukan				
	b Pengelolan PPKS di Balai Penyuluhan				
	c Perbanyak Materi dan Media KIE ketahanan Keluarga Rentan				
	d Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian rincian output				
3331.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga				
3331.QDE.001	Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	56,722	Keluarga	217,937,000	Tagging RPJMN/ProPN
	2.1 Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK				
	235 Promosi dan KIE 1000 HPK	56,722	Keluarga	202,209,000	
	a Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting untuk mitra kerja dan pemangku kebijakan daerah				
	b Peningkatan kapasitas pelaksana program percepatan penurunan stunting bagi kader BKB				
	c Internalisasi Pengasuhan balita dalam rangka percepatan penurunan stunting kepada masyarakat				
	236 Pelaporan pelaksanaan Promosi dan KIE 1000 HPK	1	Provinsi	15,728,000	
	a Fasilitasi Informasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting berbasis IT				
	b Pelaporan pelaksanaan Promosi dan KIE dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui SIGA dan SMART				
	237 Peningkatan komitmen dengan pemangku kebijakan dalam percepatan penurunan stunting	-		-	
	a Promosi dan KIE pengasuhan balita dalam rangka Percepatan penurunan Stunting	-		-	
	b Advokasi dan KIE percepatan penurunan stunting oleh mitra kerja	-		-	
3331.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				
3331.QDD.001	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	465	Kelompok masyarakat	892,171,000	Tagging RPJMN/ProPN
	3.1 Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu				
	238 Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	465	PIK R dan BKR	892,171,000	
	a Fasilitasi dan Pendampingan Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK Remaja dan BKR				
	b Promosi dan Pelembagaan GenRe Melalui Berbagai Media dan Momentum Strategis				
	c Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK Remaja dan BKR				
	d Apresiasi BKR dan PIK R Percontohan Segmentasi Usia (Berani Beraksi dan Berkolaborasi)				
	e Workshop Lifeskill bagi Fasilitator Kabupaten/Kota				
	f Fasilitasi Forum GenRe tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota				
	g Workshop Parenting 1001 Cara Bicara tingkat Provinsi (Lanjutan)				
	h Workshop "Tentang Kita" bagi Pengelola PIK Remaja tingkat Provinsi (lanjutan)				
	i Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreatifitas Genre				
	j Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan PKBR melalui New SIGA dan e-money Bappenas				
	k Implementasi Elisimil Tk Kab/Kota				

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN			TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
				Target	Satuan		
			l Penguatan Program Pembangunan Keluarga Bersama Mitra Kerja	0	kegiatan	-	
			m Momentum Perisa Hati Catin (PemeriksaanKesehatan) Catin Bersama TNI/Polri mitra strategis lainnya				
			n Pentaloka Saka Kencana Tk. Nasional				
			o Promosi Saka Kencana dalam kegiatan Kepramukaan (Raimuna, Hari Pramuka, Hut Saka Kencana)				
3331.QDD.002			Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	143	Kelompok Masyarakat	301,700,000	Tagging RPJMN/ProPN
	4.1		Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia				
		239	Penguatan Pelaksanaan tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di Kelompok BKL	143	Kelompok BKL	301,700,000	
		a	Pengembangan dan Perbanyak Materi dan Media Kelanjutusiaan				
		b	Sosialisasi 7 Dimensi Lansia Tangguh				
		c	Orientasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia				
		d	Pelaksanaan sekolah lansia	1	Sekolah lansia		
3331.QDD.004			Kelompok UPPKA di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	5	Kelompok Masyarakat	136,071,000	Tagging RPJMN/ProPN
	6.1		Jumlah Kelompok UPPKA di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				
		241	Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi Keluarga Akseptor KB dan Stunting di Kampung KB	5	Kelompok Masyarakat	136,071,000	
		a	Sosialisasi kebijakan PEK Nasional Pro PN				
		b	Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				
		c	Pengembangan Model Kemitraan, Permodalan, Pemasaran/Pilot Project PEK Peduli Stunting				
		d	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				
3331.QDD.005			Kelompok BKB yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam mendukung percepatan penurunan stunting	-	Kelompok Masyarakat	-	Tagging Stunting
	7.1		Jumlah kelompok BKB yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam mendukung percepatan penurunan stunting				
		242	fasilitasi pembinaan percepatan penurunan stunting melalui kelompok BKB	-	Kelompok Masyarakat	0	
		a	orientasi penggunaan KKA di kelompok BKB (orientasi 1 hari)	-	Kelompok BKB (di 12 Provinsi)		
		b	Pengembangan BKB CoE	-	Kab/Kota (12 Prov)		
		c	kelas pengasuhan untuk percepatan penurunan stunting tingkat desa di kelompok BKB	-	Desa (di 12 Provinsi)		
3331.QDC			Fasilitasi dan pembinaan masyarakat				
3331.QDC.001			Remaja usia 15-19 tahun yang mendapatkan edukasi gizi dan anemia dalam mendukung percepatan penurunan stunting	0	Remaja	0	Tagging Stunting
	7.1		Jumlah remaja usia 15-19 tahun yang mendapatkan edukasi gizi dan anemia				
		243	Edukasi Gizi dan Anemia kepada Remaja Usia 15-19 Tahun	0	Remaja	0	
		a	Pengadaan materi/media Edukasi				
		b	Workshop untuk Forum GenRe dan PIK R di Tk. Provinsi				
		c	Edukasi Oleh Forum GenRe dan PIK R di 12 Provinsi				
		d	Apresiasi Forum GenRe dan PIK R terbaik di 12 Provinsi				
Bidang DALDUK Perwakilan BKKBN Provinsi						1,401,294,000	
3331FBA			Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
3331.FBA.002			Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	2	Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	302,762,000	
	1.1		Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk				
		244	Peningkatan kualitas Bimbingan Teknis penyusunan profil/parameter proyeksi penduduk serta advokasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan	5	Kab/Kota	24,000,000	
		a	Pendampingan penyusunan GDPK 5 Pilar (pembentukan tim koordinasi penyusunan dan pelaksanaan GDPK 5 Pilar penyusunan rencana anggaran dan kegiatan penyusunan GDPK)				
		b	Pendampingan pengolahan data dan analisis pengembangan kebijakan dalam GDPK 5 Pilar				
		245	Koordinasi pemanfaatan dan pengintegrasian data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah	5	Kab/Kota	27,970,000	
		a	Fasilitasi penetapan data parameter kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (RPJMD/Renstrada/RKPD/Renja Perangkat Daerah bidang Kependudukan) dalam kerangka Satu Data Indonesia				
		b	Penyusunan Profil Bangsa Kencana berdasarkan Siklus Hidup	1	Provinsi	1	

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN	
		Target	Satuan			
	246	Peningkatan kualitas bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah	5	Kab/Kota	21,530,000	
	a	Pendampingan penyusunan perencanaan program Bangga Kencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/Renstrada/RKPD/Renja Perangkat Daerah bidang Kependudukan)				
	b	Telaah dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/Renstrada/RKPD/Renja Perangkat Daerah bidang Kependudukan)				
	247	Peningkatan Sistem Registrasi Rumah Data Kependudukan	91	Rumah DataKu di Kampung Keluarga Berkualitas	31,850,000	
	a	Sosialisasi Sistem Registrasi Rumah Data Kependudukan				
	248	Penguatan Tata kelola Rumah Data Kependudukan	86	Rumah DataKu di Kampung Keluarga Berkualitas	24,000,000	
	a	Fasilitasi teknis manajemen data pada Rumah Data Kependudukan				
	b	Fasilitasi teknis tata kelola Rumah Data Kependudukan berbasis aplikasi				
	249	Peningkatan Kualitas Penggerakan Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/kota yang efektif	-	Kab/kota	-	
	a	Pengembangan bahan pembinaan Kelompok Kerja Bangga Kencana				
	b	Pengelolaan Forum Komunikasi Kelompok Kerja Bangga Kencana				
	c	Implementasi sistem monitoring dan evaluasi Kelompok Kerja Bangga Kencana yang efektif				
	d	Fasilitasi Pembinaan dalam penyusunan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan				
	250	Pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di tingkat provinsi dan kab/kota (formal non formal dan informal)	5	Kab/kota	45,000,000	
	a	Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Sekolah Siaga Kependudukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota	5	Kab/kota		
	b	Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Mahasiswa Penting di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	5	Kab/kota		
	c	Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Balai Diklat/ASN Peduli Kependudukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	Kab/kota		
	d	Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Saka Kencana di tingkat Provinsi	1	Kab/kota		
	e	Fasilitasi pembentukan PESAT (Pojok Edukasi Kependudukan untuk Masyarakat) di Kampung KB	1	Kampung KB		
	f	Monev penyelenggaraan Dakdikduk (Diskusi Asyik Pendidikan Kependudukan) di Kampung KB	1	Kampung KB		
	g	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penata Kependudukan dan KB	5	Kab/kota		
	251	Penguatan internalisasi Kebijakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Kabupaten/Kota	2	Kab/Kota	79,412,000	
	a	Workshop Perumusan Isu Strategis Pengendalian Penduduk di Provinsi				
	b	Sosialisasi Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk untuk OPD Kab/Kota				
	c	Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Dampak Kependudukan Tingkat Provinsi dan Kab/Kota				
	d	Monitoring dan Evaluasi Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk				
	252	Penguatan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kampung KB dan Bimbingan teknis Kampung KB	4	Kab/Kota	49,000,000	
	a	Workshop Perumusan Isu Kependudukan di Kampung KB				
	b	Pengembangan Pengelolaan Kampung KB				
	c	Momentum Hari Kependudukan Dunia di Provinsi Bersama Mitra Kerja				
	d	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pengelolaan Kampung KB				
3331.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat					
3331.QDD.006	Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB		66	Kelompok Masyarakat	597,432,000	Tagging RPJMN/ProPN
	2.1	Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan				
	253	Peningkatan Kualitas Rumah Data Kependudukan Paripurna	66	Kelompok Masyarakat	597,432,000	
	a	Orientasi Pengelola Rumah Data Kependudukan				
	b	Fasilitasi Pengumpulan dan Updating Data di rumah data kependudukan				
	c	Pembentukan Rumah Data Kependudukan yang terintegrasi dengan Kampung KB	264	Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga di Kampung KB		

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
3331.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
3331.UBA.001	Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	5	kab/kota	226,000,000	Tagging RPJMN/ProPN
	3.1 Kampung KB yang mendapat fasilitasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana				
	254 Fasilitasi Intensifikasi Kegiatan Bangga Kencana di Kampung KB	75	Kampung KB	180,800,000	
	a Konsolidasi Nasional Pengelolaan Kampung KB				
	b Fasilitasi dan Pembinaan Kampung KB				
	c Penguatan Kampung KB				
	255 Fasilitasi Ekstensifikasi Kegiatan Bangga Kencana di Kampung KB	352	Kampung KB	45,200,000	
	a Orientasi Pengelolaan Kampung KB				
3331.UBA.002	Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting	5	kab/kota	125,100,000	Tagging Stunting
	4.1 Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting				
	256 Kegiatan Pemberdayaan Percepatan Penurunan Stunting di Kampung KB	5	kab/kota	125,100,000	
	a Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting				
3331.UBA.003	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi pengembangan DASHAT di kampung KB pada 12 Provinsi prioritas	-	kab/kota	-	Tagging Stunting
	5.1 Jumlah kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas stunting yang mendapatkan fasilitasi pengembangan DASHAT di kampung KB				
	257 fasilitasi pengembangan DASHAT di kampung KB	-	kab/kota	-	
	a Penguatan Penyelenggaraan DASHAT di Kampung KB				
3331.UBA.004	Fasilitasi dan koordinasi pendampingan perguruan tinggi/mahasiswa kepada pmda pemprov kab/kota	-	kab/kota	-	Tagging Stunting
	6.1 Jumlah pemerintah daerah yang mendapat fasilitasi pendampingan perguruan tinggi/mahasiswa kepada pmda pemprov kab/kota				
	258 pendampingan perguruan tinggi/mahasiswa kepada pmda pemprov kab/kota	-	kab/kota	-	
	a fasilitasi dan koordinasi pendampingan perguruan tinggi kepada 12 provinsi prioritas stunting				
3331.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan				
3331.PBG.001	Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi	2	Rekomendasi kebijakan	150,000,000	Tagging Stunting
	7.1 Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi		Rekomendasi kebijakan		
	259 Studi kasus dan pembelajaran (provinsi)	2	laporan	150,000,000	
	a Penyusunan Policy Brief bersama Mitra Perguruan Tinggi				
	b Workshop dan Diseminasi Studi kasus dan pembelajaran baik Stunting di Provinsi				
Bidang KBKR Perwakilan BKKBN Provinsi				4,282,720,000	
3331.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				
3331.BDB.001	Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	430	Lembaga	271,720,000	
	1.1 Jumlah Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan				
	260 Pengelolaan kebijakan dan strategi peningkatan pelayanan KB di fasyankes	430	Lembaga (Fasilitas Kesehatan)	24,480,000	
	a Perencanaan Kebutuhan dan Monitoring MIM Tools Alat dan Obat Kontrasepsi				
	b Fasilitasi kesiapan fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB (SDM Sarana dan Alokasi)				
	c Penguatan Pelayanan KB di PMB dan Lini Lapangan				
	261 Penyediaan fasilitasi peningkatan kompetensi bagi Tenaga Kesehatan KB	281	Tenaga Kesehatan (Kumulatif)	43,100,000	
	a Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pelayanan KB Melalui Pre Service Training				
	b Forum Peningkatan Kualitas Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja				
	c Evaluasi dan Monitoring Pre Service Training				
	d Monitoring Audit Kasus Stunting				
	e Fasilitasi tenaga kesehatan dalam peningkatan kompetensi diri				
	262 Fasilitasi Peningkatan dan Pembinaan Kesertaan KB Pria	2	Kegiatan	23,400,000	
	a Penguatan Penyediaan 1 tim vasektomi di tiap Kabupaten dan Kota melalui Refreshing Dokter Terlatih MOP	1	Kegiatan		
	b Lomba Motivator dan Kelompok KB Pria	1	Kegiatan		

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN	
		Target	Satuan			
	263	Bimbingan dan Fasilitasi Ayoman Komplikasi dan Kegagalan KB MKJP serta koordinasi penggerakan KB MKJP di Kab/Kota	5	Kab/Kota	38,000,000	
	a	Koordinasi dan evaluasi penggerakan pelayanan KB MKJP serta Ayoman Komplikasi dan Kegagalan	2	Kegiatan		
	b	Fasilitasi dan pembinaan Dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB MKJP	5	Kab/Kota		
	264	Integrasi Penggarapan Program dan Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja di Wilayah Khusus	1	Laporan	47,400,000	
	a	Integrasi penguatan kemitraan dalam rangka penggarapan KBKR di wilayah dan sasaran khusus pada kegiatan momentum	3	Mitra Kerja		
	b	Analisis dan evaluasi capaian kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	1	Laporan		
	265	Penurunan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) Melalui Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	4	Kab/Kota	47,670,000	
	a	Pembinaan kesehatan reproduksi bagi remaja kelompok risiko tinggi (anak tidak sekolah)				
	b	Penguatan koordinasi bagi stakeholder dan mitra kerja dalam pembinaan remaja kelompok risiko tinggi (anak tidak sekolah)				
	c	Ajang kreatifitas membuat komik peduli kesehatan reproduksi dan stunting (AkuKamu 2023)				
	d	Pengembangan promosi kesehatan reproduksi untuk mencegah KTD pada remaja dan ibu berisiko bagi PKB/PLKB				
	266	Pembinaan kesertaan KB pascapersalinan di fasilitas kesehatan	23,852	PB KB PP	47,670,000	
	a	Pembinaan tenaga pendamping ibu hamil dan KB pascapersalinan dalam rangka penurunan stunting				
	b	Optimalisasi peran serta stakeholder dan mitra dalam penurunan Angka kematian ibu melalui KBPP				
	c	Fasilitasi dan Integrasi Baksos Kesehatan Reproduksi Pada Kegiatan Momentum Pelayanan KB				
	d	Penyelarasan peningkatan kapasitas pengelola kespro dalam mendukung penurunan stunting				
3331.QEI	Bantuan Lembaga					
3331.QEI.001	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)		430	Lembaga	3,716,448,000	Tagging RPJMN/ProPN
	2.1	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon				
	267	Peningkatan Kualitas Pelayanan KB MKJP bagi faskes yang teregister (termasuk pembinaan evaluasi dan ketersediaan alokon)	430	Fasilitas Kesehatan	3,716,448,000	
	a	Pengadaan Alokon				
		IUD	18,475	set	243,870,000	
		Implan 2 Batang	13,480	set	2,023,348,000	
		Implan 1 Batang	880	set	167,200,000	
		Obat Suntik KB Tiga Bulanan 1 ml	116,460	vial	559,008,000	
		Obat Suntik KB Kombinasi 1 ml	-	vial	-	
		Syringe	116,460	buah	174,690,000	
		Pil Progesterin	-	cycle	-	
		Pil KB Kombinasi	-	cycle	-	
		Kondom	-	lusin	-	
		BMHP	14,360	set	374,222,000	
		Administrasi Pengadaan			174,110,000	
3331.QDB	Fasilitasi dan pembinaan lembaga					
3331.QDB.001	Faskes yang mendapatkan Intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting dan mendukung penurunan AKI		430	Lembaga	197,552,000	Tagging Stunting
	3.1	Jumlah faskes yang mendapat fasilitasi intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting				
	268	Intensifikasi pelayanan KB di fasyankes	430	Faskes	197,552,000	
	a	Peningkatan perluasan akses dan intensifikasi pelayanan KB di fasyankes				
	b	Orientasi Peningkatan Kapasitas Pelayanan KB bagi Tenaga Kesehatan di Fasyankes, Jaringan dan Jejaring				
	c	Monitoring dan Evaluasi Intensifikasi Pelayanan KB di Fasyankes				
	d	Peningkatan Pelayanan KB di RS		RS		
	e	Intensifikasi Pelayanan KBKR bersama Mitra Kerja pada Kegiatan Momentum		gerak/tahun		
3331.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah					
3331.UBA.005	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan		5	Kab/Kota	97,000,000	Tagging Stunting
	4.1	Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan				
	269	Penguatan peran pemerintah daerah dalam pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan	5		97,000,000	
	a	Pertemuan Intensifikasi pendampingan ibu hamil dan Ibu pascapersalinan				
	b	Penguatan koordinasi pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan dalam rangka penurunan stunting				
	c	Orientasi peningkatan kapasitas pendamping ibu hamil dan ibu pascapersalinan tentang stunting				
	d	Monitoring dan evaluasi intensifikasi pendampingan ibu hamil dan Ibu pascapersalinan				

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi				5,112,295,000	
3331.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
3331.FBA.003	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi pembinaan pergerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders) KIE serta penyediaan data dan informasi keluarga	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	180,551,000	Provinsi
1.1	Jumlah Pemda yang mendapat fasilitasi pembinaan pergerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders) KIE dalam perubahan sikap dan perilaku masyarakat serta penyediaan data dan informasi dalam sistem informasi keluarga				
	270	Peningkatan Peran Serta Pemangku Kepentingan dalam Penggerakan Program Bangga Kencana	5	jumlah mitra aktif	28,755,000
	a	Penilaian Penghargaan Bidang Bangga Kencana bagi Mitra Kerja dalam momentum daerah dan nasional			
	b	Fasilitasi Kunjungan Kerja Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Daerah			
	c	Fasilitasi Pelaksanaan Bakti Sosial KB Kesehatan di Daerah (TMKK dll)			
	d	Temu Kerja stakeholder dan dinas pengendalian penduduk dan KB Tk Provinsi dalam konvergensi Pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting			
	e	Fasilitasi naskah kerja sama di Daerah			
	f	Pelaksanaan Program Bangga Kencana bersama Stakeholder (TNI/POLRI/Mitra Strategis Lainnya)			
	271	Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Program Bangga Kencana	10	jumlah mitra aktif	17,374,000
	a	Rapat Koordinasi Teknis Kemitraan di Daerah			
	b	Fasilitasi Pelaksanaan konvergensi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja di Daerah			
	272	Pengembangan Kebijakan dan dukungan Advokasi Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	1	Dokumen	15,790,000
	a	Pengembangan Desain Materi Promosi KIE Program Bangga Kencana Berdasarkan Segmentasi Sasaran dan Wilayah			
	273	Peningkatan promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak Media Elektronik Media Online serta Media Luar Ruang	4	Kegiatan	15,584,000
	a	Promosi KIE Program Bangga Kencana Melalui Berbagai Media			
	b	Sosialisasi Program Bangga Kencana Melalui Kegiatan Momentum Strategis			
	274	Peningkatan Kualitas Penggerakan Tim Advokasi Terpadu Program Bangga Kencana	4	Tim Advokasi provinsi dan Kab/Kota	9,585,000
	a	Fasilitasi dan penguatan Pokja Advokasi dalam Pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting			
	275	Pembinaan dan evaluasi Kinerja Penyuluh KB/PLKB serta Penguatan Kinerja IPeKB	141	Jumlah Penyuluh KB/PLKB	28,755,000
	a	Pembinaan Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Penyuluh KB/PLKB			
	b	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Penyuluh KB			
	c	Penilaian Kinerja Penyuluh KB/PLKB			
	d	Fasilitasi Penguatan Pelayanan KIE & Konseling ("Halo Penyuluh KB")			
	e	Fasilitasi Koordinasi dan Penguatan kinerja IPeKB dalam penurunan AKI DO UN dan stunting			
	276	Pembinaan Peningkatan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (PPKBD dan Sub PPKBD)	3,536	Jumlah PPKBD/Sub PPKBD	15,375,000
	a	Fasilitasi Koordinasi Pengorganisasian Tim Pendamping Keluarga Stunting bersama K/L Terkait			
	b	Penguatan Gerakan Pendampingan Keluarga			
	c	Penguatan Peningkatan Kapasitas dan Penilaian Teladan Tenaga Lini Lapangan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting			
	277	Pembinaan Penguatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional	43	kecamatan	15,375,000
	a	Penguatan Integrasi Mekanisme operasional dan rembug stunting tingkat Kabupaten/kota			
	b	Fasilitasi adaptasi Desa zero stunting			
	c	Bimbingan Teknis mekanisme Operasional bagi Pengelola Program tingkat Kabupaten/Kota			

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN		TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
			Target	Satuan		
	279	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Promosi KIE Program Bangga Kencana	1	Provinsi	14,790,000	
	a	Monitoring dan evaluasi sosialisasi promosi KIE Program Bangga Kencana				
	280	Peningkatan Kualitas layanan STIK dan Pengelolaan PPID	2	laporan (Kaltara 1 masuk Kaltim	19,168,000	1 Laporan Penguatan sarana dan prasarana TI/ Pengelolaan Sarana IT 2 Laporan pengelolaan PPID dan Pengelolaan Perpustakaan
	a	Penguatan Sarana dan prasarana pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi				Pembelian sarana penunjang internet kantor
	b	Koordinasi Teknis Pengelolaan PPID Program Bangga Kencana				1 penyusunan laporan semester 2 tahunan PPID perwakilan prov
	c	Penyebarluasan Informasi Program Bangga Kencana Melalui Media Elektronik				1 koordinasi teknis Penyusunan Konten website dengan pemerintah daerah 2 Honor pengelola website provinsi
	d	Pengelolaan Perpustakaan				1 pembelian buku/langganan buku digital 2 stok opname buku perpustakaan per semester
3331.QMA	Data dan Informasi Publik					
3331.QMA.001	Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)		1	layanan	3,307,454,000	Tagging Prioritas K/L
	2.1	Jumlah Layanan Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)				
	281	Peningkatan kualitas cakupan pengelolaan serta pemanfaatan basis data keluarga Indonesia	5	Kab/Kota	3,307,454,000	
	a	Cetak Formulir PPK-23	79,469	keluarga	31,788,000	
	b	Operasional Pencatatan dan Pelaporan PPK-23	397,343	keluarga	2,304,596,000	
	c	Monitoring /Pengamatan Pelaksanaan PPK-23	5	kab/kota	14,550,000	
	d	Pengumpulan dan Verifikasi Hasil PPK-23	47	kecamatan sampel	11,280,000	
	e	Operasional Supervisor	141	desa	31,725,000	
	f	Operasional Manajer	47	kecamatan sampel	51,700,000	
	g	Workshop PPK-23 bagi Kader	2,649	kader	588,078,000	
	h	Workshop PPK-23 bagi Manajer	47	kecamatan sampel	4,700,000	
	i	Workshop PPK-23 bagi supervisor	141	desa	14,100,000	
	j	ATK Pengelolaan PPK-23 Kecamatan	47	kecamatan sampel	11,750,000	
	k	Pengiriman sarpras PPK-23	47	kecamatan sampel	9,400,000	
	l	PPK-23 Kit	2,649	kader	132,450,000	
	m	Penyusunan Laporan statistik	1	provinsi	18,000,000	
	n	Cetak Formulir New SIGA	31,330	formulir (K/0 dan R/I)	22,207,000	
	o	Regional Pemutakhiran PK-22	1	provinsi	24,000,000	
	p	Rekonsiliasi data PK New SIGA Tk Provinsi	5	kab/kota	9,500,000	
	q	Rekonsiliasi SIGA YAN KB Tk Kab kota	140	fasyankes	13,960,000	
	r	Rekonsiliasi SIGA DALAP Tk Kab kota	47	kecamatan	5,170,000	
	s	Monev New SIGA PROVINSI	5	kab/kota	8,500,000	
3331.QMA.002	Penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting		1	Layanan	258,120,000	Tagging Stunting
	3.1	Jumlah Sistem Data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting yang berkualitas				
	282		1	Layanan	258,120,000	
	a	Register	234	Desa/Kel	23,400,000	
	b	Operasional Verifikasi Kecamatan	78	kecamatan	11,700,000	
	c	Pemutakhiran data Keluarga Resiko Stunting di desa/kelurahan				
		- Pengolahan Data di Tk. Kecamatan	78	kecamatan	23,400,000	
		- Pengumpulan Data Desa	234	Desa/Kel	107,640,000	
	d	Workshop/Orientasi verifikasi dan validasi				
		- Tk. Provinsi	5	Kab/Kota	11,000,000	
		- Tk. Kabupaten/Kota	78	Kecamatan	8,970,000	
		- Kader TPK	234	Desa	53,820,000	
	e	Verifikasi Provinsi	3	Kab/Kota	6,000,000	
	f	Verifikasi Kabupaten/Kota	55	Kecamatan	8,190,000	
	g	Rapat Koordinasi Data Lintas Sektor	-		4,000,000	

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN		TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
			Target	Satuan		
3331.QMA.003	verifikasi dan validasi data keluarga sasaran konvergensi di 12 provinsi			- Layanan		Tagging Stunting 12 Provinsi Prioritas: Jabar, Jateng, Jatim, Aceh, Sumut, Kalbar, Kalsel, Sultra, NTB, NTT, Banten, Sulbar
	4.1	Jumlah Data keluarga sasaran konvergensi di 12 Provinsi				
		283 verifikasi dan validasi data keluarga sasaran konvergensi di 12 provinsi		- Layanan	-	
		Operasional Verivali di 12 Provinsi				
		a Register		- Desa/Kel	-	
		b Pemutakhiran data Keluarga Resiko Stunting di desa/kelurahan				
		- Pengolahan Data di Tk. Kecamatan		- kecamatan	-	
		- Pengumpulan Data Desa		- Desa/Kel	-	
		c Workshop/Orientasi verifikasi dan validasi Kader TPK		- Desa/Kel	-	
		d Forum Data Stunting Tingkat Pusat		- provinsi	-	
3331.QMB	Komunikasi publik					
3331.QMB.001	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota		3	Layanan	375,000,000	Tagging Stunting
	5.1	Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan				
		284 Kampanye Percepatan Penurunan Stunting	3	Layanan	375,000,000	
		a Kampanye tingkat provinsi	3	Kegiatan	375,000,000	
		>> KIE Pencegahan Stunting Lini Atas				
		- Penayangan TV Lokal (PSA/Talkshow/Built In Segmen)				
		- Penayangan Radio Lokal (PSA/Talkshow/Adlibs/Airtime)				
		>> KIE Pencegahan Stunting Lini Tengah				
		- KIE melalui Media Online				
		- KIE melalui Media Sosial				
		>> KIE Pencegahan Stunting Lini Bawah				
		- Produksi Multimedia Pencegahan Stunting				
		- Momentum strategis / KIE Interpersonal kepada Kelompok/ Komunitas				
		- Media Luar Ruang (Billboard/Videotron)				
		- Public Figure / Influencer				
		b Kampanye PPS melalui Kegiatan Momentum Bersama TNI/POLRI/Mitra Strategis lainnya				
		c Kampanye tingkat kab/kota	-	Kegiatan	-	
		>> KIE Pencegahan Stunting Lini Atas				
		- Penayangan TV Lokal (PSA/Talkshow/Built In Segmen)				
		- Penayangan Radio Lokal (PSA/Talkshow/Adlibs/Airtime)				
		>> KIE Pencegahan Stunting Lini Tengah				
		- KIE melalui Media Online				
		- KIE melalui Media Sosial				
		>> KIE Pencegahan Stunting Lini Bawah				
		- Produksi Multimedia Pencegahan Stunting				
		- Momentum strategis / KIE Interpersonal kepada Kelompok/ Komunitas				
		- Media Luar Ruang (Billboard/Videotron)				
		- Public Figure / Influencer				
		d Promosi & KIE Program Percepatan Penurunan Stunting Di Wilayah Khusus		- Kegiatan	-	
		- Promosi & KIE kepada masyarakat di wilayah khusus				
		e Monitoring Evaluasi dan Pelaporan				
		- Belanja Bahan				
		- Belanja Barang Operasional COVID 19				
		Kampanye Percepatan Penurunan Stunting Melalui Media				

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
3331.PEA	Koordinasi				
3331.PEA.001	Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	6	kegiatan	791,170,000	Tagging Stunting
	6.1 Jumlah Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota				
	285 SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota				
	a SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Provinsi	5		400,000,000	
	b SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Kab/kota	78		391,170,000	
3331.PEA.002	Penyelenggaraan koordinasi intensifikasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota pada 12 Provinsi Prioritas	-	kegiatan	-	Tagging Stunting
	7.1 Jumlah koordinasi Intensifikasi SATGAS PPS pada 12 Provinsi prioritas				
	286 Intensifikasi SATGAS PPS pada 12 Provinsi prioritas	-	kegiatan	-	
	a fasilitasi dan koordinasi satgas percepatan penurunan stunting kepada 12 provinsi prioritas stunting				
	- Forum Rapat Koordinasi Teknis				
	- Fasilitasi Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi Satgas Percepatan Penurunan Stunting				
3331.UAE	Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan				
3331.UAE.001	Laporan Monitoring dan evaluasi TPKTPPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota	1	Laporan	200,000,000	Tagging Stunting
	8.1 Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi TPKTPPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota				
	287 Monitoring dan Evaluasi TPKTPPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota	1	Laporan	200,000,000	
	a Monitoring dan evaluasi TPK				
	b Monitoring dan evaluasi TPPS				
	c Monitoring dan evaluasi SATGAS				
	d Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi				
Bidang LALITBANG Perwakilan BKKBN Provinsi				2,929,054,000	
3331.DCJ	Pelatihan Bidang Sosial				
3331.DCJ.001	SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk Provinsi dan Kab/Kota	53	orang	89,000,000	
	1.1 Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk Provinsi dan Kab/Kota				
	288 Pelatihan Teknis Program Bangga Kencana	53		89,000,000	
	a Pelatihan Teknis BKB Emas	25	orang		
	b Pelatihan Teknis Bangga Kencana bagi PKB Non PNS	28	orang		
	c Orientasi Teknis bagi Toma Toga Toda dan Mitra Kerja				
	d Identifikasi Kebutuhan Diklat				
	e Pengembangan Materi dan Media Pembelajaran				
	f Penjaminan Mutu Diklat				
	g Penyusunan Tata Laksana Diklat				
	h Fasilitasi Visitasi Penilaian Akreditasi Balatbang				
	i Pembinaan SDM Provinsi				
	j Fasilitasi Evaluasi Pasca Diklat				
3331.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan				
3331.SCM.001	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	5,576	orang	2,840,054,000	Tagging Stunting
	2.1 Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting				
	290 Pelatihan pelayanan kontrasepsi dan orientasi TPK	5,576	orang	2,840,054,000	
	a Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20	orang	-	
	b Pelatihan/Orientasi Tim Pendamping Keluarga	5,556	orang	-	
3331.SCM.002	Pelatihan bagi pelaksana PPKS dalam percepatan penurunan stunting	-	orang	-	Tagging Stunting
	3.1 Jumlah Pelatihan bagi pelaksana PPKS dalam percepatan penurunan stunting				
	291 Pelatihan bagi Tenaga Program	-	orang	-	
	a Pelatihan bagi pelaksana PPKS dalam percepatan penurunan stunting				

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
068.WA	Program Dukungan Manajemen			50,150,626,000	
5297	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi				
Bidang Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi				49,994,189,000	
5297.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
5297.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	364,500,000	
1.1	Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal yang dilaksanakan				
	293 Pengelolaan Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	1	Kegiatan	52,500,000	
	a	Fasilitasi bantuan hukum			
	b	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan NSPK			
	c	Pelaksanaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK)			
	d	Pelaksanaan Pelayanan publik			
	294 Pengelolaan Keuangan dan BMN	1	Satker	134,000,000	
	a	Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester I dan II (Tk Pusat dan provinsi)			
	b	Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan anggaran thd pejabat perbendaharaan pengelola BMN dan petugas SAI Tk Prov dg Mitra Kerja Terkait			
	c	Bimbingan Teknis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)			
	d	Akselerasi Percepatan Pelaporan DAK Sub Bid KB Fisik dan Non Fisik bagi TIM Pengendali DAK Kab/Kota Monitoring DAK			
	e	Pelaksanaan Sosialisasi DAK Regional			
	f	Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan BMN			
	g	Penatakelolaan barang persediaan dan pengelolaan gudang alkon serta Stock Opname alkon gudang provinsi			
	h	Distribusi Alokasi ke Gudang Kab/Kota (distribusi dinamis dan buffer)			
	i	Pengelolaan BMN berupa sarana kerja (Labelisasi BMN existing dan manajemen daftar barang ruangan)			
	j	Pengelolaan BMN dalam kondisi Rusak Berat (manajemen penghapusan Barang Milik Negara)			
	k	Penyusunan Dokumen RKBMN satuan Kerja			
	l	Penyelenggaraan SPIP			
	m	Pengendalian BMN dalam proses hukum dalam proses pembuatan dokumen kepemilikan (IMB Sertifikat tanah) serta dalam sengketa yang belum masuk ke ranah hukum			
	n	Manajemen pengendalian atas BMN yang berpotensi Idle			
	o	Evaluasi pengelolaan BMN pengendalian atas data hasil Revaluasi BMN			
	p	Inventarisasi BMN Nasional			
	295 Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	3	Kegiatan	71,000,000	
	a	Pengadaan ASN di lingkungan BKKBN	1	Kegiatan	
	b	Asesmen ASN	1	Kegiatan	
	c	Orientasi CASN			
	d	Dukungan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	Kegiatan	
	296 Pengelolaan perencanaan Program dan Anggaran	1	Kegiatan	107,000,000	
	a	Pemaduan Perencanaan Program dan Anggaran KKBPK Tk Provinsi dan Kab/Kota (Korenda)			
	b	Fasilitasi sinkronisasi program dalam forum Rakortek/Musrenbangda Provinsi			
	c	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan DAK Sub Bidang KB - (termasuk fasilitasi melalui aplikasi Krisna DAK)			
	d	Penyusunan data basis perencanaan program dan anggaran Provinsi dan Kab/Kota			
e	Konsolidasi Perencanaan program KKBPK Pusat dan Provinsi (e-KOREN I / KOREN II)				
f	Forum sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran (koordinasi lintas Bidang dan lintas sektor - Prov dan Kab/Kota)				
g	Rapat Koordinasi Teknis pembahasan usulan DAK subbidang KB Kab Kota				
h	Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN		TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
			Target	Satuan		
5297.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					
5297.EBA.994	Layanan Perkantoran		1	Layanan	48,622,914,000	
	2.1	Jumlah Layanan Perkantoran yang dilaksanakan				
		001 Gaji dan Tunjangan perwakilan BKKBN Provinsi	-	Layanan	46,051,508,000	
		a Pembayaran Gaji dan Tunjangan				
		002 Operasional dan pemeliharaan kantor	-	Layanan	2,571,406,000	
		a Langganan Daya dan Jasa (Listrik telp dan air PDAM) Kantor BKKBN Pusat Rumah Jabatan Gudang dan Mess				
		b Layanan Jasa Sewa Mesin Fotocopy				
		c Langganan Koran Majalah Air Minum dan TV Kabel				
		d Pembayaran PBB/Pembuatan Sertifikat				
		e Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 4 dan 6				
		f Honorarium Jasa Perorangan Kontraktual				
		g Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
		h Pemeliharaan Kendaraan				
		i Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
		j Honor Pengelola Anggaran Satuan Kerja				
		k Dukungan layanan Persuratan dan Paket Kedinasan				
		l Dukungan Layanan Kearsipan				
		m Pembelian ATK				
		n Layanan Jamuan Tamu dan Mitra kerja				
		o Layanan Rapat Pengendalian Program tingkat provinsi				
		p Dukungan layanan Keamanan Peningkatan Kinerja dan Daya Tahan Tubuh				
		q Dukungan Layanan Keprotokol dan pendampingan pimpinan				
		r Konsultasi dan Koordinasi teknis dengan mitra kerja				
		s Sewa jasa internet (bandwidth)		provinsi	417,228,000	
5297.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal					
5297.EBB.951	Layanan Sarana Internal Provinsi		1	unit	480,000,000	Khusus Provinsi DI Yogyakarta, Jambi, Sumsel, Sulut, Sulteng, Maluku, Bali, NTB, NTT, Papua, Banten, dan Babel
	3.1	Jumlah sarana Internal yang diadakan				
		297 Pengadaan Sarana Fasilitas Perkantoran	1	unit	480,000,000	
		a Belanja Modal Peralatan dan Mesin (kendaraan bermotor roda dua/empat)				
		b Fasilitas Pengadaan Sarana Kantor dan Rumah Jabatan				
		c Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran				
		d Pengadaan Sarana dan Prasarana 8 Balai Diklat				
		e Dukungan dan fasilitasi pengadaan Barang/jasa				
5297.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal					
5297.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		-	unit	-	
	4.1	Jumlah prasana Internal yang diadakan/direnovasi				
		298 Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	-	unit	-	
		a Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Kantor/Gudang/Rumah Dinas/Diklat				
		b Dukungan dan Fasilitas Kantor/Rumah Dinas/Diklat				
		c Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5297.PEA	Koordinasi					
5297.PEA.001	Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi		1	Kegiatan	245,525,000	Tagging Stunting
	5.1	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi				
		299 Penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi	1	Kegiatan	245,525,000	
		a Forum Koordinasi Stunting TK Provinsi				
		b Forum Koordinasi Stunting TK Kab/Kota				
		c Operasional Sekretariat Stunting Tk Provinsi				

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
5297.QAH	Pelayanan Publik Lainnya		layanan		
5297.QAH.001	Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi	1	layanan	131,250,000	Tagging Stunting
	6.1 Jumlah Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi				
	300 Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi	1	layanan	131,250,000	
	a Liputan Kegiatan Peanganan Stunting				
	Media Publikasi:				
	b Advetorial PSA/Banner/ Display Media Cetak				
	Advetorial PSA Media Online				
	c Forum Koordinasi Jurnalis				
5297.CAN	SARANA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI				
5297.CAN.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana TIK Provinsi	2	unit	150,000,000	
	7.1 Jumlah Sarana dan Prasarana TIK yang diadakan				
	301 Pengadaan sarana dan prasarana TIK Provinsi	2	unit	150,000,000	
	a Pengadaan sarana dan prasarana TIK				
	b Pengadaan sarana dan prasarana TIK di Balai Diklat				Khusus Provinsi Jabar, Jateng, dan Jatim
Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi				156,437,000	
5297.EBD	Layanan Audit Internal				
5297.EBD.965	Laporan Audit Internal	1	Dokumen	85,000,000	
	1.1 Jumlah Laporan Pengawasan Internal				
	302 Pelaksanaan Pengawasan Program Bangga Kencana di Provinsi	1	Dokumen	85,000,000	
	a Evaluasi Pelaksanaan SPIP				
	b Evaluasi Penerapan ZI WBK dan PMPRB				
	c Penerapan SMAP ISO 37001:2016				
	d Fasilitasi Pengawasan Mitra Kerja				
	e TLHP Internal dan Eksternal				
5297.QIF	Pengawasan dan pengendalian layanan				
5297.QIF.001	Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi	1	Layanan	71,437,000	Tagging Stunting
	1.1 Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting provinsi		Layanan		
	303 Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Tk Provinsi	1	Dokumen	71,437,000	
	a Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi dan Kab/Kota				

Catatan: Kegiatan yang mendukung ProPN, Percepatan Penurunan Stunting, dan kegiatan prioritas KL (PBDKI) mengacu pada panduan/RAB dan berkoordinasi dengan Unit Kerja Eselon-II (UKE 2) Pengampu

Sekretaris Utama,

 Tavip Agus Rayanto

	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL UNIT KERJA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
	NOTULEN RAPAT		
Subyek	RADALGRAM		
Hari/Tanggal	Rabu / 15 November 2023	Notulis/ Disiapkan oleh	Septiana Rakhmawati, S.Far., Apt
Waktu	09.00 – 12.00 WIB	Diperiksa oleh	
Pimpinan		Disetujui oleh	
Narasumber	1. Rohdhiana Sumariati, S.Sos, M.Sc 2. Zainal Arifin, S.Sos, M.Si		
Tempat	Griya Dhahar Erista Garden, Sleman		
Peserta	1. Kepala OPD KB se-DIY dan Jajaranya 2. Ketua DPD IPeKB DIY 3. Ketu DPC IPeKB Kab. Bantul 4. Pj Bidang		
A. SAMBUTAN KEPALA DINAS P3AP2KB Kabupaten Sleman			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tugas di dinas tidak hanya mengampu tugas BKKBN tetapi prinsip pembangunan keluarga itu kompleks dan kita handle, butuh dukungan ahli seperti psikolog.kasus di sleman, mengedukasi masyarakat. ➤ Program dari telur ayam Bahagia, beras fortifikasi. 			
B. ARAHAN KAPER			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Radalgram melihat bagaimana capaian program. ➤ Sudah masuk triwulan ke IV, bulan emergency karena waktu tinggal sekitar 1 bulan. ➤ Untuk laporan, masih ada kesempatan sampai dengan 23.59 WIB, jika masih ada yang error, tolong dikomunikasikan supaya laporan oktober yang masih fluktuatif agar jelas. ➤ Harapan jika masih ada yang kurang dikomunikasikan, mohon masukan bapak/ibu apa strateginya untuk meningkatkan capaian, mudah-mudahan ada solusi. 			
C. PEMBAHASAN DAN DISKUSI			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paparan Bidang Adpin Paparan disampaikan oleh Penanggung Jawab Bidang Adpin (Rohdhiana Sumariati, S.Sos., M.Sc) terkait capaian program sampai dengan bulan Oktober 2023. <ul style="list-style-type: none"> • Cakupan kartu pendaftaran atau K/0 secara keseluruhan sudah 100% (634 dari target 634) <ul style="list-style-type: none"> ▪ BKB: 100% (1468 dari target 1468) 			

- BKR: 100 % (639 dari target 639)
 - BKL: 99 % (779 dari target 780)→ Bantul tercapai 99% (142 dari target 143) yaitu BKL Sejahtera 1 (Pajangan, Kab. Bantul)
 - UPPKA: 98 % (1566 dari target 1593)→ Bantul 93 % (368 dari target 395)
 - PIK-R: 100 % (396 dari target 396)
 - Setara POKTAN : Kampung KB 412, RUMAH DATAKU 287, PPKS 63 . Seluruh K0 setara poktan sudah di *update*.
- Cakupan Pelaporan Faskes KB: 99,12 % →KP dan GK 100%, Bantul 98,82 %, Sleman 98,99 % dan Kota Yogyakarta 98,18 %
 - Cakupan Laporan Tempat Pelayanan KB:
 - KP: Yan KB pemerintah 100 %, Yan KB swasta 100 %
 - Bantul: Yan KB pemerintah 100 %, Yan KB swasta 97,66 %
 - Gunungkidul: Yan KB pemerintah 100 %, Yan KB swasta 100 %
 - Sleman: Yan KB pemerintah 100 %, Yan KB swasta 99,43 %
 - Kota YK: Yan KB pemerintah 100 %, Yan KB swasta 97,67%
 - Total pelayanan KB s.d Oktober 2023: 247.725 akseptor, dengan rincian: 24.621 peserta KB Baru, 213.417 peserta KB ulangan dan 9.687 peserta KB ganti cara.
 - Capaian peserta KB baru s.d Oktober 2023 sebesar 24.621 akseptor atau 62,39 % dari KKP sebesar 39.464 akseptor, sedangkan peserta KB baru MKJP sebesar 12.651 akseptor atau 68,65 % dari target Kkp 18.428 akseptor. Adapun distribusi per mix kontrasepsinya adalah sebagai berikut :
 1. Suntikan 44,63% (Semua Kab kategori kurang kecuali Kota YK kategori baik)
 2. Pil 96,94% (Kpdan Kota YK kategori sangat baik,Sleman kategori baik, Bantul dan GK kategori kurang)
 3. Kondom 87,39% (Kulonprogo dan kota YK kategori sangat baik, Sleman kategori baik, Bantul dan Gunungkidul kategori kurang)
 4. Implant 80,12% (Sleman, kota YK, Kulonprogo dan bantul kategori sangat baik, Gunungkidul kategori cukup)
 5. IUD 64,84% (Kota YK kategori sangat baik, Kulonprogo kategori baik, Bantul kategori cukup, Sleman dan GK kategori kurang)
 6. MOP 42,28% (Kota YK dan Kulonprogo kategori sangat baik, Sleman kategori baik, Bantul dan GK kategori kurang)
 7. MOW 67,04% (Sleman dan Kota YK kategori sangat baik, KP kategori cukup, Bantul dan GK kategori kurang)
 8. Peserta KB Baru Pria 85,52 % (2.533 akseptor dari target KKP 2.962 akseptor)→ KUlunprogo dan kota YK kategori sangat baik, Sleman kategori cukup, Bantul dan Gunungkidul kategori kurang.
 - Capaian KB ulangan dengan jumlah 213.417 akseptor
 - Untuk capaian peserta KB aktif per mix kontrasepsi sebesar 338.176 akseptor (112,40%) dari KKP sebesar 300,877 akseptor.
 1. Suntikan 208,46% (Semua Kab kategori sangat baik)
 2. Pil 98,31% (KP, dan GK kategori sangat baik, Bantul dan Kota YK kategori baik, Sleman kategori cukup)
 3. Kondom 53,27% (Semua Kab /Kota kategori kurang)
 4. Implant 146,05% (Semua Kab/Kota kategori sangat baik)
 5. IUD 107,80% (Semua Kab kategori sangat baik kecuali sleman kategori baik)

6. MOP 58,35% (Semua kan/kota pada kategori kurang kecuali KP kategori cukup)
7. MOW 67,53 % (KP dan GK kategori cukup, Sleman, Kota YK dan Bantul kategori kurang)
8. MAL 55,92 % (semua kab/kota kategori kurang)

- Target mCPR DIY 2023 sebesar 56.01% dan target telah tercapai sebesar 64,91%
- Target unmet need DIY sebesar 19,55% dan sampai dengan Oktober DIY sudah mencapai 15,06% atau 78.433 dari target 520.964 PUS
- Cakupan pelaporan BKB 96,53 %, BKR 96,40 %, BKL 96,03 %, UPPKA 94,54 %, PIK R 96,21 %, PPKS 98,41 % dan BP 100 %.

▪ **Paparan Bidang Sekretariat**

Paparan disampaikan oleh Ketua Pokja Pengelolaan Keuangan dan BMN (Septiana Rakhmawati).

➤ **KETERSEDIAAN ALKON**

Sumber data yang digunakan dari aplikasi New SIGA dan aplikasi SIRIKA

- Tingkat ketersediaan alokon sampai dengan Oktober 2023 antara lain :
 - IUD = 11,80 bulan
 - Pil Kombinasi = 15,69 bulan
 - Mini Pil / Pil Progestin = 22,76 bulan
 - Suntik Progestin = 12,88 bulan
 - Implant = 10,56 bulan
 - Kondom = 17,08 bulan

➤ **ANGGARAN DAK**

Sumber data yang digunakan dari Morena Triwulan IV yang diakses tanggal 13 November 2023.

- Anggaran DAK Fisik terealisasi 96,06 % diatas rata-rata nasional 63,89%.
- Anggaran DAK BOKB secara keseluruhan terealisasi sebesar 77,03% dari anggaran 31.967.419.000 diatas rata-rata nasional 54,55%.
- Realisasi per menu BOKB :operasional balai penyuluhan KB (81,98%), operasional pelayanan KB (57,59%). Operasional penggerakan di kampung KB (89,66 %), Penurunan Stunting (83,72%), operasional pembinaan program bangga kencana oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (90,92%), dukungan manajemen dan SIGA (65,00%)

D. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

- Forum komunikasi PPS terdapat beberapa catatan untuk evaluasi
- Prevalensi stunting di DIY 16,4 % target perpres 14 % di 2024.
- Prev stunting terendah di Kota YK
- Aksi konvergensi, timeline di Nov penilaian aksi 1-7 (AKS dan publish dari dinkes datat EPPGBM), untuk yang publis KP, tgl 20 kab sleman, Kota sudah publish.
- AKS adalah produk perban sehingga dikawal.
- AKS 2023 untuk kedepannya sesuai arahan balnak, 2024 standar dengan timeline yang ada di pusat:
 1. SK
 2. kajian, seleksi kasus, diseminasi evaluasi, diseminasi tindaklanjut dilaksanakan 2 semester.

- Laporan harus di TTD Wabup, Semester I 2 tahap, semester II 2 tahap
- Kegiatan minilokakarya 1 tahun 10 kali.
- BAAS→ CSR bank mandiri kerjasama dengan Kejati di Nov-Des, dikawal oleh TPK

Aji Bantul

- UPPKA di Pajangan terdapat kendala jaringan (gagal entri), hari ini akan diupayakan untuk mengentri.
- DAK BOKB akan koordinasi dengan bagian keuangan

Herristanti Kota

- Penggerakan KB MKJP, IUD diprediksi s.d akhir tahun habis. Untuk implant baru sekitar 60 %. Apakah disisa waktu apakah dimungkinkan adanya pengalihan target ? MOW dan MOP ada tambahan APBD, pengganti hidup 300 rb dan 700 rb untuk recovery.
- Bagi poktan yang masih merah di ngampilan akan dikebut hari ini untuk dientri. Ada pergantian PKB, lama pensiun.
- PPS dari minilok bulan Nov terakhir sdh dilaksanakan masih ada sisa transport, ditambahkan dari APBD keliling ke kemantren, dilihat dewan.
- Hasil minilok sept masih ada wilayah yang merah, secara marathon FGD di 6 kemantren. Dari hasil tersebut akan terjun k lapangan bertemu dgn sasaran. Tingkat keberhasilan 50 %.
- Terdapat beberapa penduduk domisili yang menyumbang merah.

Irvy

- Untuk capaian dana BOKB di pelayanan KB masih rendah, Operasional penggerakan KB kegiatan sudah dilaksanakan, belum SP2D.

Kaper

- Teman2 PLKB untuk SKP akan di feedback ke OPD KB, akan dikaitkan dengan pengusulan AK, kenaikan pangkat. Akana da rekomendasi dari Kepala Dinas.
- Perhatikan laporan capaian program, jaga agar tidak fluktuatif.
- UPPKA dan DAK yang persoalan jaringan agar dikomunikasikan dengan kominfo, upayakan di tempat yang jaringan bagus.
- Penggerakan bisa dikonversi tanpa harus tercapai target.
- MOW yang tidak mungkin tercapai, MOW ke IUD/ Implan harus 10
- Poktan di ngampilan mudah-mudahan bisa digenjot.
- Monev dihadiri DPRD bagus (apabila ada dana aspirasi).
- Surat kepala BSDM BKKBN terkait pose foto. Tidak ikut dalam politik praktis.
- PMT hanya ada di Kesehatan hanya GK dan KP.
- Posyandu harus terintegrasi (HI)
- Posyandu hanya diberikan layanan ukur, timbang, jika berkasus diberikan vitamin. Teman-teman di meja 4 biasanya stlh di catat cek kasusnya misal pemberian asi.

3. DOKUMENTASI



Notulen Radalgram

Rabu, 15 November 2023

Erista Garden Resto, Pakem Sleman

Sambutan dari Kepala OPD KB Kabupaten Sleman

- Sleman mendapatkan Bantuan hibah dr kemenkeu, utk dialokasikan utk kemiskinan dan stunting, tdk boleh utk peningkatan kapasitas, hrs dlm bentuk belanja barang yg smpe ke penerima manfaat, telur dari ayam Bahagia (ayam yg dilepas, tdk dikurung), telur... utk 89(?) sasaran, kemudian ada arahan utk beras vortivikasi, utk 2 bulan

Sambutan dari Kepala Perwakilan BKKBN DIY

- Capaian program bangga kencana
- Perkembangan program PPS
- Capaian yg masih rendah, tolong hari ini diselesaikan, karena batas akhir tgl 15, hari ini
- Capaian kinerja Perwakilan BKKBN DIY yang masih harus ditingkatkan lagi, yg merupakan support dari 5 kab kota, terima kasih utk dukungan dari kab kota
- Secara system, apabilla kinerja perwakilan statusnya baik maka nilai dari individu harus ada di posisi "kurang" sehingga DIY masih mengupayakan untuk diposisi "baik" dan "sangat baik"
- Harapan utk kegiatan ini : klo msh ada yg kurang, mohon dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan kami, dan mohon utk masukan dari kab kota, terkait dgn strategi dalam mencapai target kinerja, mohon ada diskusi/apay g perlu disampaikan apabila ada permasalahan mungkin ada solusi dari kami juga
- Dana Alokasi Khusus – pemanfaatan dan penyerapan anggaran dari kab kota

Materi

- Realisasi Anggaran DAK
 - o Realisasi DAK Fisik per tgl 13 November 2023 msh di posisi 96,06 %, capaian nasional
 - o Yg belum bertambah di Kab Bantul, utk penunjang blm di spjkan
 - o BOKB : masih no 1 secara nasional
 - o Realisasi per menu

- MOP di GK blm berhasil mendapatkan akseptor krn ada 2 calon akseptor yg mengundurkan diri
-
- Ketersediaan alokon
 - Ketersediaan alokon di Gudang Perwakilan BKKBN DIY
 - Perlu edukasi khusus terkait penggunaan pil progesterin, 1 hormon, bagus utk ibu menyusui
 - Pelaksanaan stock opname di bulan desember : mohon utk kab kota mengajukan kebutuhan alokon, sampai bulan desember, diharapkan di bulan des sdh tdk ada permintaan lagi
 -
- Capaian program bangga kencana
 - Data diakses tgl 14 nov, jam 13, sehingga klo msh ada yg merah nanti msh ada waktu utk perbaikan
 - Utk dalgram nas ditarik per tgl 15
 - K0 monggo utk bisa dicek ulang
 - K0 kampung KB mohon bs disinkronkan dengan web kampung kb
 - Secara prov sudah 99,12% utk cakupan laporan, Bantul : pandak dan pajangan yg blm 100%, Sleman : kalasan, GK : sdh 100%, Kota : Jetis
 - PB Pria paling banyak di KP
 - Capaian PB terhadap KKP msh jauh dr 75,45%
 - Suntik 3 bulanan msh menjadi favorit di DIY
 - MAL ada 55,92%
 - PA Pil, Kabupaten Sleman masih 78,24%
 - PA Kondom masih merah untuk semua kab kota, angka di DIY 53%
 - PA MOP Kab Kulon Progo masih kuning, sedangkan kab yang lain posisinya masih merah
 - mCPR dan Unmet Need DIY sdh mencapai target, sesuai data di SIGA
 - cakupan laporan POKTAN utk Kab KP sdh 100% semua, utk kab kota yg lain msh ada yg blm mencapai 100%

Sekban :

- aplikasi Morena setelah pelayanan mohon diinput setelah pelayanan
- ada baksos terkait peringatan hari ibu
- penghargaan utk Sidoluhur utk kategori zero stunting
- Capaian program percepatan penurunan stunting

- Stunting DIY masih diangka 16,4% sesuai dengan publikasi Kemenkes, nanti akhir tahun akan dirilis hasil SKI oleh kemenkes utk mengetahui angka stunting, paling rendah di Kota
- Konvergensi akan dinilai di bulan Nov, utk penilaian aksi 1-7
- Dinkes KP, Kota sdh melakukan publish
- Sleman sdh ada jadwal
- GK dan BTL blm ada
- Hasil monev dengan KemenPan : akan ada dashboard, data dr 3 (EPPGM, BKKBN dan Dinas Pendidikan) utk mengintervensi sasaran
- Alokasi DAK dr kemenkes utk PMT utk 2 kab, GK dan KP
- AKS menggunakan standar dr pusat : 4 tahap harus ada di 2 semester, harus sesuai dengan time line nya BALNAK, jadi ada 2 pelaporan di masing2 semester, laporan hrs di ttdi oleh wakil bupati sebagai ketua TPPS, semester 1 (januari-juni), semester 2 (juli-des)
- Best praktis : 2022 Kota, 2023 GK, nanti 2024 diharapkan juga ada
- Minlok dilaksanakan 10x dalam 1 tahun tetapi yg menjadi masalah krn pesertanya sedikit
- Minlok di bulan nov sdh selesai dilaksanakan
- Konvergensi
- Pendampingan KRS oleh tim pendamping keluarga, msh terkendala oleh ELSIMIL
- Akan ada lembar bantuan kepada TPK, untuk membantu TPK menginput data ke aplikasi ELSIMIL
- BAAS → PMT sembako, di GK, sekitar 300 jt, sekitar 400jt, Pacarrejo, serta ada bantuan utk BAK penampungan air bersih → CSR bank mandiri dan Kejati

Diskusi

- Bantul, Pak Aji
 - 3 bulan yg lalu, Bantul capaiannya masih merah semua, alhamdulillah utk capaian hr ini sudah membiru
 - Bantul sudah membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dilapangan
 - Utk Pajangan, ada beberapa kendala, salah satunya yaitu kendala jaringan, utk hari ini Bantul akan mengupayakan untuk entry data
 - Capaian DAK, akan kami komunikasikan dengan bagian keuangan dan entry laporan pada morena
- Kota, Bu Tanti
 - Diprediksi smpai akhir tahun akan tercapai

- IUD sdh habis, Implant msh
 - Pengalihan target dr implant ke IUD
 - MOP dan MOW ada tambahan dr APBD utk pengganti biaya hidup, 300rb dan 700rb utk recovery
 - Morena utk pelayanan KB MKJP blm tercapai krn utk man min standar nya lebih kecil tetapi dlm waktu 2 bulan ini akan mengalokasikan sisa anggaran utk pelayanan
 - Utk ngampilan akan dikebut dientry hari ini, krn kmrn terjadi pergantian PKB baru di Ngampilan
 - PPS → minilok di bulan Nov merupakan minilok terakhir sdh dilaksanakan, dihadiri oleh dewan, ada sisa anggaran kmdn ditambahkan dengan APBD sehingga bisa menambah kegiatan
 - Ada FGD utk kemantren yg masih merah
 - PMT yg dibagikan oleh Puskesmas, tingkat keberhasilan hy 50%
 - Sisi ketahanan keluarga yg akan digarap terlebih dahulu, ini mejadi PR bagi bidang perubahan perilaku, di Kota ada yg menjadi wilayah perbatasan, ada kecamatan yg sdh hijau tetapi bulan berikutnya menjadi merah, setelah diamati ternyata banyak pendatang yg menyumbang kondisi menjadi merah
- Tanggapan dr Bidang KB KR
 - Operasional penggerakan KB di Morena laporannya per 3 bulan, klo data update dr kab kota sudah update per bulan, di DIY capaiannya sdh baik
 - Belum ada SP2D maka tidak bisa dilaporkan di Morena
 - Walaupun utk kegiatan sudah dilaksanakan
 - Utk konversi, dipersilahkan dengan catatan utk anggaran nya mencukupi dan ada telaah dr OPD KB kota utk pusat dengan tembusan ke perwakilan
 - Di Juknis, dimungkinkan utk di 2023, klo di 2022 tdk boleh menurunkan target tetapi klo di 2023 tdk ada klausal itu
- Tanggapan dr Kaper
 - Dari bulan Januari s.d Juni, rata2 laporan kita hy berada di angka 30%, alhamdulillah capaian di bulan ini sudah luar biasa, terimakasih atas dukungan dari temen2 PKB yang menjadi ujung tombak dan OPD KB kab kota
 - Harapannya laporan itu tidak fluktuatif, mohon diusahakan capaian laporan itu maksimal, tidak turun tetapi meningkat
 - Isi laporan, aspek kualitas, contoh BKB, BKR, BKL, yg py sekolah lansia laporannya tdk bisa menjadi 0 krn ada kegiatan sekolah lansia
 - SKP, taget tercapai apa tidak, SKP temen2 PKB tidak hy melaksanakan kegiatan sj tetapi apakah target kinerja tercapai tidak

- Akan ada tim yang melihat SKP temen2 PKB, utk melihat capaian kinerja
- Akan melibatkan OPD KB Kab kota untuk melihat target kinerja dan capaian kinerja PKB karena yang mendayagunakan temen2 PKB adalah kab kota
- Bantul, UPPKA nya masih rendah, realisasi DAK nya juga masih rendah, klo masalah jaringan bisa dikomunikasikan dan difasilitasi oleh kabupaten, misal kerjasama dengan kominfo
- PKB bisa mengupayakan solusi dari hambatan2 yg ada
- Klo bisa dimaksimalkan di implant silahkan dilakukan, surat diproses di kab kota
- MOW ke IUD/implant, dihitung 10 → konversinya 1 MOW ke 10 IUD atau 10 Implan
- Ada kab yg kmrn sdh menyerah utk capaian MOW (kabupaten mn ya)
- Dana aspirasi bisa digunakan untuk program bangga kencana
- PMT dr DAK dinkes hy utk KP dan GK saja
- BKKBN diminta utk mengawal realisasinya, monitoring sejauhmana capaian
- PMT kpd BBLR, KEK ibu Hamil
- Anggarannya 7 milyar GK, 4 M KP
- Temen2 Penyuluh dan TPK, bgmn progress PMT nya
- Posyandu dilakuakn lomba, dengan salah satu indikator penilaiannya adalah Posyandu hrs HI, terintegrasi dengan BKB
- Posyandu hy memberikan layanan utk diukur, ditimbang, kmdn diberikan vit dst
- Penyuluh KB di meja berapa di posyandu, mohon bisa memberikan penyuluhan, pembinaan
- Semangat bekerja utk temen2 penyuluh dan diharapkan opd kb kab kota memberikan bimbingan kpd penyuluh

-

Dokumentasi Kegiatan



	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL UNIT KERJA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
	NOTULEN RAPAT		
Subyek	RADALGRAM		
Hari/Tanggal	Jum'at / 20 Oktober 2023	Notulis/ Disiapkan oleh	Septiana Rakhmawati, S.Far., Apt
Waktu	08.30 – 11.00 WIB	Diperiksa oleh	
Pimpinan		Disetujui oleh	
Narasumber	1. Rohdhiana Sumariati, S.Sos, M.Sc 2. Zainal Arifin, S.Sos, M.Si		
Tempat	Waroeng Omah Sawah, Bantul		
Peserta	1. Kepala OPD KB se-DIY dan Jajaranya 2. Ketua DPD IPeKB DIY 3. Ketu DPC IPeKB Kab. Bantul 4. Pj Bidang		
A. SAMBUTAN KEPALA DINAS P3AP2KB Kabupaten Bantul			
➤ Radalgram sebagai sarana evaluasi pencapaian program di DIY dilakukan secara rutin.			
B. PEMBAHASAN DAN DISKUSI			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paparan Bidang Adpin <p>Paparan disampaikan oleh Penanggung Jawab Bidang Adpin (Rohdhiana Sumariati, S.Sos., M.Sc) terkait capaian program sampai dengan bulan September 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cakupan kartu pendaftaran atau K/0 secara keseluruhan sudah 100% (635 dari target 635) <ul style="list-style-type: none"> ▪ BKB: 100% (1465 dari target 1465) ▪ BKL: 100 % (779 dari target 780) □ Bantul tercapai 99% (142 dari target 143) ▪ UPPKA: 98 % (1571 dari target 1598) □ Bantul 93 % (368 dari target 395) ▪ PIK-R: 100 % (398 dari target 398) ▪ Setara POKTAN : Kampung KB 344, RUMAH DATAKU 221, PPKS 63 ● Cakupan Pelaporan Faskes KB: 99,12 %, seluruh Kab sudah 100%, Kota Yogyakarta 94,64 % ● Cakupan Laporan Tempat Pelayanan KB: <ul style="list-style-type: none"> ▪ KP: Yan KB pemerintah 100 %, Yan KB swasta 100 % 			

- Bantul: Yan KB pemerintah 100 %, Yan KB swasta 99,22 %
 - Gunungkidul: Yan KB pemerintah 100 %, Yan KB swasta 100 %
 - Sleman: Yan KB pemerintah 100 %, Yan KB swasta 100 %
 - Kota YK: Yan KB pemerintah 95,83 %, Yan KB swasta 93,02%
- Capaian peserta KB baru s.d September 2023 sebesar 22.053 akseptor atau 55,88 % dari KKP sebesar 39.464 akseptor. Adapun distribusi per mix kontrasepsinya adalah sebagai berikut :
 1. Suntikan 40,48% (Semua Kab kategori kurang kecuali Kota YK kategori baik)
 2. Pil 86,12% (KP, Sleman dan Kota YK kategori sangat baik, Bantul dan GK kategori kurang)
 3. Kondom 74,50% (Kulonprogo dan kota YK kategori sangat baik, Sleman kategori baik, Bantul dan Gunungkidul kategori kurang)
 4. Implant 72,43% (Sleman, kota YK dan bantul kategori sangat baik, Kulonprogo kategori baik dan Gunungkidul kategori cukup)
 5. IUD 58,11% (Kota YK kategori sangat baik, Kulonprogo kategori baik, Sleman, Bantul kategori cukup, Sleman dan GK kategori kurang)
 6. MOP 39,02% (Kota YK dan Kulonprogo kategori sangat baik, Sleman kategori baik, Bantul dan GK kategori kurang)
 7. MOW 60,65% (Sleman dan Kota YK kategori sangat baik, KP kategori cukup, Bantul dan GK kategori kurang)
 8. Peserta KB Baru Pria 73,02 % (2.163 akseptor dari target KKP 2.962 akseptor)
 - Capaian KB ulangan dengan jumlah 188.058 akseptor
 - Untuk capaian peserta KB aktif per mix kontrasepsi sebesar 335.550 akseptor (111,52%) dari KKP sebesar 300,877 akseptor.
 1. Suntikan 206,34 (Semua Kab kategori sangat baik)
 2. Pil 98,16% (KP, dan GK kategori sangat baik, Bantul dan Kota YK kategori baik, Sleman kategori cukup)
 3. Kondom 53,15% (Semua Kab /Kota kategori kurang)
 4. Implant 144,24% (Semua Kab/Kota kategori sangat baik)
 5. IUD 106,88% (Semua Kab kategori sanagt baik kecuali sleman kategori baik)
 6. MOP 58,71% (KP kategori cukup , kot YK, Sleman, GK dan Bantul kategori kurang)
 7. MOW 67,38 % (KP dan GK kategori cukup, Sleman, Kota YK dan Bantul kategori kurang)
 8. MAL 55,92 % (semua kab/kota kategori kurang)
 - Target mCPR DIY 2023 sebesar 56.01% dan target telah tercapai sebesar 64,38%
 - Target unmet need DIY sebesar 19,55% dan sampai dengan September DIY sudah mencapai 15,15% atau 78.958 dari target 521.193 PUS
 - Cakupan pelaporan BKB 95,49 %, BKR 96,87 %, BKL 96,41 %, UPPKA 93,52 %, PIK R 93,72 %, PPKS 95,24 % dan BP 95,38 %.

▪ Paparan Bidang Sekretariat

Paparan disampaikan oleh Sekretaris Badan (Bapak Zainal Arifin).

➤ KETERSEDIAAN ALKON

Sumber data yang digunakan dari aplikasi New SIGA dan aplikasi SIRIKA

- Rasio ketersediaan alokan sampai dengan September 2023 antara lain :
 - IUD = 14,45 bulan
 - Pil Kombinasi = 20,08 bulan
 - Mini Pil / Pil Progesterin = 33,43 bulan

- Suntik Progestin = 15,13 bulan
- Implant = 2,85 bulan
- Kondom = 0,49 bulan
- Telah dilakukan Distribusi dinamis d Oktober 2023:
 - Kondom 3.037 gross dari sumsel
 - Implan 9.060 set dari Jawa Barat

➤ **ANGGARAN DAK**

Sumber data yang digunakan dari Morena Triwulan III yang diakses tanggal 16 Oktober 2023.

- Anggaran DAK Fisik terealisasi 96,06 % diatas rata-rata nasional 46,91%.
- Anggaran DAK BOKB secara keseluruhan terealisasi sebesar 65,28% dari anggaran 31.967.419.000 diatas rata-rata nasional 45,83%.
- Realisasi per menu BOKB :operasional balai penyuluhan KB (72,29%), operasional pelayanan KB (49,50%), operasional penggerakan di kampung KB (74,22 %), Penurunan Stunting (72,50%), operasional pembinaan program bangga kencana oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (59,73%), dukungan manajemen dan SIGA (58,47%)

C. ARAHAN KAPER

Terimakasih untuk progress capaian program s.d September 2023, tetap ditingkatkan terutama untuk yang masih rendah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

- Terkait pelayanan KB
- hasil PK untuk data pelayanan KB
- berapa besar kontribusi PB terhadap PA
- KB PP : seluruh sasaran harus mendapatkan KIE
- setiap bulan harus melakukan kunjungan ke puskesmas
- Pemanfaatan tpk
- Terkait PPS akan turun money ke kab/kota : 7 Quick win

D. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

- Sarmin, Kota Yogyakarta

Bagaimana panduan terkait pemberian reward dan punishment untuk PKB? Evaluasi sudah dilakukan setiap bulan.
- Hayu, Kota YK

DP3AP2KB kota YK sudah memberikan reward untuk apresiasi kinerja dalam bentuk pemberian sertifikat yang bisa dipakai untuk penilaian AK
- Amirudin, GK
 - Capaian PB GK masih rendah, sudah dilaksanakan diskusi internal, akan ada kegiatan untuk wilayah yang capaian nya masih rendah, ada 6 kapanewon yang akan dilaksanakan di bulan november, sudah koordinasi dengan IBI
 - Tanggal 24 launching KKB dan RDK, mengharap kehadiran kaper
 - SKP PPPK sudah dibuat
- Kaper

- Terkait dengan kinerja memang masih menjadi perhatian terutama terkait SKP yang berbunyi “Melaksanakan” karena yang menjadi target adalah output. Untuk memantau kinerja dilihat dari SKP. Seluruh target harus terjabarkan sampai ke tingkat desa/kelurahan. Penyuluh berat bebanya tapi harus semangat.
- Tools evaluasi kinerja akan dibuatkan

E. DOKUMENTASI



Notulen Radalgram

Hari, tanggal : Senin, 21 Agustus 2023
Tempat : Klampok Limasan, Berbah, Sleman
Peserta : 1. OPD KB kab kota
2. Perwakilan BKKBN DIY
3. DPD/DPC IPeKB
4. DP3AP2 DIY
5. Mitra kerja (Fapsedu, Kampung KB, RDK)

Sambutan dari Sekretaris DP3AP2KB Kota Yogyakarta :

- Kegiatan radalgram ini tidak berhenti diangka monev saja, menjiwai untuk perencanaan yang akan datang
- Yang kurang akan dilengkapi untuk perenc yang akan datang
- Koordinasi prov dan kab kota akan semakin bagus, baik itu dari sisi perencanaan, anggaran dst

Sambutan kaper :

- Merupakan kegiatan strategis dan rutin dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana perkembangan program bangga kencana
- Data bulan juli yang didiskusikan di bulan agustus
- Terkait perkembangan DAK sub bidang KB
- Capaian yang masih merah dan sudah berlangsung beberapa bulan, sudah ada teguran dari pusat
- Mari berkomitmen karena angka capaian harusnya sudah diatas angka 60, di triwulan ke 3
- Kenapa capaian merah, yang ditanya temen-temen PKB, yang mempunyai wilayah binaan
- Pemberian tunkin PKB dilihat dari kinerja, kalau capaian merah bisa ditunda tunkin nya
→ salah satu strategi yang sudah diterapkan di sulsel
- K0 harus sudah 100% di tanggal 7 januari, kalau ada masalah PKB bisa melakukan koordinasi dengan prov

- Capaian yang merah tanpa dukungan dari temen-temen PKB, prov tidak bisa
- Sudah dilakukan pemetaan, target sampai level desa nanti akan dilakukan evaluasi
- OPD KB kab kota lemah untuk memberikan masukan terkait usulan AK, AK bagus capaian harusnya bagus, tapi buktinya tidak seperti itu, tidak bisa mendongkrak capaian
- Ketua DPC DPD → bisa melakukan peran dalam organisasi
- Diharapkan kedepan ada TL dari radalgram yang kita lakukan, bagaimana masalah bisa kita selesaikan
- Rumusan sebagai TL → pada kegiatan radalgram ini

Paparan materi 1 : Pj Bidang ADPIN

- Data per 14 Juli 2023
- Cakupan K0 Faskes, Poktan per kab kota
- K0 Faskes yang belum update :
 - o Kapanewon Wonosari : PMB Yuyun Betty, RS Bethesda Wonosari
 - o Kapanewon Berbah : dr. Tuti Suswaniati
 - o Kapanewon Ngaglik : PMB Widayati Dwi Winarni, PMB Sri Purwanti Tyastuti, Klinik Satria, dr. Nur Farikhah, PMB Amalina
- Cakupan laporan pelayanan KB, yang masih merah :
 - o Kulon Progo : samigaluh
 - o Bantul : sewon, pundong, jetis, banguntapan, pleret
 - o Gunung Kidul : semin, gedangsari
 - o Sleman : gamping, moyudan, seyegan, kalasan, ngaglik, sleman, tempel, pakem
 - o Kota : mantrijeron
- Pelayanan KB sampai bulan Juli 2023, yang paling tinggi adalah KB Suntik 3 bulanan
- Capaian peserta KB baru untuk Kabupaten Bantul masih merah (29%), sedangkan untuk Kota Yogyakarta sudah biru (76,6%) apabila dibandingkan dengan KKP
- Kegiatan yang akan dilakukan adalah Verval : dengan lokus yang tidak menjadi lokus PK22 maupun 23 tetapi ada bagian yang merupakan irisan (ada yang bagian dari PK22 dan 23)

Paparan Materi 2 : Sekretaris Badan

- Realisasi Anggaran DAK Fisik : DIY 25,97% sedangkan Nasional 13,23%
- Realisasi Anggaran DAK BOKB : DIY 48,54 sedangkan Nasional 25,61
- Realisasi anggaran DAK BOKB DIY paling tinggi secara nasional
- Ketersediaan Alokasi di Gudang provinsi : kondom dan Implan kurang dari 6 bulan
- Ketersediaan alokasi Pil Progrestin di Gudang Kabupaten Bantul dan Gunungkidul lebih dari 3 tahun

Diskusi :

- Tambahan dari Pj Bidang KS PK
 - o Capaian merah, akan di TL melalui VM dengan PKB, undangan menyusul, untuk bisa menindaklanjuti capaian laporan, sehingga ada komunikasi, solusi, strategi apa sehingga dibulan depan sudah ada progress yang lebih baik, akan dilakukan bertahap, dengan masing-masing kabupaten kota, apabila cukup dilakukan 1 hari tetapi kalau tidak cukup nanti bisa 2 hari
 - o 28 agustus wisuda bagi sekolah lansia, di moyudan, KP (ngramang), kota (delima 1, 2, 3 → ada koordinasi untuk wisuda lansia, tempatnya di resto Westlake untuk acara wisudanya, dicari tempat yang ramah lansia
- Kota Yogyakarta :
 - o Upaya akselerasi capaian : komunikasi kurang baik sehingga diberikan reward dan punishment
 - o Kemajuan dukungan DAK BOKB → sinergi tidak dibangun
 - o DAK : perencanaan sejak awal, sudah menghubungi penyedia dari awal, dengan harga paling rendah, ada sisa anggaran dari DAK Fisik,
 - o Mekanisme revisi harusnya bisa dilakukan dari awal, sudah ketahuan, tetapi ketika bersurat ke pusat tidak bisa dilakukan karena kota belum melakukan kontrak dengan penyedia sampai bulan maret, belum dilakukan kontrak karena menu di e catalog belum muncul
 - o Antara perencanaan, kebijakan (proses revisi), kemunculan menu di e catalog → tidak sinkron

- Penilaian DAK Fisik berdasarkan realisasi anggaran → tidak fair, karena realisasi fisik 100% tapi ada sisa anggaran jadi nilainya tidak bagus
 - Kab kota diikat dengan target, mohon disesuaikan dengan perilaku penduduk di kab kota
- Kabupaten Bantul
- Bantul sebagian besar masih terendah, masih merah,
 - Berat untuk mencapai target yang sudah ditetapkan
 - Evaluasi tahun kemarin, evaluasi realisasi anggaran/keuangan, untuk capaian fisik kemungkinan di nomer 2, tahun lalu mendapatkan realisasi honor → pendampingan ibu hamil tidak bisa terserap, keuangan tidak tercapai, fisiknya juga tidak tercapai, untuk BKB kit ada semacam rasionalisasi harga, yang awalnya tinggi menjadi rendah, jadi kalau tidak dialihkan ke pengadaan/kegiatan yang lain akan ada sisa anggaran padahal fisiknya sudah tercapai
 - Capaian kondom masih sangat rendah, akan bertanya ke kab lain, apabila ada kearifan lokal, tetapi kami akan menyisir lagi akseptor kondom
 - Ketersediaan alokon, suntik atau kondom, mungkin menjadi bahan evaluasi, bisa menjadi realokasi
- Kabupaten Gunungkidul
- KO faskes, laporan terkendala dengan administrasi
 - Target di bulan juli sudah dilaksanakan sampai bulan agustus
 - Rapat evaluasi sebagai TL surat dari BKKBN, sudah kami sinkronkan dengan teman-teman di lapangan, terkait dengan laporan yang menjadi tanggung jawab kita bersama, semoga di bulan agustus sudah berubah warna
 - Kendala : pembiayaan untuk MOP tidak bisa kami realisasikan, sehingga tidak bisa memenuhi target
 - BKB Kit, dari fisik menjadi non fisik, bisa kita maksimalkan anggaran dan volume nya → menambah penyerapan kab
 - Realisasi : belum maksimalnya BOKB yang kami laksanakan, sesuai dengan rencana kegiatan yang kami susun (AJK)

- Kabupaten Sleman :
 - Sleman menorehkan beberapa prestasi di level nasional
 - Rakor New SIGA di tgl 24 agustus → sebagai strategi untuk memperbaiki capaian, tidak lagi berwarna merah → narasumber dari BKKBN
 - Strategi pertemuan di bulan September akan dilakukan dibawah tgl 14 sebagai evaluasi New SIGA apakah sudah di input apa blm
 - DAK Fisik proses sudah pembayaran, agustus akhir akan selesai, menjadi tambahan penyerapan anggaran di aplikasi daerah, 85% minimal supaya tidak ada pemotongan TPP, ini strategi kami, 85% dari pengajuan AJK
 - MOP sleman sudah realisasi tetapi dilaporkan kenapa jumlahnya tetep 0 saja, ada kendala apa disistem pelaporan atau dimana?
 - Sub menu KIE → AJK di bulan September
 - Mohon dr BKKBN bisa menyampaikan strategi, kendala dst terkait dengan pelaporan New Siga ini
- Kabupaten Sleman : (IPeKB)
 - Evaluasi pencapaian pelaporan : untuk yang 0 ini adalah PB MOP, untuk pelaporan ini yang melakukan adalah RSUP dr Sarjito
 - PKB sudah berusaha sekuat tenaga, terkait dengan lapangan dan new siga, kedepannya akan kami perbaiki
 - Setelah tgl 15 agustus kami berharap ada tarikan data baru karena sudah ada feedback dari kami
 - Sebagian besar PMB itu hanya sendiri atau ber2, jadi kami berusaha mengcover inpaut data tetapi kendalanya data mentah tidak bisa kita olah
 - Mohon kesepakatan, data akan ditarik kapan? Karena kaitannya dengan pihak lain, butuh waktu untuk melakukan koordinasi konsolidasi
 - Fasilitasi mekanisme laporan di lapangan sangat minim, APBD tidak bisa diandalkan, yang bisa kita harapkan adalah BOKB, yang mekop bangga kencana, bukan stunting. Harapannya ada pembinaan tiap bulan
- Kabupaten Kulon Progo
 - Setelah dikunjungi oleh kaper ada impact nya yang cukup bagus

- Untuk samigaluh memang menjadi perhatian, nanti akan kami TL dengan melakukan kunjungan
- PMB → baru haji sehingga 3 bulan tidak melakukan pelayanan, yang satu lokasi sulit sehingga akseptor lebih memilih untuk melakukan pelayanan di lokasi lain
- Baksos di seluruh wilayah kapanewon setiap bulan
- Poktan belum semua melakukan pencatatan/pelaporan
- Realisasi → SP2D yang dihitung di morena
- APBD, DAK dan Danais → lebih memilih menyelesaikan pertanggungjawaban Danais terlebih dahulu dibandingkan DAK, karena akan berpengaruh terhadap realisasi kinerja kabupaten
- Serapan BOKB fisiknya lebih besar daripada laporan di Morena
- Tanggapan kaper :
 - Khusus untuk SDM sudah ada petunjuk, jika SDM tidak ada faskes maka diambil alih PKB
 - Penutupan laporan faskes tanggal 25
 - Untuk kinerja tgl 15 ditarik
 - Alokon akan dipetakan karena ED, akan dilakukan distribusi dinamis
 - PB dicatat dimn mereka di layani
 - Mekanisme usulan AK
 - Capaian yg merah bulan depan bisa lebih baik lagi
- Tanggapan Pj Adpin :
 - Penarikan data tgl 14 → seblum dalgram prov, ada dalgram internal
 - Tgl 10 difeedbackkan supaya bs mencermati data sementara
 - Tgl 20 data pusat ditarik
- Tanggapan Fapsedu :
 - Laporan → itu output → outcome nya apa → ini yg perlu diketahui oleh mitra, seperti pertumbuhan penduduk, jangan sampai rata2 anak yg dipunyai oleh keluarga ini menjadi 0, akan habis penduduknya, ada urbanisasi
- Tanggapan RDK Gondomanan :
 - PK22 dan 23 tidak tersampling → susah update data

- PKK

- Poktan yg ada di kelompok Masyarakat, PKK sdh bersinergi dengan temen2 PKB, ada program “Ngluwihi mbagehi” sebagai embrio DASHAT
- Utk kegiatan digabung, seperti BKB digabung dengan posyandu dst, utk pelaporan di bantu oleh PKB, tetapi tdk semua kemantrean ada balai penyuluhannya
- Kader PKK diminta membantu utk pelaporan, tetapi ada kendalanya krn tdk semua kelompok itu membuat laporan shg temen2 PKB menjemput laporan ini, poktan nya ada yg smpe 15 kelompok
- PKK sdh membantu kegiatan dan bersinergi dengan kegiatan KB

- Tanggapan Kaper :

- Dari fapsedu, ada pelambatan usia menikah, target utk perkawinan (Wanita 21, laki 25) → menikah dengan resiko krn usia lbh dr 30 tahun
- TFR utk DIY jgn smpe turun lagi, unmet need kita akan kita lihat lagi, jgn sampai kita ditekan utk TFR turun lagi
- 29-30 ada kegiatan di pusat, sebelum target 2024 ditentukan
- Outcome dr bangga kencana : 2020 ada 10 perubahan yg dilakukan oleh BKKBN → tdk ada pembatasan, yg dilakukan KIE 4T utk kepentingan ibu dan anak
- BKKBN tdk melarang utk melahirkan, tetapi semata2 utk Kesehatan
- RDK tidak tersampling
- PKK → 167 cikal bakal DASHAT
- Kelompok tdk melaporkan → tugas temen2 PKB krn kader tidak mempunyai gaji

Dokumentasi Kegiatan



NOTULEN

RAPAT KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

I. PELAKSANAAN

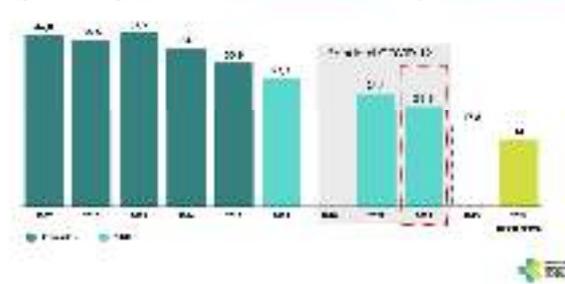
- Hari/tanggal : Selasa, 28 Februari 2023
- Tempat : Hotel Grand Rohan Jogja
- Tema : “Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi Pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting”
- Peserta : 150 orang dihadirkan secara fisik dan 350 peserta hadir daring melalui *zoom meeting*. Peserta berasal dari unsur Forkompimda DIY, Bupati/ Walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Mitrakerja DIY/Mitra Kerja Kab/Kota, Jajaran Perwakilan BKKBN DIY dan panitia.
- Narasumber : 1. Kepala Perwakilan BKKBN DIY– Shodiqin, SH, MM
2. Kepala BKKBN RI diwakili Inspektorat Utama. - Ari Dwikora Tono, Ak., M.Ec. Dev.
3. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, diwakili Staf Ahli Sosial Budaya Kemasyarakatan - Ibu dr. Eti Kumolowati, M.Kes
4. RSUD Sleman- dr.Raden Yuli Kristyanto, Sp.A, M.Sc.
5. Kedaireka UGM - Dr. Lily Arsanti Lestari, S.T.P., M.P.
6. Dinas Kesehatan DIY - Endang Pamungkasih, M.Kes.
7. Bapeda DIY – Drs. Beny Suharsono, M.Si.

II. HASIL

A. Refleksi Program Bangga Kencana dan Prioritas Program Bangga Kencana Tahun 2023 oleh Kepala Perwakilan BKKBN DIY - Bapak Shodiqin,SH, MM

- BKKBN mendukung 2 (dua) agenda Prioritas Pembangunan Nasional yaitu 1) Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing serta 2) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokoh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter.
- Dalam Renstra BKKBN 2020-2024, Output yang akan dituju sebagai Dampak dari Program Bangga Kencana secara umum adalah Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Di DIY, LPP berdasarkan SP 2020 adalah 0,58.
- Kondisi DIY untuk angka stunting ada penurunan 0.9 % dari 17,3 % (SSGI 2021) menjadi 16,4 % (SSGI 2022).

Angka stunting SSGI turun dari 24,4% di 2021 menjadi 21,6% di 2022



- **Capaian Kinerja Program Bangga Kencana Tahun 2022**

NO	INDIKATOR	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
1.	TFR	1,82 rata2 anak per wanita	1,89
2.	ASFR 15-19 Tahun	14 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	11,54
3.	mCPR	57,18 %	60,89 %
4.	UNMET NEED	14,50 %	23,13 %
5.	iBANGGA	65,36 (Skala 0-100)	65,36
6.	PERSENTASE KTD	23,30 %	11,45 %
7.	PERSENTASE PELAYANAN KB PP	24,41 %	20,25 %
8.	Jml Keluarga yg melaksanakan pengasuhan & pendampingan pembentukan karakter	45.056 keluarga	40.580
9.	Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK	56.722 keluarga	56.722 ke;luarga

- Kondisi DIY dalam realisasi DAK TA 2022 telah terealisasi sebesar 80,58 %.
- Dukungan DAK Fisik dan Non Fisik untuk TA 2023 di DIY juga telah disalurkan ke daerah sebesar 32,9 M.

B. Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama dan Pemberian Penghargaan

- Penandatanganan Pencapaian Kinerja Bersama Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Percepatan Penurunan Stunting. Penandatanganan dilakukan oleh Perwakilan dari Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.
- Penghargaan Prevalensi stunting terendah berdasar SSGI 2022 indeks 13.8%: Kota Yogyakarta
- Penghargaan Penurunan Stunting tertinggi 4.2%: Kab Bantul
- Penghargaan Realisasi DAK fisik tertinggi indeks 98.14%: Kab Sleman
- Penghargaan Realisasi DAK non fisik tertinggi indeks 96.4%: Kab. Gunung Kidul
- Penghargaan Provinsi terbaik tingkat nasional kelompok target pelayanan KB 10.000-60.000 akseptor nilai indeks juara I: Wakil dari Gubernur DIY.
- Provinsi terbaik tingkat nasional total KB MKJP kelompok target pelayanan 1.500-5.000 akseptor nilai indeks juara I: wakil dari Gubernur DIY.

C. Keynote Speaker-Kepala BKKBN RI diwakili Inspektorat Utama. Ari Dwikora Tono, Ak., M.Ec. Dev.

- Angka stunting berdasar SSGI 2022 DIY berada di rangkin 5 setelah Bali, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau, pada angka 16,4% dari sebelumnya 17,3%. Untuk yang terendah adalah Kota Yogyakarta di angka 13,8%.
- Program Banggakencana telah menurunkan angka kelahiran. LPP dilaksanakan melalui program KB bagi PUS dengan memberikan pelayanan KB yang berkualitas. Kesuksesan program KB ini dilatarbelkangi, diantaranya politik pemerintah, sikap dan perilaku, serta program berbasis komunitas.
- Unmet need sangat tinggi memerlukan strategi pemakaian alokon. Pelayanan KBPP perlu ditingkatkan agar mencegah jarak terlalu rapat yang berakibat naiknya AKI dan AKB serta sebagai upaya pencapaian pencegahan stunting.
- BKKBN sebagai Ketua pelaksana Percepatan penurunan stunting. Target 14%. DIY: 16.4% (tahun 2022), turun dari 17.6% (2021) sebelumnya.
- Upaya percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen berbagai pihak, menjalin kebersamaan internal dan eksternal BKKBN. Harapan: meningkatkan KB berkualitas, meningkatnya MKJP dan KBPP. Menurunkan angka kehamilan yang tidak diinginkan.

D. Arahan dan Pembukaan Resmi Rakerda Program Bangga Kencana D.I. Yogyakarta tahun 2023 – Arahan Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta – diwakili Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Kemasyarakatan - Ibu dr. Eti Kumolowati, M.Kes

- Stunting masih menjasi PR bagi BKKBN dan pemangku kebijakan. Hasil dari SSGI tahun 2022, DIY dengan angka 16.4%. Harapannya tahun 2024 target stunting tercapai 14%. Dengan memperhatikan capaian dan tahun 2022, maka diperlukan penguatan, sinergitas, integrasi, dan akselerasi, serta komitmen para pemangku kebijakan dengan peningkatan penggerakan seluruh unsur-unsur masyarakat untuk bekerja bersama-sama, bekerja dengan hati, tulus, ikhlas dalam mencapai satu tantangan, serta penurunan prevalensi stunting. Bekerja dengan sinkronisasi dan kolaboratif, bersatu untuk mencapai keluarga berkualitas dan mencapai target penurunan stunting.

E. Sesi Pemaparan Materi dan Diskusi

Moderator: Ibu Erlina Hidayati Sumardi, S.IP., MM – Kepala Dinas DP3AP2 DIY

Materi Cegah stunting melalui perbaikan pola asuh, pola makan dan sanitasi – RSUD Sleman – dr. Raden Yuli Kristiyanto, Sp.A., M.Sc.

- Kekurangan gizi tidak saja membuat stunting, tetapi juga menghambat kecerdasan, memicu penyakit, dan menurunkan produktivitas ini berakibat terhambatnya perkembangan kognitif & motorik.

- Individu yang pendek (usia < 2 tahun), dewasa yang pendek:TB/U usia 2 tahun 1 SD lebih rendah, tinggi dewasa 3,2 cm lebih rendah
- TB/U selama pertengahan masa kanak-kanak, tinggi dewasa 1,9 cm lebih rendah
- Kenaikan tinggi badan 1 SD pada usia 2 tahun berhubungan dengan penurunan 77% perawakan pendek saat dewasa, Anak dengan perawakan pendek memiliki risiko tinggi terhadap, perkembangan penyakit kronis, kegagalan oksidasi lemak seperti terjadi, pada obesitas dan penurunan toleransi glukosa.
- Audit Kasus Stunting BUKAN menemukan anak stunting, lalu “mengobati” kasus anak stunting itu sehingga angka stunting di daerah turun. Namun mengidentifikasi RISIKO dan PENYEBAB RISIKO stunting, lalu melakukan intervensi untuk menurunkan risiko dan penyebab risiko stunting tersebut di seluruh masyarakat, sehingga dapat memperbaiki kondisi anak yang sudah dan mencegah kasus baru anak stunting untuk muncul.
- AKS mengubah budaya dan memperbaiki sistem yang menyebabkan stunting, bukan hanya “mengobati” yang stunting.
- Penurunan angka stunting yang rasional dalam suatu wilayah adalah 3,9% per tahun dengan syarat (1) Data target dan risiko di wilayah tersebut valid, (2) Intervensi spesifik dan sensitif terlaksana secara: komprehensif, sistematis dan menyeluruh, tidak ada intervention gap’. Tidak mungkin bebas stunting, karena pasti ada kasus stunting yang tidak dapat dicegah atau diintervensi.
- Stunting terjadi: 20% terjadi saat lahir (malnutrisi prenatal/bumil), 20% terjadi saat usia 6 bulan pertama, 50% terjadi saat usia 6-24 bulan, 10% setelah usia 24 bulan.
- Intervention Gap di Sleman: Kurangnya fokus ke ibu menyusui dan baduta (terutama dengan FTT atau Growth Faltering): (1) Belum rutinnnya program pelatihan dan kalibrasi, pengukuran antropometrik di Posyandu dan Puskesmas, (2) Belum simultannya program promosi pencegahan dan deteksi baduta dengan FTT di masyarakat, (3) Belum berjalannya program pendukung rujukan kasus FTT ke Puskesmas, dan program pendukung rujukan kasus stunting ke Rumah Sakit, (4) Belum ada prosedur untuk tatalaksana bayi/baduta dengan FTT di Puskesmas (termasuk pemberian bantuan MP-ASI), (5) Belum banyak program intervensi SENSITIF yang fokus ke pencegahan stunting bagi baduta di Posyandu atau berbasis masyarakat (Kelas ASI/MP-ASI, kelas parenting, pendidikan pengasuhan anak).
- Rekomendasi Intervensi Sensitif: (1) Bantuan pembuatan dan pengurusan jaminan kesehatan bagi anak dari orangtua yang 5dak mampu oleh

Kalurahan, Dinas Sosial, BPJS, Dinas P3AP2KB, atau instansi terkait. (2) Evaluasi perilaku higiene, sanitasi lingkungan, dan ketersediaan air bersih oleh petugas kesehatan lingkungan Puskesmas dan kader kesehatan. Koordinasi dengan Kalurahan, Dinas P3AP2KB, atau instansi terkait bila diperlukan pembangunan/perbaikan sarana sanitasi lingkungan dan ketersediaan air bersih. (3) Konseling berhen6 merokok bagi orangtua/pengasuh atau keluarga yang merokok, (4) Pendidikan pola asuh anak dan cara pemberian makan anak yang benar bagi se5ap orangtua

- Feeding rules butuh pendampingan, bukan hanya sekali dua kali pertemuan

F. Materi Penguatan Pentahelix Untuk Jogja Istimewa; Sinergi Perguruan Tinggi Dalam Percepatan Penurunan Stunting – Kedaireka UGM - Dr. Lily Arsanti Lestari, S.T.P., M.P.

- Urgensi Kegiatan: (1) Prevalensi stunting DIY terendah ketiga di Indonesia sebesar 17.3% (SSGI 2021), (2) Disparitas antar kabupaten dan antar kecamatan dalam kabupaten cukup signifikan.
- Kerjasama unsur pentahelix di DIY melalui program Jogja Istimewa melalui UGM dan Unisa, UMY dan UAD, Poltekes dan UAD, UGM dan UGK, UGM dan UNRIYO.
- Aktivitas kegiatan:
 - a. Perguruan Tinggi:
 - ✓ Urun rembug stunting dilaksanakan secara virtual melibatkan 100 peserta dari unsur akademisi, mahasiswa, pemerintah daerah, media, pelaku usaha, penggerak masyarakat dan LSM
 - ✓ Workshop dan Capacity Building: Kegiatan berupa workshop analisa situasi berbasis data, analisa dampak dan keberlanjutan program serta analisa kebijakan dan penyusunan policy brief
 - ✓ Pengembangan Kanal Ilmu dan Sosial Media
 - ✓ pengembangan MOOC, MBKM tematik stunting
 - b. Pemerintah: workshop manajemen program basis data, workshop analisa kebijakan
 - c. Kelompok masyarakat: hilirisasi reka cipta, pelatihan kader dan TPK
 - d. Pelaku usaha dan media: Pengembangan kanal ilmu dan sosmed, diskusi panel CSR
- *Lesson Learned*: Program penurunan stunting bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab semua pihak (PT, dunia usaha, masyarakat/komunitas, media)
- Sinergi Pentahelix ini diharapkan dapat mempercepat penurunan stunting sesuai target pemerintah menjadi 14% di tahun 2024

G. Materi Intervensi Spesifik dan Peningkatan Gizi bagi Keluarga dengan Faktor Resiko Stunting - Dinas Kesehatan DIY – Ibu Endang Pamungkasih, M.Kes.

- Stunting diukur menggunakan parameter tinggi badan menurut umur. Stunting; tinggi badan menurut umur <-2SD di bawah kurva pertumbuhan normal WHO.

TREN STATUS GIZI BALITA INDONESIA

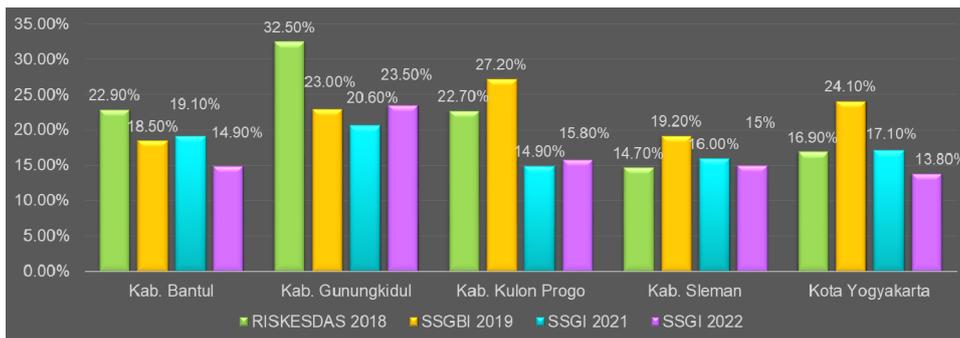
	Hasil Riskesdas		Hasil SSGI		
	2013	2018	2019	2021	2022
Stunting	37,6	30,8	27,7	24,4	21,6 ↓ 2,8
Wasting	12,1	10,2	7,4	7,1	7,7 ↑ 0,6
Underweight	19,6	17,7	16,3	17,0	17,1 ↑ 0,1
Overweight	11,8	8,0	4,5	3,8	3,5 ↓ 0,3



- Angka stunting SSGI turun dari 24.4% (2021) menjadi 21.6% di 2022.
- Proses Balita menuju Stunting (Dinkes DIY 2021): Weight Faltering 38.709 anak (30,49%), Underweigh 13571 anak (8,55%), Gizi Kurang 6801 anak (4,32%), Gizi Buruk 312 anak (0,20%). Pencegahan stunting lebih efektif dibandingkan pengobatan stunting.
- Capaian Pemeriksaan Kehamilan (ANC) DIY 2022: 99,99% Ibu hamil periksa kehamilan min1x selama kehamilan, 84,09% ibu hamil periksa kehamilan min 4x selama kehamilan, 74,32% ibu hamil periksa kehamilan minimal 6x mselama masa kehamilan. (sumber:web Kesda). Indikator keberhasilan pelayanan kesehatan ibu hamil “pemeriksaan kehamilan minimal 6x dan 2x diantaranya USG dengan dokter”.
- Hal yang perlu diperhatikan MPASI: usia, frekuensi, jumlah, tekstur, variasi, responsif, kebersiha, dll.
- Sejak 6 bulan MPASI harus mengandung 4 bintang: makanan pokok, sumber hewani zat besi, kacang-kacangan, kelompok sayur dan buah.
- Gerakan cegah stunting memiliki 5 kegiatan: Aksi bergizi, Bumil sehat, Posyandu aktif, Jambore kader, dan Cegah Stunting itu penting.
- Pesan Kunci Upaya Percepatan Penurunan Stunting: Pencegahan Stunting Jauh lebih Efektif daripada Pengobatan; Dukung kesuksesan Rencana Aksi 5 Gerakan Cegah Stunting; BERSAMA KITA BISA!

H. Materi Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di DIY – Bappeda DIY - Drs. Beny Suharsono, M.Si.

- Integrasi Program dan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Dalam Dokumen Perencanaan Daerah
- Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi Stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022
- Angka prevalensi Stunting di DIY juga mengalami penurunan yaitu 17,3% di tahun 2021 menjadi 16,4 % di tahun 2022 (Survei Status Gizi Indonesia (SSGI))
- Indonesia menduduki peringkat ke-115 dari 151 negara dengan prevalensi kekerdilan pada anak atau Stunting dalam skala Global atau Internasional (sumber : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK)
- Sasaran/targetnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah menurunkan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah usia 2 tahun menjadi 14%
- Trend Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota DIY



- Koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting (PERPRES 72/2021 pasal 20, 21 dan 22)
- Kolaborasi penanggulangan kemiskinan: Pemda DIY dan BAZNAS
- Data Sasaran Stunting (Sumber: Web Bangda)

Kabupaten/Kota	Data Sasaran Stunting - 2023		
	Jumlah Sasaran Stunting	Jumlah Sasaran	Persentase
Kab. Bantul	1.200	10.000	12%
Kab. Gunungkidul	1.100	9.000	12,2%
Kab. Kulon Progo	1.445	12.000	12%
Kab. Sleman	1.000	10.000	10%
Kota Yogyakarta	1.000	10.000	10%
DIY	10.000	100.000	10%

III. SESI TANYA JAWAB

A. PERTANYAAN

Pertanyaan ke-1, dari Ibu Suratminingsih Kab Bantul

- Apakah bayi lahir BBLR 1 kg kemungkinan besar menjadi anak stunting. Bayi berusia 3 bulan berat 2 kg. Kiat-kiat anak agar bayi tidak stunting?

Pertanyaan ke-2, dari Anggraeni W BKKBN DIY

- Di lingkungan sudah ada Posyandu, PAUD dan BKB. Tidak sedikit orangtua yang bekerja berdampak tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Bagaimana merangkul keluarga eksklusif yang kurang memperhatikan kegiatan tersebut?

Pertanyaan ke-3 dari Ratih BKKBN DIY

- Apakah yang dimaksud miskin ekstrim?

Pertanyaan ke 4 (zoom meeting) Chalimah Chandra Dewi PKB Sleman

- a. Kapan anak dikatakan wajar perawakan pendek? Berapa tinggi orang dewasa dikatakan pendek dan bisa berpengaruh pada tinggi badan anak?
- b. Apakah IQ orangtua stunting akan menurun ke anaknya?

B. JAWABAN

1. Jawaban Narsum R. Yuli Kristyanto

- Bayi lahir dengan berat kurang dari 1.500 gr dan usia kehamilan kurang dari 32 minggu sangat beresiko stunting. Bayi lahir dengan berat kecil, seharusnya dapat tumbuh optimal di dalam kandungan dan keluar tumbuh di lingkungan yang tidak seharusnya. Bayi BBLR sampai usia 2 tahun harus dalam pengawasan dokter spesialis anak. Bayi lahir prematur menggunakan usia koreksi. Bayi BBLR beresiko stunting. Saran: melakukan pencegahan kelahiran bayi prematur BBLR dan melakukan pemantauan komunikasi dari prematuritas.
- Pertanyaan 2:
Kasus Eksklusif juga ada di Sleman. Ortu yang tidak mau datang posyandu. Tidak mau datang ke faskes. Ketika datang ke faskes sudah dalam keadaan buruk. Latar belakang keluarga kaya dan berpendidikan namun anaknya gizi buruk, mengalami penemoni dan masuk RS baru mau mengikuti intervensi gizi. Setelah 2 bulan beratnya bisa naik. Dari kasus tersebut, kita mengajak orang-orang eksklusif untuk berpartisipasi itu sulit. Ada dokter yang tidak mau berpartisipasi alasannya sibuk di fayankes. Bagaimana cara pendekatannya? Salah satu alternatif, di tempat kerja (terutama yang kerja fulltime) terdapat terdapat layanan pemeriksaan. Terdapat juga (keluarga eksklusif) tidak terlalu sibuk namun tidak mau berpartisipasi. Tugas kader sampai edukasi saja. Sebaiknya disampaikan untuk merujuk ke dokter anak yang dipercaya. Kalau sesuatu hal itu merupakan trending, maka dari kalangan eksklusif maupun masyarakat bisa akan mau menerimanya. Misalnya Tik Tok. Harapannya Stunting menjadi trending bahkan menjadi

top trending. Promosi stunting masyarakat dapat dilakukan melalui medsos dan obrolan masyarakat.

- **Pertanyaan 3:**

Stunting itu bila tinggi badan kurang dari -2 SD dari kurva WHO. Untuk mengetahuinya harus diperikasakan ke faskes. Pembuktian kalau dia stunting atau stunted yang bukan karena stunting. Misal, Pendek karena genetik. (1) Diukur dengan tinggi badan orangtua. Nanti ada rumusnya dan kita bisa melihat rentang potensial tinggi anak. (2) Melakukan Rongen usia tulang. Kalau anak itu pendek karena keluarga atau keturunan nanti dilihat dari usia tulang. Usia anak 2 tahun tapi seperti usia 1 tahun. Hasil rongen tersebut dibaca dokter anak. Setelah itu dapat diintervensi dan edukasi. Ciri khas: bila pendek karena keturunan, maka berat badan per tinggi badan normal.

- Kalau IQ ortu stunting rendah, belum tentu anak IQ rendah. Karena stunting terkait nutrisi. Namun bila ada masalah sindrom tertentu kecerdasan bisa diturunkan ke anak.

2. **Jawaban Narsum Drs. Beny Suharsono, M.Si**

- Garis kemiskinan senilai dengan penduduk yang pengeluarannya Rp 551.000/per kapita orang/bulan. Miskin Ekstrim setara dengan pengeluaran tidak sampai Rp 331.000/per kapita/bulan.
- Misal Satu rumah tangga pendapatan 2,2 juta dianggap sudah di atas garis kemiskinan.
- Strategi menurunkan beban pengeluaran. Kalau tidak belanja/dikeluarkan menjadi miskin. Belanja: pola konsumsi untuk diri sendiri menjadi asupan. Rokok bukan konsumsi pengeluaran. Cara menutup selisih itu untuk menutup garis kemiskinan.

Tim Notulis,

Dokumentasi Kegiatan



NOTULEN
REVIEW PROGRAM BANGGA KENCANA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

I. PELAKSANAAN

- Hari/tanggal : Senin, 9 Oktober 2023
- Tempat : Ruang Kencana Perwakilan BKKBN DIY, Timoho, Umbulharjo, Kota Yogyakarta
- Peserta : 67 orang berasal dari Komandan Korem 072/Pamungkas, Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Sosial DIY, DP3AP2 DIY, Biro Tapem Setda DIY, DIY, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, IBI DIY, TP PKK DIY, Kodim 0731 / Kulon Progo, Kodim 0729 / Bantul, Kodim 0730 / Gunung Kidul, Kodim 0732 / Sleman, Kodim 0734 / Kota Yogyakarta, Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kab/Kota, OPD KB Kab Kota (Kepala dan Pengelola DAK), DPD IpeKB, Satgas PPS DIY dan kab kota, serta Internal BKKBN DIY
- Narasumber : 1. Kepala Perwakilan BKKBN DIY - Dr. Dra. Andi Ritamariani, M.Pd.
2. Inspektur Utama BKKBN - Ari Dwikora Tono, Ak, M. Ec. Dev
3. Sekretaris Daerah DIY yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan DIY - Drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes.
4. Penanggungjawab Bidang ADPIN BKKBN DIY – Rohdhiana Sumariati, S.Sos., M.Sc.
5. Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Keuangan dan BMN – Septiana Rakhmawati, S.Farm., Apt.
6. Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (Satgas PPS) DIY - Asteria Heni Hidayati, ST, MT.

II. HASIL

A. Laporan dan Evaluasi Program Bangga Kencana oleh Kepala Perwakilan BKKBN DIY - Dr. Dra. Andi Ritamariani, M.Pd.

- Visi Misi Program Bangga Kencana
- Capaian di DIY sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, antara lain: Sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 realisasi penyerapan anggaran sebesar 69,15%, sedangkan capaian peserta KB baru sebesar 47,42%, capaian peserta KB MKJP sebesar 52,2% (SIGA per 14 September 2023). Untuk angka mCPR sebesar 61,76%, dan unmet need sebesar 16,48% (SIGA 14 September 2023), dengan demikian target mCPR dan unmet need untuk DIY sudah tercapai.
- Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh BKKBN sejak mendapatkan mandat tersebut antara lain, menyusun RAN-PASTI (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penuruan Stunting), membentuk Tim

Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta kecamatan dan desa, kemudian membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) disetiap desa dan kelurahan.

- Berdasarkan Hasil Data SSGI Tahun 2022, Tingkat Prevalensi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 16,4 %, dengan rincian masing masing Kabupaten /Kota yaitu:
 1. Kabupaten Bantul tingkat prevalensi 14,9%,
 2. Kabupaten Gunungkidul tingkat prevalensi 23,5%,
 3. Kota Yogyakarta tingkat prevalensi 13,8 %,
 4. Kabupaten Kulon Progo tingkat prevalensi 15,8%,
 5. Kabupaten Sleman tingkat prevalensi 15%.
- Kondisi sebagaimana tersebut di atas, tentu harus menjadi perhatian kita semua agar pada akhir tahun anggaran 2023, serapan anggaran bisa lebih baik dan capaian sasaran kinerja program juga dapat tercapai secara maksimal.
- Tujuan kegiatan ini antara lain : 1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting pada semester 1 TA 2023; 2. Untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja setiap unit komponen pelaksana kegiatan pada semester 1 TA 2023

B. Arahan dan Pembukaan Review oleh Inspektur Utama BKKBN - Ari Dwikora Tono, Ak, M. Ec. Dev

- Program Keluarga Berencana Indonesia yang telah berhasil menurunkan jumlah anak di Indonesia dengan berbagai dukungan dan inovasi yang telah dilakukan BKKBN
- Hasil indikator kinerja BKKBN menggunakan data PK 2022: Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15-49 tahun, dari target 2,21 tercapai 2,14; Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ ASFR 15-19), dari target 21 tercapai 22,8; Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR), dari target 62,54 persen tercapai 59,4 persen; Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need), dari target 8 persen hanya tercapai 14,7 persen; Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari target 22,0 tahun tercapai 21,0 tahun; Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dari target 57,0 (skala 0-100) tercapai 56,07; Tingkat putus pemakaian kontrasepsi, dari target 23,10 persen tercapai 21,6 persen
- Yang menjadi perhatian saat ini : *Unmet Need* yang masih tinggi; Peningkatan jumlah Peserta KB Baru; Peningkatan dari Peserta KB Aktif juga perlu diperhatikan agar tidak menyebabkan tingginya angka putus pakai dalam ber-KB; Pelayanan KB di Rumah Sakit, utamanya KB Pasca Persalinan masih perlu ditingkatkan guna penurunan AKI dan AKB.
- DAK telah ada di setiap kabupaten/kota dengan sasaran pada: peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan remaja, calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan melahirkan melalui pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) di Rumah Sakit mampu

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) serta mendukung 8 area reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam penguatan ketahanan kesehatan penguatan promotif, preventif, dan pemenuhan *supply side* pelayanan Kesehatan.

- Saat ini, kondisi *stunting* di Indonesia 21,6 % (turun 2,8 % dr SSGI 2021 sebesar 24,4 %) dan 16,4 % di DIY (turun 0,9 % dari SSGI 2021 sebesar 17,3 %). Sedangkan target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 14%. Oleh karena itu, masih perlu upaya kerja keras dalam menurunkan angka *stunting*, antara lain melalui peningkatan kesertaan KB untuk menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang beresiko *stunting*
- Penting untuk terus menjalin kebersamaan dalam meningkatkan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal BKKBN, termasuk keterlibatan organisasi profesi, pihak swasta dan Perguruan Tinggi.
- Kegiatan ini, saya berharap dapat meningkatkan kembali komitmen kita dalam pemberian pelayanan KB yang berkualitas, meningkatnya penggunaan kontrasepsi modern termasuk di dalamnya KB Pasca Persalinan, serta menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan. Dan yang tidak kalah pentingnya, hal tersebut merupakan salah satu wujud dari dukungan kita dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.
- Ucapan terimakasih atas komitmen dan semangat pemerintah daerah dalam program KB

C. Keynote Speech oleh Sekretaris Daerah DIY yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan DIY - Drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes.

-
- Studitiru Dinas Kesehatan: Jambi dapat menurunkan *stunting* 4% dalam setahun
- Materi paparan mengenai "Implementasi Kovergensi percepatan penurunan *Stunting* DIY"
- Digitalisasi *stunting* : data mengenai *stunting* di DIY, diperlukan kerjasama lintas sektor seperti PKK, dll.
- Data *stunting* nasional menurut SSGI 2021 24 %, target 2024 diharapkan turun menjadi 14%
- Data *stunting* DIY menurut SSGI 16%, target 2024 diharapkan turun menjadi 14%
- *Stunting* sudah difasilitasi dan diperkuat Perpres, Pergub, dll. Dalam Perpres No. 72 telah diatur tugas Pembentukan TPPS provinsi dan ketugasan masing-masing bidangnya. Kelembagaan terdiri: TPPS : 5 Kab/Kota, 75 Kapanewon, 438 Kelurahan; Satgas *Stunting* dan Tim Audit Kasus *Stunting*; 1852 Tim Pendamping Keluarga (5556 personil yang terdiri dari Bidan Desa, Kader KB dan Kader PKK)
- *Stunting* 30% diurus oleh Dinas Kesehatan, 70% diurus lintas sektor

- Dimanatkan dalam Pergub, "Model Konvergensi Pencegahan Stunting" (Pembagian tugas dan tanggungjawab multisektor dalam mendukung Desa melakukan pencegahan *Stunting*), terdiri dari Intervensi Gizi Spesifik (Dinas Kesehatan) dan Intervensi Gizi Sensitif.
- Realisasi anggaran Stunting DIY di 2022 melalui Dinas Kesehatan, sekitar 14 milyar
- Monev dan Pelaporan Hasil Akhir Penanggulangan Stunting DIY
- Praktik Baik Upaya percepatan penurunan stunting DIY : pembagian dua telur per hari pada 15 Kapanewon Miskin di DIY (Konsep Dasar, Pemberdayaan&Kolaborasi, Cakupan/Sebaran, dan Manfaat yang Diharapkan). Pada pemberian telur ini diharapkan ditanyakan data juga mengenai data Kesehatan anak (agar tahu dia alergi pada kuning telur atau tidak).

D. Evaluasi Capaian Program Bangga Kencana oleh Penanggungjawab Bidang ADPIN BKKBN DIY – Rohdhiana Sumariati, S.Sos., M.Sc.

- Total pelayanan KB s/d Agustus 2023

TOTAL PELAYANAN KB S.D. AGUSTUS 2023

KODE	KABUPATEN	JUMLAH PESERTA KB RAPI	JUMLAH PESERTA KB BERANGKON	JUMLAH PESERTA KB GANTI PABA	TOTAL PELAYANAN KB
1	BURUNDI	1.000	21.211	1.000	23.211
2	BANJINE	1.000	10.579	1.000	12.579
3	CURUP	3.540	48.250	2.765	54.555
4	SEMARANG	6.006	48.652	2.165	56.823
7	KOTA YOGYAKARTA	2.003	10.971	570	13.544
JUMLAH TOTAL		13.713	57.675	7.500	78.888

- Total Pelayanan KB s/d Agustus 2023 Per Mix Kontrasepsi

TOTAL PELAYANAN KB S.D. AGUSTUS 2023 PER MIX KONTRASEPSI



- Capaian peserta KB baru s/d Agustus 2023 berdasarkan Kab/Kota

CAPAIAN PESERTA KB BARU S.D. AGUSTUS 2023

KAB./KOTA	PB			PB MKIP		
	KKP	PS	% THD KKP	KKP	PB MKIP	% THD KKP
KULON PROGO	4,365	3,093	70.9	2,571	1,603	62.3
BANTUL	11,377	3,964	34.8	4,864	2,318	47.7
GUNUNGKIDUL	9,329	3,542	38.0	4,018	1,772	44.1
SLEMAN	12,086	6,096	50.4	5,717	2,682	47.1
KOTA YOGYAKARTA	2,307	2,018	87.5	1,258	1,233	98.0
D.I.YOGYAKARTA	39,464	18,713	47.4	18,428	9,618	52.2

- Capaian peserta KB baru s/d Agustus 2023 berdasarkan target dan capaian KKP

JENIS ALOKON	KKP DIY 2023	CAPAIAN	%
SUNTIKAN	15,582	5,437	34.89%
PIL	2,615	1,872	71.59%
KONDOM	2,839	1,786	62.91%
IMPLAN	4,537	2,797	61.65%
IUD	12,078	5,875	48.64%
VASEKTO MI	123	41	33.33%
TUBEKTO MI	1,690	905	53.55%
TOTAL	39,464	18,713	47.42%

- CAPAIAN PESERTA KB ULANGAN S.D. AGUSTUS 2023

CAPAIAN PESERTA KB ULANGAN S.D. AGUSTUS 2023

KAB/KOTA	KAB/KOTA	SIMPAN PESERTA BUKAN KKP	SIMPAN ULANGAN								
			KKB PUS			KKB		KKB 2022	SIMPAN		KKB
			2022/2023	2023/2024	2023/2024	2022/2023	2023/2024		2022/2023	2023/2024	
1	KULON PROGO	21,221	5,283	3,190	8,173	2,730	215	2,191	1	417	415
2	BANTUL	27,028	10,201	1,530	17,097	1,030	171	1,023	0	490	491
3	GUNUNGKIDUL	26,763	5,203	1,531	16,732	11,493	199	2,123	2	1,352	475
4	SLEMAN	27,682	15,312	4,128	17,004	2,412	433	2,401	26	471	1,003
5	KOTA YOGYAKARTA	10,891	3,203	1,431	4,233	308	125	86	2	108	145
	D.I.YOGYAKARTA	127,685	35,202	11,782	112,003	30,220	1,061	10,214	26	1,377	2,519

- CAPAIAN PESERTA KB GANTI CARA S.D. AGUSTUS 2023

CAPAIAN PESERTA KB GANTI CARA S.D. AGUSTUS 2023

KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH PESERTA KB (MILLIAR)	CAPAIAN PESERTA KB GANTI CARA											
			SUNTIKAN			PIL			IMPLAN		IUD		TOTAL	%
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	KULON PROGO	208	15	40	24	61	48	36				204	98%	
2.	DIY	2.081	14	136	24	41	12	74	2	2	217	10%		
3.	GUNUNG SIBUJI	2.728	41	78	24	167	5	155	2		412	15%		
4.	SLEMAN	2.188	23	112	24	21	18	134	11		309	14%		
5.	KOTA YOGYAKARTA	1.54	14	21	78	4	14	45	2		178	11%		
DIY (Kumulatif)		2.081	102	1.129	124	98	34	417	14		1.774	85%		

- CAPAIAN PESERTA KB AKTIF PER MIX KONTRASEPSI AGUSTUS 2023 berdasarkan KKP dan capaian KKP

JENIS ALOKON	KKP DIY 2023	CAPAIAN	%
SUNTIKAN	65,304	135,416	207.36%
PIL	26,907	25,847	96.06%
KONDOM	84,740	44,687	52.73%
IMPLAN	18,769	26,902	143.33%
IUD	80,176	86,523	107.92%
VASEKTOMI	2,538	1,504	59.26%
TUBEKTOMI	22,198	14,964	67.41%
MAL	245	141	57.55%
TOTAL	300,877	335,984	111.67%

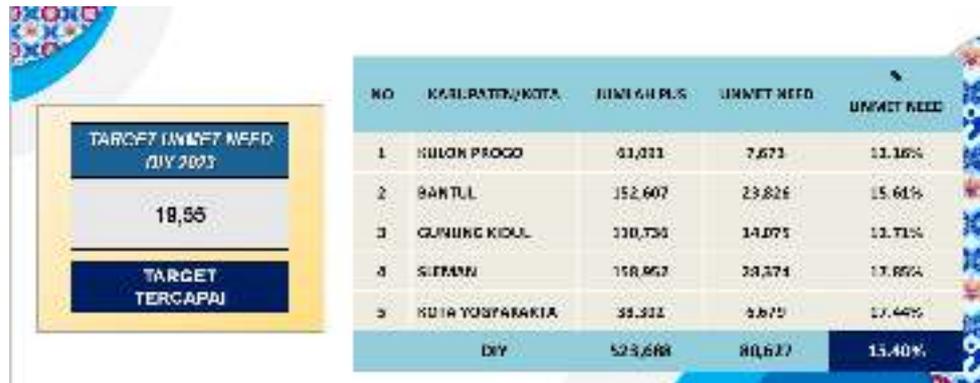
- PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN AGUSTUS 2023 terhadap Target mCPR

PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN AGUSTUS 2023

KAB / KOTA	PAUS	PA MODERN	mCPR
KULON PROGO	63,081	42,940	68.06%
DIY	152,607	95,606	62.69%
GUNUNG SIBUJI	110,736	73,594	70.97%
SLEMAN	158,952	95,765	60.75%
KOTA YOGYAKARTA	38,302	23,079	60.26%
DIY (Kumulatif)	521,683	335,984	64.41%



- PERSENTASE UNMET NEED AGUSTUS 2023 terhadap Target Unmet Need



- Cakupan Laporan Poktan, PPKS dan Balai Penyuluhan s/d Agustus 2023



- Capaian Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (per 29 September 2023)



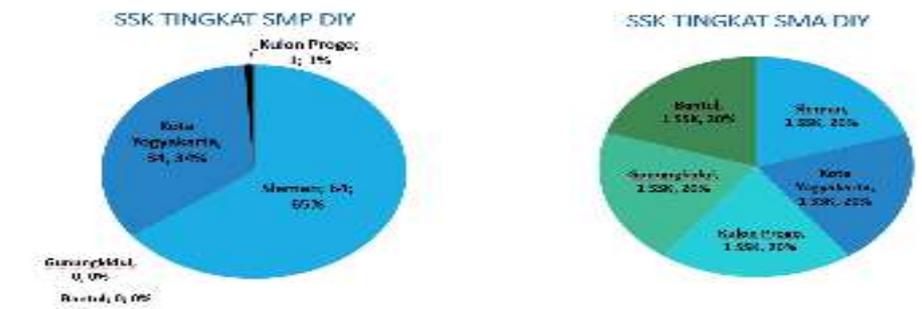
- Capaian Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas (per 29 September 2023)

Capaian Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas (per 29 September 2023)



- Capaian Sekolah Siaga Kependudukan Tingkat SMP dan SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta (per 29 September 2023)

Capaian Sekolah Siaga Kependudukan Tingkat SMP dan SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta (per 29 September 2023)

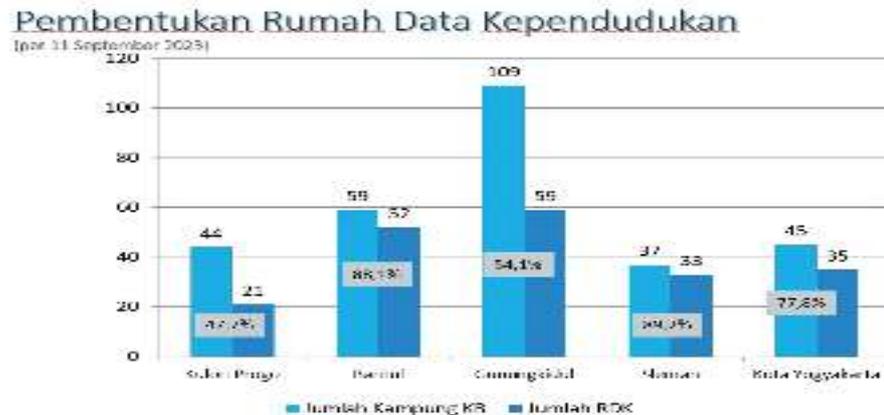


- Capaian Rumah Data Kependudukan Pro PN di Daerah Istimewa Yogyakarta (per 11 September 2023)

Capaian Rumah Data Kependudukan Pro PN di Daerah Istimewa Yogyakarta (per 11 September 2023)

NO	KABUPATEN/KOTA	TARGET	PENYEMPURNA	%
1	KULON PROGO	7	7	100
2	BAANTUL	10	10	100
3	GUNUNGKIDUL	18	18	100
4	SIEMAN	11	11	100
5	KOTA YOGYAKARTA	14	14	100
	DIY	66	66	100

- Pembentukan Rumah Data Kependudukan (per 11 September 2023)



E. Materi Evaluasi Capaian DAK 2023 dan Ketersediaan Alokasi oleh Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Keuangan dan BMN – Septiana Rakhmawati, S.Farm., Apt.

- Realisasi DAK
 - DAK fisik DIY : 25,97% (Bantul: 0%, Sleman: 0,61%, Kota Yk: 96,13%)
 - Sarpras Pelayanan KB : 26,31% (Bantul: 0%, Sleman: 0%, Kota Yk: 96,13%)
 - Biaya penunjang: 1,22% (Bantul: 0%, Sleman: 26,52%)
 - BOKB : 57,38% (Bantul: 49,10%, GK: 68,48%, KP: 55,15%, Sleman: 57,00%, Kota Yk: 57,59%)
- Tingkat ketersediaan alokasi:
 - IUD : 18,70 bulan
 - Pil Kombinasi : 19,21 bulan
 - Pil progestin : 38,58 bulan
 - Kondom : 5,01 bulan
 - Suntik progestin : 24,39 bulan
 - Implan : 7,16 bulan
- Rasio ketersediaan alokasi yg perlu mjd perhatian
 - IUD : GK: 0, Sleman: 0, Bantul: 0,82
 - Pil Kombinasi : GK : 0,76, Kota Yk : 0,98
 - Kondom : KP: 0, Bantul: 0, GK: 0,57
 - Suntik KB Progestin : GK: 0,92, Sleman: 0,84
 - Implan : Bantul : 0, KP: 0,58, GK : 0,27, Sleman: 0,48

F. Materi Evaluasi Pencapaian Program Percepatan Penurunan Stunting DIY oleh Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (Satgas PPS) DIY - Asteria Heni Hidayati, ST, MT.

- Prevalensi Stunting DIY turun 17,3% (2021) menjadi 16,4% (2022) atau sebesar 0,9%. Kabupaten Gunung Kidul dan Kulonprogo mengalami kenaikan 2,9% & 0,9%. Terendah kota Yogyakarta (13,8%)

- 520.456 keluarga sasaran di DIY (26%) merupakan keluarga risiko stunting Gunungkidul dan Kota Yogyakarta menjadi 2 kabupaten dan kota dengan proporsi keluarga risiko stunting tertinggi (>30%)
- PMT bersumber dari dana desa [GK dan Bantul], DAK NF [GK dan KP] dan APBD [Kota Jogja]. Sleman belum terinformasi datanya. Penerima manfaat hampir 42ribu dari ibu hamil dan balita
- Seluruh Kabupaten telah melaksanakan Audit kasus stunting siklus 1 dan 2
- Elsimil : Catin cakupan provinsi sebesar 33,3%, Bantul tertinggi cakupan tertinggi (49%) dan terendah Sleman (22%); Ibu hamil cakupan provinsi sebesar 16%, tertinggi GunungKidul tertinggi (32%), terendah Bantul (8%); Pasca persalinan cakupan provinsi DIY sebesar 15%, tertinggi Sleman (21%), terendah Kulon Progo (8%); Baduta cakupan provinnsi 11.379 anak usia 0-23 bulan, tertinggi Sleman (5.835 baduta), terendah Kulon Progo (84 baduta)
- Minilokakarya bulan Agustus hanya Gunungkidul yang tidak melakukan minlok
- Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), terdapat 38 BASS dengan penerima manfaat 12.279 orang, Lokus pada 15 kapanewon miskin di DIY (113 kelurahan) yang sebagian besar di Gunungkidul.
- Seluruh kebijakan tentang PPS telah di tindak lanjuti 100% di Kabupaten/Kota
- Strategi Optimalisasi Langkah Penurunan Stunting
 1. Data : Koordinasi Bersama TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti sistem 1 data dan pembentukan wali data
 2. PMT : Optimalisasi edukasi kepada masyarakat langsung pada saat acara yang melibatkan masyarakat umum.
 3. Konvergensi : Mendorong koordinasi TPPS untuk penguatan keterlibatan stakeholder berkaitan konvergensi.
 4. Mini Lokakarya Kecamatan : Memantau dan mendorong OPD KB Kabupaten/Kota melalui PLKB/PKB untuk melakukan kegiatan Mini lokakarya di Kecamatan
 5. Audit Kasus stunting : Prioritas pembuatan acuan yang bisa dipakai untuk pengambilan auditee AKS dan sosialisasi kepada OPD KB dan TPPS Kab/Kota
 6. BAAS : Koordinasi dengan BKKBN untuk pelaporan data penerima manfaat dan mitra pemberi manfaat
- Terindikasi menurut data Bulan Agustus 2023, beberapa wilayah mengalami kenaikan angka stunting, harap menjadi perhatian bersama
- Mohon dukungan penuh dari kabupaten/kota agar kondisi stunting di DIY dapat segera turun

III. SESI TAMBAHAN DARI POKJA DI BKKBN DIY

A. Bidang KB dan Kespro BKKBN DIY

Dr. Fathur :

- Minipil tidak hanya harus digunakan untuk KB paska persalinan, bisa digunakan untuk PUS biasa juga.
- Mohon dukungan untuk meningkatkan capaian World Contraceptive Day (WCD), terimakasih untuk Sleman dan Kulon Progo yang telah mencapai target dalam WCD

B. Bidang ADPIN BKKBN DIY

Kanthy Aryekti :

- Mini Lokakarya adalah Mekanisme Operasional, karenanya jangan sampai terlewatkan, harap menjadi perhatian (Data s/d Agustus Gunungkidul tidak mengadakan)

C. Bidang Kesekretarian BKKBN DIY

Sri Mahaniwati :

- Tindak lanjut untuk temuan tingkat kab/kota maupun provinsi silakan segera dibuat agar segera dibuat rekomendasinya
- DAK : SK kab/kota segera dibuat, semoga kita tidak berpuas dengan capaian DAK yang ada (capaian baru 57%)
- BOKB fisik siapkna rencana distribusi barangnya sehingga saat pelaksanaan tinggal mencocokkan/menghubungkan dengan perencanaan

D. Bidang Pengendalian Penduduk

Niken Wijayanti :

- Belum semua Kampung KB punya Rumah Dataku (pertambahannya belum signifikan), target tahun ini adalah 264 Rumah Dataku terbentuk di Kampung KB DIY (60%). Baru terbentuk 213 Rumah Dataku.

E. Bidang KS-PK

Aris Nugraha :

- Pembentukan Duta Genre baru tercapai 84% (Bantul kurang 40an orang bagi putra dan putri, Gunungkidul dan Sleman kurang sekitar 10an bagi putra dan putri)
- Pembentukan BKR kurang 2 dari Kabupaten Bantul

Yuni Hastutiningsih :

- BAAS datanya diminta setiap triwulan. Jika ada bantuan dari mitra kalau bisa didata untuk dilaporakn ke pusat
- BKB dan BKR terkait penganggaran posyandu menuju posyandu terintegrasi di DIY (BKR akan masuk dalam Posyandu)
- Sekolah Lansia targetnya adalah 5 sekolah (dari pusat), DIY kurang 2 di Ngaglik dan Pandak, Bantul.

IV. SESI TANYA JAWAB

A. Pertanyaan Termin 1

Pertanyaan ke-1, dari Pak Darojo (Kabid KS, OPD Kb Sleman, Kab Sleman)

- TPPS Sleman telah diupayakan agar aktif kembali. Setelah monev ditemukan banyak kendala : tidak percaya diri saat memberikan edukasi (bagi keluarga menengah ke atas). Saat ini sedang diupayakan untuk peningkatan kapasitas TPK melalui dana DID (tapi setelah konsultasi dana tersebut sulit digunakan untuk kepentingan yang dimaksud). Sleman bahkan ada tambahan 18,8 milyar dari wakil presiden.
- FYI: Duta Genre putra kurang 6 kelurahan, yang putri kurang 4 kelurahan).

Pertanyaan ke-2, dari Sutarti (IBI DIY)

- Bakti sosial Pelayanan Kb di Kulon Progo, IUD kehabisan. Apakah kecukupan alokon memang terbatas atau memang tempat pelayanan tidak mengajukan?

B. Jawaban Termin 1

1. Jawaban Narsum Heni (Satgas Stunting)

- Sleman anggarannya banyak, makanya sayang sekali
- Untuk percepatan Elsimil bisa ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas TPKnya
- Koordinasi dan peningkatan kapasitas juga bisa dilakukan kepada PKB dan PLKB untuk pengentasan stunting di Sleman

2. Jawaban Narsum Septiana Rakhmawati (Pokja Pengelolaan Keuangan dan BMN)

- Distribusi rutin terencana tiap bulan
- Distribusi darurat bisa dilakukan saat ada permintaan darurat
- Provinsi ada stok, kondisi tsb dapat terjadi karena kemungkinan OPD KB kurang pas memperkirakan jumlah pelayanan akan alokon tertentu

3. Jawaban Narsum Rohdhiana Sumariati (ADPIN)

- Anggaran dari daerah : sudah ada rambu-rambunya dan kewenangan ada di tiap daerah, BKKBN kurang mengetahui terkait penggunaan dana DID dan dari Wakil Presiden yang turun ke Sleman. Kami membutuhkan konsultasi lebih lanjut dengan Bappeda/BKKBN Pusat

V. CLOSING STATEMENT

- **Rohdhiana Sumariati, S.Sos., M.Sc.** : Terkait pencapaian PB (maupun PB MKJP), BKKBN mohon dukungan dari mitra kerja dan penyuluh KB agar berupaya mencapai target yang ada. Bisa diterobos dengan PB paska salin.
- **Asteria Heni Hidayati, ST, MT.:** Kita satu tim, mari kita tingkatkan komitmen sehingga target 2024 dapat tercapai, mari kita ber-konvergensi dengan baik. Semester 2 semoga target tercapai
- **Rahmat Hidayat, S.Sos., MA:** Percepatan penurunan stunting membutuhkan akselerasi karena ada beberapa target yang belum tercapai. 'Jika provinsi lain bisa, kita pasti juga bisa'. Banyak hal yang harus kita koordinasikan lebih lanjut sehingga rencana aksi dalam percepatan penurunan stunting dapat segera direalisasikan. **Tindak lanjut nyata, strategis, terencana dan inovatif sangat kita harapkan bersama.**

Tim Notulis,

dr. Iin Nadzifah Hamid
Dr. Mustikaningtyas, Psikolog
Anggraeni Wulandari, S.Sos, MA
Rahmat Hidayat, S.Sos., MA

Dokumentasi Kegiatan



LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

2023

DESEMBER



#017972

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL D.I. YOGYAKARTA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

REKAP PELAPORAN RINCIAN OUTPUT

DESEMBER (KUMULATIF)

Tahun : 2023

K/L : 068 - BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

UK. Eselon I : 01 - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

NO	NOMENKELATUR RINCIAN OUTPUT	FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			PROGRESS PELAKSANAAN
		Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%	
3331.BDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga									
1	3331.BDB.001 Faskes yang mendapat fasilitas dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	Lembaga	430	430		163,978,000	163,976,500	100.00%	100.00 %
3331.DCJ - Pelatihan Bidang Sosial									
2	3331.DCJ.001 SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangsa Kencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota	Orang	53	102		45,692,000	45,692,000	100.00%	100.00 %
3331.FBA - Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah									
3	3331.FBA.001 Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitas dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5	5		146,891,000	146,770,500	99.92%	100.00 %
4	3331.FBA.002 Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitas dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2	2		200,965,000	200,937,000	99.99%	100.00 %
5	3331.FBA.003 Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitas pembinaan penggerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders), KIE , serta penyediaan data dan informasi keluarga	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1	1		102,278,000	102,175,200	99.90%	100.00 %
3331.PBG - Kebijakan Bidang Kesehatan									
6	3331.PBG.001 Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi	Rekomendasi Kebijakan	2	2		150,000,000	149,850,000	99.90%	100.00 %
3331.PEA - Koordinasi									

NO	NOMENKELATUR RINCIAN OUTPUT	FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			PROGRESS PELAKSANAAN
		Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%	
7	3331.PEA.001 Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	kegiatan	6	7		791,170,000	789,660,000	99.81%	100.00 %
3331.QDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga									
8	3331.QDB.001 Faskes yang mendapatkan Intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting dan mendukung penurunan AKI	Lembaga	430	430		197,552,000	197,522,000	99.98%	100.00 %
3331.QDD - Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat									
9	3331.QDD.001 PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitas dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Kelompok Masyarakat	465	465		892,171,000	891,798,900	99.96%	100.00 %
10	3331.QDD.002 Kelompok BKL yang mendapat fasilitas dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	Kelompok Masyarakat	143	143		301,700,000	301,559,300	99.95%	100.00 %
11	3331.QDD.004 Kelompok UPPKA di Kampung KB yang mendapat fasilitas pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kelompok Masyarakat	5	5		136,071,000	135,317,300	99.45%	100.00 %
12	3331.QDD.006 Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB	Kelompok Masyarakat	66	66		597,432,000	596,530,200	99.85%	100.00 %
3331.QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga									
13	3331.QDE.001 Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HPK	Keluarga	56,722	56,722		217,937,000	217,717,000	99.90%	100.00 %
3331.QEI - Bantuan Lembaga									
14	3331.QEI.001 Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	Lembaga	430	430		3,716,448,000	3,716,141,376	99.99%	100.00 %
3331.QMA - Data dan Informasi Publik									
15	3331.QMA.001 Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)	layanan	1	1		3,307,454,000	3,307,420,500	100.00%	100.00 %

NO	NOMENKELATUR RINCIAN OUTPUT	FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			PROGRESS PELAKSANAAN
		Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%	
16	3331.QMA.002 Penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting	layanan	1	1		258,120,000	258,111,400	100.00%	100.00 %
3331.QMB - Komunikasi Publik									
17	3331.QMB.001 Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	layanan	3	3		375,000,000	374,798,300	99.95%	100.00 %
3331.SCM - Pelatihan Bidang Kesehatan									
18	3331.SCM.001 Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	Orang	5,576	5,581		2,840,054,000	2,839,996,100	100.00%	100.00 %
3331.UAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan									
19	3331.UAE.001 Laporan Monitoring dan evaluasi TPKTTPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota	Laporan	1	1		200,000,000	199,738,600	99.87%	100.00 %
3331.UBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah									
20	3331.UBA.001 Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5	5		226,000,000	225,770,500	99.90%	100.00 %
21	3331.UBA.002 Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5	5		125,100,000	124,560,000	99.57%	100.00 %
22	3331.UBA.005 Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan Ibu pascapersalinan	Kab/Kota	5	5		97,000,000	96,999,100	100.00%	100.00 %
5297.CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi									
23	5297.CAN.001 Pengadaan sarana dan prasana TIK Provinsi	Unit	2	2		108,287,000	107,779,000	99.53%	100.00 %
5297.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal									
24	5297.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1		186,289,000	186,287,700	100.00%	100.00 %

NO	NOMENKELATUR RINCIAN OUTPUT	FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			PROGRESS PELAKSANAAN
		Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%	
25	5297.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1		44,890,293,000	44,857,721,713	99.93%	100.00 %
5297.EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal									
26	5297.EBB.951 Layanan sarana internal provinsi	Unit	1	1		480,000,000	478,942,000	99.78%	100.00 %
5297.EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal									
27	5297.EBD.965 Layanan Audit Internal	Dokumen	1	1		39,760,000	39,759,100	100.00%	100.00 %
5297.PEA - Koordinasi									
28	5297.PEA.001 Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi	kegiatan	1	1		245,525,000	245,522,100	100.00%	100.00 %
5297.QAH - Pelayanan Publik Lainnya									
29	5297.QAH.001 Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi	layanan	1	1		131,250,000	131,245,575	100.00%	100.00 %
5297.QIF - Pengawasan dan Pengendalian Layanan									
30	5297.QIF.001 Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi	Layanan	1	1		71,437,000	71,426,500	99.99%	100.00 %

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL D.I. YOGYAKARTA

[masih kosong]



2023

DIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEDEPUTIAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS



PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL D.I. YOGYAKARTA

Dashboard



Nilai SMART 84.98 Baik





Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

BERENCANA ITU KEREN